

# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 42. TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
-

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
-

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
  5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
  6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
  8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
-

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/Unit Kerja;
14. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

## **Pasal 2**

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 3**

Kode dan klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

---

#### **Pasal 4**

Susunan Akun Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 5**

Kode Program dan Kegiatan Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 6**

Kode dan Program Kegiatan Unik/Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 7**

Kode Rekening Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 8**

Kode Rekening Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 9**

Kode Rekening Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 10**

Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 10 november 2015

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**



**KHERLANI**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 10 november 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR**

---

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
-



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
-

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/Unit Kerja;
14. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

## **Pasal 2**

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 3**

Kode dan klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

---

#### **Pasal 4**

Susunan Akun Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 5**

Kode Program dan Kegiatan Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 6**

Kode dan Program Kegiatan Unik/Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 7**

Kode Rekening Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 8**

Kode Rekening Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 9**

Kode Rekening Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 10**

Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

---

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. PEDOMAN UMUM**

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) didasarkan pada Rencana Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menitikberatkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sesuai dengan hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Rapat Koordinasi Pembangunan Kabupaten;
- 2) Jumlah anggaran yang diusulkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertuang di dalam RKA-SKPD yang di dalamnya memuat:
  - a. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD);
  - b. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 1);
  - c. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 2.1);
  - d. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 2.2.1);
  - e. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan (Formulir RKA-SKPD 2.2);
  - f. Rincian Penerimaan Pembiayaan (Formulir RKA-SKPD 3.1);
  - g. Rincian Pengeluaran Pembiayaan (Formulir RKA-SKPD 3.2).
- 3) Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dan Formulir RKA-SKPD 2.2 terdiri dari program dan kegiatan standar dan program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan;
- 4) Program dan kegiatan standar adalah program dan kegiatan yang dapat dianggarkan oleh setiap SKPD (lihat Lampiran V) dan memiliki kode program mulai dari nomor 01 sampai dengan nomor 14;
- 5) Program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan adalah program dan kegiatan yang hanya dapat dianggarkan oleh SKPD tertentu sesuai dengan kode urusan pemerintahan dan organisasi (lihat Lampiran VI) dan memiliki kode program mulai dari nomor 15 ke atas;

- 6) RKA-SKPD disusun berdasarkan RKA dari Unit Kerja (Unit Pelaksana Teknis Daerah – UPTD). Dari RKA Unit Kerja digabung ke dalam RKA SKPD, oleh karena itu setiap Unit Kerja secara berjenjang menurut tingkatan tanggung jawab organisasi menyusun anggaran masing-masing sesuai dengan Renstra Satuan Kerja induknya dengan menitikberatkan pada KUA dan PPA;
- 7) APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja atau tujuan yang ditetapkan. Konsekuensinya setiap kegiatan yang diusulkan dalam RKA-SKPD mencantumkan tolok ukur dan indikator kinerja, yaitu berupa masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), dan hasil (*Outcomes*);
- 8) Jumlah anggaran belanja yang diusulkan dalam RKA-SKPD berpedoman pada Standar Biaya Umum (SBU) yang terdapat dalam pedoman ini dan Standar Satuan Harga Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- 9) SKPD yang akan menyusun RKA-SKPD untuk Tahun 2016 harus sesuai dengan Kode Urusan Pemerintahan dan Organisasi yang dapat dilihat pada Lampiran III;
- 10) Program dan kegiatan untuk masing-masing SKPD harus sesuai dengan program dan kegiatan yang berada pada kewenangan Urusan Pemerintahan yang berkenaan;
- 11) RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- 12) Rancangan APBD (RAPBD) dibuat berdasarkan hasil penggabungan RKA-SKPD seluruh SKPD sampai dengan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD yang jadwalnya akan ditentukan kemudian.

## **II. KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.**

### **1) Kuasa Pengguna Anggaran**

- a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan, tugas, dan fungsi Pengguna Anggaran;
  - b. Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, seperti pada SKPD Dinas
-

- Pendidikan dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di sekolah-sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

## **2) Bendahara Penerimaan**

- a. Setiap SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pemungutan pendapatan daerah diangkat satu bendahara penerimaan dan beberapa pembantu bendahara penerimaan;
- b. Bendahara penerimaan diangkat dengan Keputusan Bupati dan pembantu bendahara penerimaan diangkat dengan Keputusan Pengguna Anggaran;
- c. Jumlah pembantu bendahara penerimaan didasarkan pada pertimbangan besarnya jumlah uang yang dikelola yaitu penerimaan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibantu oleh 1 (satu) orang Pembantu Bendahara Penerimaan dan penerimaan di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Pembantu Bendahara Penerimaan;
- d. Bendahara penerimaan dan pembantu bendahara penerimaan memperoleh honorarium setiap bulan yang besarnya diatur dalam Standar Biaya Umum (SBU) dan klasifikasinya dikelompokkan dalam belanja langsung dengan jenis belanja pegawai.

## **3) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran**

- a. Pada setiap SKPD diangkat satu bendahara pengeluaran dan beberapa pembantu bendahara pengeluaran;
  - b. Khusus pada SKPD Dinas Pendidikan dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu di sekolah-sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. Khusus pada SKPD Dinas Kesehatan dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu di UPT Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan untuk Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran;
-

- e. Jumlah pembantu bendahara pengeluaran pada setiap SKPD maksimal 3 (tiga) orang, masing-masing sebagai Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, dan Pengurusan Gaji, kecuali pada SKPD Kantor Camat, Sekolah-Sekolah dan Puskesmas maksimal 2 (dua) orang masing-masing sebagai Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang dan Pengurusan Gaji. Khusus bagian-bagian pada Sekretariat Daerah ditunjuk masing-masing 1 (satu) orang pembantu bendahara pengeluaran;
- f. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran memperoleh honorarium setiap bulan yang besarnya diatur dalam Standar Biaya Umum (SBU).

#### **4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

- a. Pada setiap SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya dapat menunjuk PPTK paling banyak 6 (enam) orang kecuali pada Dinas Pekerjaan Umum ditunjuk PPTK paling banyak 14 (empat belas) orang, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan ditunjuk PPTK paling banyak 10 (sepuluh) orang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditunjuk PPTK paling banyak 8 (delapan) orang dan pada Bagian-Bagian di Sekretariat Daerah masing-masing dapat ditunjuk maksimal 2 (dua) orang PPTK;
- b. Untuk Program dan Kegiatan Wajib yang harus ada pada setiap SKPD, PPTK adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan/atau Kepala Sub Bagian Perencanaan;
- c. PPTK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) orang Pembantu PPTK dengan tugas sebagai pembuat dokumen;
- d. PPTK tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- e. PPTK dan Pembantu PPTK ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran;
- f. PPTK dan Pembantu PPTK diberi honorarium yang besarnya dihitung dari jumlah seluruh anggaran kegiatan yang dikelola, penganggaran honorariumnya dianggarkan pada salah satu kegiatan yang paling besar.

#### **5) Pejabat Pembuat Komitmen**

- a. SKPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa dapat menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali pada
-



SKPD Dinas Pekerjaan Umum ditunjuk paling banyak 6 (enam) orang, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan paling banyak 2 (dua) orang, serta untuk Sekretariat Daerah ditunjuk paling banyak 3 (tiga) orang;

- b. Bagi SKPD yang tidak memiliki pegawai yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan adanya pegawai yang memenuhi persyaratan;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen memperoleh honorarium yang besarnya berdasarkan pagu Belanja Langsung sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Umum (SBU).

**6) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)**

- a. Kepala SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya menunjuk Kepala Sub Bagian yang membidangi Keuangan sebagai PPK-SKPD;
- b. Untuk membantu pelaksanaan tugas PPK-SKPD, Kepala SKPD menetapkan 2 (dua) orang staf sebagai Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- c. PPK-SKPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- d. Pembantu PPK-SKPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran;
- e. Untuk PPK-SKPD dan Pembantu PPK-SKPD memperoleh honorarium yang besarnya disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU).

**III. KODE REKENING**

Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, setiap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah harus menggunakan kode rekening yang terdiri dari:

**1) Kode Urusan Pemerintahan**

- a. Kode urusan pemerintahan terdiri dari 3 digit (X.XX);
- b. Satu digit pertama untuk Kode Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dan dua digit terakhir untuk Kode Urusan Pemerintahan sesuai dengan Kode Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang berkenaan;
- c. Kode urusan pemerintahan dapat dilihat pada Lampiran III.

**2) Kode Organisasi**

- a. Kode organisasi terdiri dari 2 digit (XX);
- b. Dua digit pertama untuk kode Satuan Kerja sesuai dengan Kode Urusan Pemerintahan yang berkenaan. Dua digit terakhir untuk kode Unit Kerja/UPTD sesuai dengan Kode Satuan Kerja yang berkenaan;
- c. Kode Organisasi dapat dilihat pada Lampiran III.

### **3) Kode Program**

- a. Kode program terdiri dari 2 digit (XX);
- b. Kode program dengan nomor 01 sampai dengan nomor 14 adalah program yang dapat dilaksanakan oleh seluruh SKPD kecuali diatur lain oleh Edaran ini selanjutnya disebut Kode Program Non Urusan dan kode program 15 ke atas adalah kode program yang hanya dapat dilaksanakan oleh SKPD tertentu yang berada pada Kode Urusan Pemerintahan yang berkenaan selanjutnya disebut Kode Program Khusus/Unik;
- c. Kode program hanya diisi untuk kelompok belanja langsung sesuai dengan kode programnya yang bersesuaian. Sedangkan untuk kelompok belanja tidak langsung kode program diisi 00;
- d. Kode program dapat dilihat pada Lampiran V dan Lampiran VI;
- e. Untuk SKPD yang menganggarkan pendapatan dan pembiayaan daerah kode program ditulis 00.

### **4) Kode Kegiatan**

- a. Kode kegiatan terdiri dari 2 digit (XX);
- b. Kode kegiatan dapat bernomor dari 01 sampai dengan nomor 99. Kegiatan terdiri dari kegiatan Non Urusan dan Kegiatan yang berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah;
- c. Kegiatan Non Urusan adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh SKPD kecuali diatur lain oleh Edaran ini. Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan oleh SKPD tertentu;
- d. Kode kegiatan hanya diisi untuk kelompok belanja langsung sesuai dengan kode kegiatan yang bersesuaian. Sedangkan untuk kelompok belanja tidak langsung kode kegiatan diisi 00;
- e. Kode rekening untuk kegiatan Non Urusan dan kegiatan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada Lampiran V dan Lampiran VI;
- f. Untuk SKPD yang menganggarkan pendapatan kode kegiatan ditulis 00;

### **5) Kode Akun**

- a. Kode akun terdiri dari 1 digit (X);
-

b. Kode akun dapat dilihat pada Lampiran IV.

**6) Kode Kelompok**

a. Kode kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terdiri dari 1 digit (X);

b. Kode kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX.

**7) Kode Jenis**

a. Kode jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terdiri dari 1 digit (X);

b. Kode jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX.

**8) Kode Objek**

Kode objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX.

**9) Kode Rincian Objek**

Kode rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX.

**10) Contoh Kode Rekening**

Berikut ini contoh kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Nama satuan kerja : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Pendapatan : Penerimaan dari Dana Alokasi Umum  
Nama Program : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Nama Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga  
Belanja : Pengeluaran untuk Pembelian Kertas  
Penerimaan Pembiayaan : Penerimaan pinjaman dari Bank  
Pengeluaran Pembiayaan : Pengeluaran untuk Penyertaan Modal pada Bank Lampung

Dari asumsi di atas maka Kode Rekening Pendapatan adalah:

1.20	1.20	07	00	00	4	2	2	01	01
------	------	----	----	----	---	---	---	----	----

Kode Rekening Belanja adalah:

1.20	1.20	07	17	02	5	2	2	01	01
------	------	----	----	----	---	---	---	----	----

Kode Rekening Penerimaan Pembiayaan adalah:

1.20	1.20	07	00	00	6	1	4	03	01
------	------	----	----	----	---	---	---	----	----

Kode Rekening Pengeluaran Pembiayaan adalah:

1.20	1.20	07	00	00	6	2	2	02	01
------	------	----	----	----	---	---	---	----	----

#### IV. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

##### 1) Petunjuk Umum

- a. Penyusunan anggaran pendapatan daerah didasarkan pada perkiraan pendapatan yang akan diterima dan diperoleh pada Tahun Anggaran 2016;
- b. Anggaran pendapatan hanya disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya harus memungut, menerima, mencatat, dan menyetorkan pendapatan daerah ke rekening kas daerah;
- c. Anggaran pendapatan daerah dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 1.

##### 2) Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi pendapatan menurut kelompok pendapatan daerah terdiri dari:

###### a. Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

###### 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp26,56 triliun atau 25,61%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp17,65 triliun atau 24,21% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp8,90 triliun atau 29,20%.

Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 secara nasional rata-rata sebesar 79,28%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,67% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,63%.

Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 secara nasional rata-rata sebesar 16,65%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,78% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 64,22%.

- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- f) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
-

- b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

---

- (1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan,



pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2016, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau

(2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2016 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2015, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah Kabupaten/Kota menganggarkan kembali dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2016 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dilakukan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2016 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

## 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan

kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum

dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 3) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2016, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2015, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

- 4) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah

daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

- 5) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 6) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 7) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2016 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

## **V. PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH**

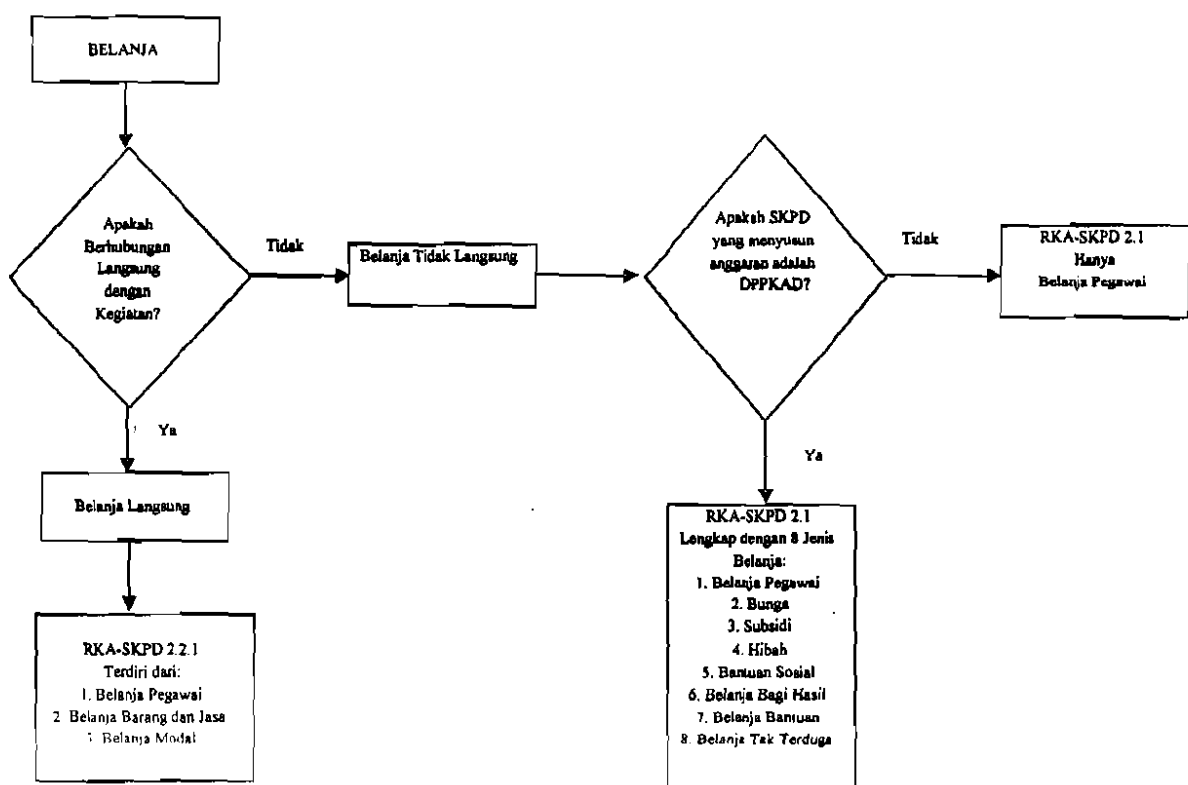
### **1) Petunjuk Umum**

- a. Pengklasifikasian suatu belanja ke dalam kelompok belanja adalah dengan cara mengidentifikasi apakah belanja yang dikeluarkan tersebut termasuk ke dalam kelompok belanja tidak langsung atau belanja langsung.
- b. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program atau kegiatan sehingga keberadaannya bukan merupakan konsekuensi ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan maka belanja tidak langsung tidak memiliki kode program dan kode kegiatan. Belanja tidak langsung dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 2.1.
- c. Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program atau kegiatan sehingga keberadaannya



merupakan konsekuensi karena adanya suatu program atau kegiatan tersebut. Karena berkaitan dengan program dan kegiatan maka belanja langsung harus memiliki kode program dan kode kegiatan. Belanja langsung dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1.

- d. Belanja Tidak Langsung menurut jenis belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
- e. Khusus untuk PPKD (BPKAD) belanja tidak langsung dianggarkan dengan 7 (tujuh) jenis belanja yang lengkap pada Formulir RKA-SKPD 2.1. Sedangkan untuk SKPD (SKPD selain BPKAD), belanja tidak langsung hanya Belanja Pegawai, dan diluar belanja tidak langsung adalah Belanja Langsung yang penganggarannya dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1.
- f. Belanja Langsung memiliki 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
- g. Diagram alur (*flowchart*) untuk mengidentifikasi belanja ke dalam kelompok belanja, dapat dilihat di bawah ini :



## 2) Indikator Kinerja dan Klasifikasi Belanja

### a. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dari suatu kegiatan yang menggambarkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk penilaian kinerja digunakan ukuran penilaian yang didasarkan pada indikator sebagai berikut:

1) Masukan (Input)

- a. Tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber, baik Sumber Dana, Sumber Daya Manusia, Material, Teknologi dan sebagainya yang dilaksanakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
- b. cantumkan Jumlah Dana untuk setiap jenis masukan;
- c. identifikasi Jumlah Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, baik jumlah pengelola maupun yang dikelola bila ada (contoh: peserta pelatihan).

2) Keluaran (Output)

Tolak ukur kinerja berdasarkan produk (Barang atau Jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai masukan yang digunakannya, misalnya :

- a. panjang saluran irigasi yang dibangun (m);
- b. panjang jalan yang dibangun (km);
- c. luas areal sawah yang dicitak (hektar); dan
- d. jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang), dsb.

3) Hasil (Outcomes)

Tolak ukur kinerja yang berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya:

- a. jumlah anak sekolah yang dapat ditampung.
- b. peningkatan jumlah luas sawah yang beririgasi teknis.
- c. jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan, dsb.

Indikator Kinerja hendaknya :

- a. spesifik dan jelas;
  - b. dapat diukur secara obyektif;
  - c. dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
  - d. harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan; dan
  - e. efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya secara efisien dan efektif.
-

b. Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja adalah sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung menurut jenis belanja terdiri dari:

a) Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk di dalamnya uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Belanja Gaji dan Tunjangan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.
  - (3) Gaji dan segala jenis tunjangan lainnya dianggarkan berdasarkan daftar gaji bulan September 2014 dikali 14 bulan kecuali tunjangan beras, ditambah Accres maksimum 2,5 %.
  - (4) Belanja Pegawai supaya diperhitungkan rencana kenaikan Gaji Pokok untuk pembayaran gaji ketigabelas termasuk dalam rangka pengisian Formasi Pegawai dalam Tahun 2015 dan untuk CPNS dihitung penuh sebagai PNS.
  - (5) Formasi pejabat struktural yang belum terisi pada tahun 2014 tetap dianggarkan penuh.
  - (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk
-

pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- (7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- (8) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- (9) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (10) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (11) Anggaran untuk Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dianggarkan dalam RKA-SKPD masing-masing.

b) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016, perusahaan/ lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

d) Belanja Hibah

(1) Hibah adalah pemberian uang, barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

(2) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD sedangkan hibah berupa barang/jasa dicantumkan pada RKA-SKPD masing-masing.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.

e) Belanja Bantuan Sosial

- (1) Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang, barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD sedangkan bantuan sosial berupa barang dicantumkan pada RKA-SKPD masing-masing.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penganggaran belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang bantuan sosial.

f) Belanja Bagi Hasil

- (1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa atau kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2016, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

g) Belanja Bantuan Keuangan

(1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

(2) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

(3) Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- (4) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (6) Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- (7) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.



7. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014.
8. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
9. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
10. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
11. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

12. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
13. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial.  
Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/ jasa yang akan diserahkan pada pihak ketiga/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan.
14. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
15. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten;
  - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - d. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - e. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
16. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
17. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
18. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

#### h) Belanja Tidak Terduga

(1) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### 2) Belanja Langsung

Belanja Langsung menurut jenis belanja terdiri dari:

##### a) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Belanja pegawai pada kelompok belanja langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang besarnya diatur dalam Standar Biaya Umum (SBU).

##### b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

1. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan, kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan

- dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, jasa instruktur/narasumber;
2. Pembelian/pengadaan barang diklasifikasikan ke dalam belanja barang dan jasa apabila harga satuan barang tersebut lebih kecil dari Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pengecualian dilakukan atas barang yang menurut klasifikasinya masuk ke dalam kelompok belanja modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Barang tersebut harus diklasifikasikan ke dalam kelompok belanja modal walaupun nilai satuannya lebih kecil dari Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  3. Belanja pemeliharaan yang termasuk ke dalam jenis belanja barang dan jasa adalah belanja pemeliharaan untuk mempertahankan fungsi pelayanan minimal dari aset milik Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak termasuk pemeliharaan yang merupakan rehabilitasi berat sehingga aset milik Pemerintah Daerah bertambah fungsi, manfaat, serta umur ekonomisnya. Untuk pemeliharaan aktiva tetap berwujud batas minimum kapitalisasi menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  4. Dalam rangka penganggaran pemeliharaan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD) yang telah disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Pengelola Barang.
  5. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
  6. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

19. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
20. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c) Belanja Modal

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dianggarkan senilai harga beli atau bangun ditambah dengan biaya perencanaan dan pengawasan;
2. Khusus untuk pengadaan aset tetap berwujud pada Program dan Kegiatan Wajib yang harus ada disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, jika biaya-biaya yang timbul dalam rangka perolehan aset dimaksud diperuntukkan untuk beberapa kegiatan atau pengadaan maka belanja tersebut dianggarkan dalam jenis belanja pegawai atau barang dan jasa;
3. Dalam rangka penganggaran belanja modal mengacu pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Pengelola Barang.
4. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 untuk

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

5. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
6. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
7. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
8. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset

tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

9. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## **VI. PENYUSUNAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### **1) Petunjuk Umum**

- a. Pembiayaan daerah hanya dianggarkan pada RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Karena dalam penganggaran pembiayaan daerah tidak dikenal program dan kegiatan, maka kode program dan kegiatan ditulis 00;
- c. Penerimaan Pembiayaan Daerah dituangkan dalam Formulir RKA-PPKD 3.1 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dituangkan dalam Formulir RKA-PPKD 3.2.

### **2) Klasifikasi Pembiayaan**

Klasifikasi pembiayaan daerah menurut kelompok pembiayaan daerah terdiri dari:

#### **a. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Klasifikasi Penerimaan Pembiayaan Daerah menurut jenis penerimaan pembiayaan terdiri dari:



- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA);
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
- 6) Penerimaan Piutang Daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

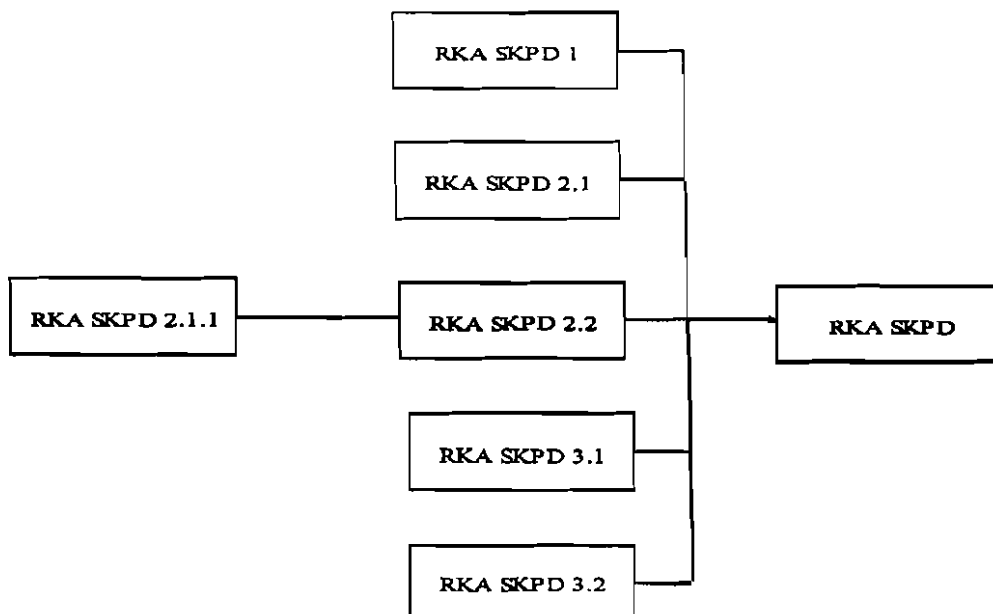
Klasifikasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah menurut jenis pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- 3) Pembayaran Pokok Utang; dan
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah.

**VII. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DAN BENTUK FORMULIR**

1. Prosedur Penyusunan RKA-SKPD

f. Formulir RKA-SKPD



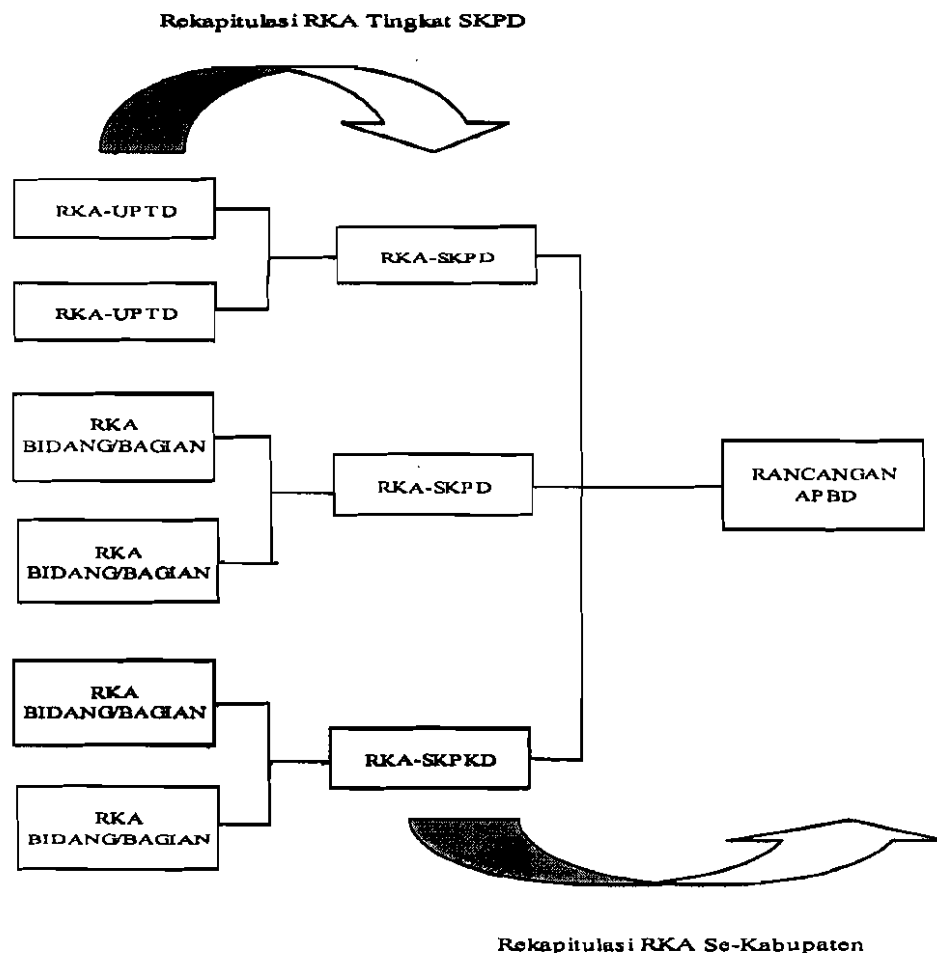
Berdasarkan diagram di atas prosedur penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap SKPD yang memiliki fungsi pengelolaan pendapatan daerah membuat Formulir RKA-SKPD 1 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Formulir RKA-SKPD 1 memuat anggaran sampai rincian objek pendapatan daerah;

- 2) Selanjutnya setiap SKPD membuat Formulir RKA-SKPD 2.1 tentang Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah. Khusus untuk PPKD yaitu BPKAD (PPKD), anggaran belanja tidak langsung terdiri dari 8 (delapan) jenis belanja sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab V angka 1) huruf e, dan SKPD selain BPKAD hanya menganggarkan Belanja Pegawai. Formulir RKA-SKPD 2.1 memuat anggaran sampai rincian objek belanja daerah;
- 3) Selanjutnya setiap SKPD membuat Formulir RKA-SKPD 2.2.1 tentang Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja langsung dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 terdiri dari belanja kegiatan standar dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan. Kegiatan standar memiliki kode program mulai dari nomor 01 sampai dengan 14 dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan memiliki kode program mulai dari nomor 15 ke atas sesuai dengan kode program pada Urusan Pemerintahan dan Organisasi masing-masing SKPD. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 memuat anggaran sampai rincian objek belanja daerah;
- 4) Selanjutnya setiap SKPD membuat Formulir RKA-SKPD 2.2 tentang Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Formulir RKA-SKPD 2.2 merupakan rekapitulasi dari Formulir RKA SKPD 2.2.1;
- 5) Selanjutnya BPKAD selaku PPKD membuat Formulir RKA-SKPD 3.1 tentang Rincian Penerimaan Pembiayaan dan Formulir RKA-SKPD 3.2 tentang Rincian Pengeluaran Pembiayaan. SKPD selain BPKAD tidak perlu membuat Formulir RKA-SKPD 3.1 dan Formulir RKA-SKPD 3.2. Formulir RKA-SKPD 3.1 dan Formulir RKA-SKPD 3.2 memuat anggaran sampai rincian objek pembiayaan daerah;
- 6) Selanjutnya dari seluruh formulir RKA-SKPD di atas direkapitulasi menjadi Formulir RKA-SKPD tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Formulir RKA-SKPD memuat anggaran hanya sampai jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

g. Rekapitulasi RKA-SKPD tingkat SKPD dan Se-Kabupaten

1) Berikut ini diagram penyusunan RKA-SKPD baik untuk tingkat SKPD maupun se-Kabupaten;



2) Berdasarkan diagram di atas, rancangan Perda APBD disusun berdasarkan seluruh RKA-SKPD yaitu RKA-SKPD non PPKD dan RKA-SKPD PPKD. Sedangkan RKA-SKPD baik RKA-SKPD non PPKD maupun RKA-SKPD PPKD disusun berdasarkan RKA Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), misalnya RKA-SKPD Dinas Pendidikan disusun berdasarkan rekapitulasi RKA-SKPD Dinas Pendidikan (anggaran Dinas Pendidikan di luar anggaran SMP dan SMA/SMK) ditambah RKA-Unit Kerja SMP ditambah RKA-Unit Kerja SMA/SMK. RKA-SKPD Sekretariat Daerah disusun berdasarkan rekapitulasi RKA-Unit Kerja masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah;


3) Program dan Kegiatan Standar

- a) Kegiatan standar dapat dianggarkan pada masing-masing Unit Kerja pada SKPD sepanjang hal tersebut memang diperlukan;
- b) Jumlah dan besaran kegiatan standar untuk masing-masing Unit Kerja diatur oleh Pengguna Anggaran;


- c) Jumlah dan besaran kegiatan standar pada SKPD yang dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 merupakan rekapitulasi kegiatan standar dari RKA-SKPD Unit Kerja 2.2.1.
- 4) Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan
  - a) Unit Kerja pada SKPD tidak dapat menganggarkan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan apabila sudah dianggarkan oleh Unit Kerja yang lain;
  - b) Bila suatu kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan pelaksanaannya melibatkan banyak Unit Kerja pada suatu SKPD, maka penganggarannya hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang paling mendekati atas kegiatan tersebut.

2. Format Formulir RKA-SKPD


a. Sampul Depan RKA-SKPD

 <b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b>	
<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)</b>	
<b>TAHUN ANGGARAN 2016</b>	
<b>Urusan Pemerintahan</b>	: X. XX .....
<b>Organisasi</b>	: X. XX. XX .....
<b>Pengguna Anggaran :</b> a. Nama b. NIP c. Jabatan	: ..... : ..... : .....
<b>K O D E</b>	<b>NAMA FORMULIR</b>
<b>RKA-SKPD</b>	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat
<b>RKA-SKPD 1</b>	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>RKA-SKPD 2.1</b>	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>RKA-SKPD 2.2</b>	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>RKA-SKPD 2.2.1</b>	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>RKA-SKPD 3.1</b>	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
<b>RKA-SKPD 3.1</b>	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- b. Formulir RKA-SKPD (Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah)

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		
<b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016</b>		
Urusan Pemerintahan : X. XX .....		
Organisasi : X. XX. XX .....		
<b>Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
4	<b>PENDAPATAN</b>	
5	<b>BELANJA</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT) :</b>	
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	
Kallanda, ..... <b>KEPALA SKPD</b>  _____ NIP .....		

c. Formulir RKA-SKPD 1 (Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah)

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Urusan Pemerintahan : X. XX .....																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Organisasi : X. XX. XX .....																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RINCIAN PERHITUNGAN</b>			<b>JUMLAH (RP)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2	Volume 3	Satuan 4	Tarif/Harga* 5	6 = 3x5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

d. Formulir RKA-SKPD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah)

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016</b>				
Urusan Pemerintahan : X. XX .....						
Organisasi : X. XX. XX .....						
<b>Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>						
KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2014				TAHUN 2017
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3x4	7
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						
Kallanda, ..... KEPALA .....						
NIP .....						
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2.						
<b>TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>						
No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN		
1						
2						
3						



e. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 (Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah)

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2016</b>	

Urusan Pemerintahan	:	X.XX .....
Organisasi	:	X. XX. X. XX. XX .....
Program	:	X. XX. X. XX. XX. XX .....
Kegiatan	:	X. XX. X. XX. XX. XX. XX .....
Lokasi Kegiatan	:	.....
Jumlah Tahun 2007	:	Rp - (.....)
Jumlah Tahun 2008	:	Rp - (.....)
Jumlah Tahun 2009	:	Rp - (.....)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	
Masukan	:	
Keluaran	:	
Hasil	:	
Kelompok Sasaran	:	

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
		3	4	5	6 = (3x5)

Jumlah Belanja Langsung

Kalianda, .....  
**KEPALA** .....

.....  
 NIP .....

Keterangan :  
 Tanggal Pembahasan :  
 Catatan Hasil Pembahasan :  
 1.  
 2.  
 Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	JABATAN	
1				
2				
Dst				





h. Formulir RKA-SKPD 3.2 (Rincian Pengeluaran Pembiayaan)

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>																																																																																																																
<b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016</b>																																																																																																																
Urusan Pemerintahan : X. XX .....																																																																																																																
Organisasi : X. XX. XX .....																																																																																																																
<b>Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>																																																																																																																
<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>																																																																																																														
1	2	3																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>																																																																																																																
Kalianda, ..... 2016 <b>KEPALA .....</b>  _____ NIP .....																																																																																																																
KETERANGAN : TANGGAL PEMBAHASAN : CATATAN HASIL PEMBAHASAN : 1. 2. dst.																																																																																																																
<b>TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>																																																																																																																
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>																																																																																																												
1 2 dst																																																																																																																

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
**KHERLANI**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : 42 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 10 November 2015

KODE DAN KLASIFIKASI  
 URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, DAN UNIT KERJA  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
1	<b>Urusan Wajib</b>
1.01	<b>Pendidikan</b>
1.01.1	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>
1.01.1.1	DINAS PENDIDIKAN
1.02	<b>Kesehatan</b>
1.02.1	<b>DINAS KESEHATAN</b>
1.02.1.1	DINAS KESEHATAN
1.02.2	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HI. BOB BAZAR, SKM</b>
1.02.2.1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM
1.03	<b>Pekerjaan Umum</b>
1.03.1	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>
1.03.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.06	<b>Perencanaan Pembangunan</b>
1.06.1	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
1.06.1.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.07	<b>Perhubungan</b>
1.07.1	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
1.07.1.1	DINAS PERHUBUNGAN
1.08	<b>Lingkungan Hidup</b>
1.08.1	<b>BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH</b>
1.08.1.1	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.08.2	<b>DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN</b>
1.08.2.1	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.10	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>
1.10.1	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
1.10.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.12	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>
1.12.1	<b>BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>
1.12.1.1	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.13	<b>Sosial</b>
1.13.1	<b>DINAS SOSIAL</b>
1.13.1.1	DINAS SOSIAL
1.14	<b>Tenaga Kerja</b>
1.14.1	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
1.14.1.1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.15	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>
1.15.1	<b>DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
1.15.1.1	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.16	<b>Penanaman Modal</b>
1.16.1	<b>BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU</b>
1.16.1.1	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1.18	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>
1.18.1	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>
1.18.1.1	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.19	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>
1.19.1	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
1.19.1.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.19.2	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
1.19.2.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19.3	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
1.19.3.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.20	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian</b>
1.20.1	<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>
1.20.1.1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.20.2	<b>BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>
1.20.2.1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KODING	URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1.20.3	<b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN</b>
1.20.3.1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
1.20.4	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
1.20.4.1	SEKRETARIAT DPRD
1.20.5	<b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>
1.20.5.1	DINAS PENDAPATAN DAERAH
1.20.6	<b>INSPEKTORAT</b>
1.20.6.1	INSPEKTORAT
1.20.7	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
1.20.7.1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.7.2	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1.20.8	<b>BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN</b>
1.20.8.1	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
1.20.9	<b>SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI</b>
1.20.9.1	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
1.20.10	<b>KECAMATAN NATAR</b>
1.20.10.1	KECAMATAN NATAR
1.20.11	<b>KECAMATAN TANJUNG BINTANG</b>
1.20.11.1	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
1.20.12	<b>KECAMATAN KALIANDA</b>
1.20.12.1	KECAMATAN KALIANDA
1.20.13	<b>KECAMATAN SIDOMULYO</b>
1.20.13.1	KECAMATAN SIDOMULYO
1.20.14	<b>KECAMATAN KATIBUNG</b>
1.20.14.1	KECAMATAN KATIBUNG
1.20.15	<b>KECAMATAN PENENGAHAN</b>
1.20.15.1	KECAMATAN PENENGAHAN
1.20.16	<b>KECAMATAN PALAS</b>
1.20.16.1	KECAMATAN PALAS
1.20.17	<b>KECAMATAN JATI AGUNG</b>
1.20.17.1	KECAMATAN JATI AGUNG
1.20.18	<b>KECAMATAN KETAPANG</b>
1.20.18.1	KECAMATAN KETAPANG
1.20.19	<b>KECAMATAN SRAGI</b>
1.20.19.1	KECAMATAN SRAGI
1.20.20	<b>KECAMATAN RAJABASA</b>
1.20.20.1	KECAMATAN RAJABASA
1.20.21	<b>KECAMATAN CANDIPURO</b>
1.20.21.1	KECAMATAN CANDIPURO
1.20.22	<b>KECAMATAN MERBAU MATARAM</b>
1.20.22.1	KECAMATAN MERBAU MATARAM
1.20.23	<b>KECAMATAN BAKAUHENI</b>
1.20.23.1	KECAMATAN BAKAUHENI
1.20.24	<b>KECAMATAN TANJUNG SARI</b>
1.20.24.1	KECAMATAN TANJUNG SARI
1.20.25	<b>KECAMATAN WAY SULAN</b>
1.20.25.1	KECAMATAN WAY SULAN
1.20.26	<b>KECAMATAN WAY PANJI</b>
1.20.26.1	KECAMATAN WAY PANJI
1.21	<b>Ketahanan Pangan</b>
1.21.1	<b>BADAN KETAHANAN PANGAN</b>
1.21.1.1	BADAN KETAHANAN PANGAN
1.22	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
1.22.1	<b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>
1.22.1.1	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.25	<b>Komunikasi dan Informatika</b>
1.25.1	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
1.25.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.26	<b>Perpustakaan</b>
1.26.1	<b>BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>
1.26.1.1	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	<b>Urusan Pilihan</b>
2.01	<b>Pertanian</b>
2.01.1	<b>DINAS PERKEBUNAN</b>
2.01.1.1	DINAS PERKEBUNAN
2.01.2	<b>DINAS PETERNAKAN</b>
2.01.2.1	DINAS PETERNAKAN
2.01.3	<b>DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
2.01.3.1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.01.4	<b>BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN</b>
2.01.4.1	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KODU REKONSILING	UNITAS PEMERINTAH DAERAH
2.02	<b>Kehutanan</b>
2.02.1	<b>DINAS KEHUTANAN</b>
2.02.1.1	<b>DINAS KEHUTANAN</b>
2.03	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>
2.03.1	<b>DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>
2.03.1.1	<b>DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>
2.04	<b>Pariwisata</b>
2.04.1	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>
2.04.1.1	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>
2.05	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
2.05.1	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
2.05.1.1	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
2.06	<b>Perdagangan</b>
2.06.1	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR</b>
2.06.1.1	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR</b>

PJ. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



**KHERLANI**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : A2 TAHUN 2015  
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2015

SUSUNAN AKUN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

URUTAN	URUTAN
1	Aset
2	Kewajiban
3	Ekuitas Dana
4	Pendapatan
5	Belanja
6	Pembiayaan
7	Non Anggaran
8	Pendapatan-LO
9	Beban-LO

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KHERLANI



**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR :** \_\_\_\_\_ **TAHUN 2015**  
**TANGGAL :** \_\_\_\_\_ **2015**

**KODE PROGRAM DAN KEGIATAN STANDAR**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b>	
<b>1.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat
1.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.01 . 01 . 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1.01 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik
1.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor
1.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman
1.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01 . 01 . 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan
1.01 . 01 . 21	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
1.01 . 01 . 22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah
1.01 . 01 . 23	Penyediaan Jasa Sewa Gedung
1.01 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik
1.01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan
1.01 . 01 . 26	Penatausahaan kearsipan
<b>1.01 . 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1.01 . 02 . 01	Pembangunan rumah jabatan
1.01 . 02 . 02	Pembangunan rumah dinas
1.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor
1.01 . 02 . 04	Pengadaan mobil jabatan
1.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.01 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
1.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeulair
1.01 . 02 . 11	Pengadaan Tanah
1.01 . 02 . 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.01 . 02 . 13	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.01 . 02 . 14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 02 . 15	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.01 . 02 . 16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01 . 02 . 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan
1.01 . 02 . 18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.01 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
1.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
1.01 . 02 . 22	Operasional KORSIK dan Pemeliharaan Alat
1.01 . 02 . 23	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
1.01 . 02 . 24	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
1.01 . 02 . 25	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.01 . 02 . 26	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
1.01 . 02 . 27	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1.01 . 02 . 28	Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Dinas
1.01 . 02 . 29	Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi
1.01 . 02 . 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Bagian Umum)
1.01 . 02 . 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Bagian Umum)
1.01 . 02 . 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Bagian Umum)
1.01 . 02 . 33	Penyediaan Jasa/Sewa Kantor
1.01 . 02 . 34	Pengamanan Aset Tanah
1.01 . 02 . 35	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

KODE BUDJET	NAMA PROGRAM DAN TUGAS/URAIAN
1.01 . 02 . 36	Sertifikasi Aset Tanah
1.01 . 02 . 37	Pembangunan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
1.01 . 02 . 38	Pembangunan Instalasi Listrik
1.01 . 02 . 39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon
<b>1.01 . 03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
1.01 . 03 . 01	Pengadaan mesin absensi
1.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.01 . 03 . 04	Pengadaan pakaian KORPRI
1.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.01 . 03 . 06	Operasional PPNS dan Evaluasi Absensi SKPD Kabupaten Lampung Selatan
1.01 . 03 . 07	Pengadaan Pakaian Linmas, Atribut/Perlengkapan
1.01 . 03 . 08	Dokumentasi Administrasi Kepegawaian
<b>1.01 . 04</b>	<b>Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS</b>
1.01 . 04 . 01	Pemulangan pegawai yang pensiun
1.01 . 04 . 02	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
1.01 . 04 . 03	Pemindahan tugas PNS
1.01 . 04 . 04	Pemberian Tali Asih Purna Bhakti PNS
<b>1.01 . 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
1.01 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.01 . 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
1.01 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.01 . 05 . 04	Peningkatan Jiwa Kesamaptaaan Anggota Polisi Pamong Praja
1.01 . 05 . 05	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional
<b>1.01 . 06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
1.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01 . 06 . 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah
1.01 . 06 . 06	Penyusunan dokumen program, kegiatan dan anggaran
<b>1.01 . 07</b>	<b>Program Pengadaan Sarana Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>
1.01 . 07 . 01	Pembuatan Baliho
<b>1.01 . 08</b>	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>
1.01 . 08 . 01	Penyusunan RENSTRA SKPD
1.01 . 08 . 02	Penyusunan RENJA SKPD
1.01 . 08 . 03	Penyusunan RKA-SKPD
1.01 . 08 . 04	Standar Operasional Prosedur
1.01 . 08 . 05	Sistem Pengendalian Intern
1.01 . 08 . 06	Standar Pelayanan Publik

PJ. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KHERLANI

KODE DAN PROGRAM KEGIATAN BERDASARKAN URUSAN  
 PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2016

	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	<b>Urusan Wajib</b>
1.01	<b>Pendidikan</b>
1.01 . 15	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>
1.01 . 15 . 01	Pembangunan Gedung Sekolah
1.01 . 15 . 02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1.01 . 15 . 03	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
1.01 . 15 . 04	Penambahan Ruang Guru Sekolah
1.01 . 15 . 05	Pembangunan Ruang Locker Siswa
1.01 . 15 . 06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.01 . 15 . 07	Pembangunan Sarana dan Prasarana bermain
1.01 . 15 . 08	Pembangunan Ruang Seba Guna/Aula
1.01 . 15 . 09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
1.01 . 15 . 10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.01 . 15 . 11	Pembangunan Ruang Ibadah
1.01 . 15 . 12	Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah
1.01 . 15 . 13	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya
1.01 . 15 . 14	Pembangunan sarana Air Bersih dan Sanitasi
1.01 . 15 . 15	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
1.01 . 15 . 16	Seleksi dan Pengiriman Magang bagi Tenaga Pendidik PAUD
1.01 . 15 . 17	Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.01 . 15 . 18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01 . 15 . 19	Pengadaan Meubellair Sekolah
1.01 . 15 . 20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1.01 . 15 . 21	Pengadaan Alat rumah Tangga Sekolah
1.01 . 15 . 22	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
1.01 . 15 . 23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Sekolah
1.01 . 15 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1.01 . 15 . 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah
1.01 . 15 . 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Guru Sekolah
1.01 . 15 . 27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Locker Siswa
1.01 . 15 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.01 . 15 . 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Bermain
1.01 . 15 . 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Serba Guna/Aula
1.01 . 15 . 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
1.01 . 15 . 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.01 . 15 . 33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Ibadah
1.01 . 15 . 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perpustakaan Sekolah
1.01 . 15 . 35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya
1.01 . 15 . 36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitary
1.01 . 15 . 37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01 . 15 . 38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubellair Sekolah
1.01 . 15 . 39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah
1.01 . 15 . 40	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga Sekolah
1.01 . 15 . 41	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Mobilitas Sekolah
1.01 . 15 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
1.01 . 15 . 43	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1.01 . 15 . 44	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Siswa
1.01 . 15 . 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.01 . 15 . 46	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
1.01 . 15 . 47	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Locker Siswa
1.01 . 15 . 48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olah Raga
1.01 . 15 . 49	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Bermain
1.01 . 15 . 50	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Seba Guna/Aula
1.01 . 15 . 51	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
1.01 . 15 . 52	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.01 . 15 . 53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah
1.01 . 15 . 54	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1.01 . 15 . 55	Rehabilitasi Sedang/Berat jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya
1.01 . 15 . 56	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary
1.01 . 15 . 57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
1.01 . 15 . 58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 15 . 60	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 15 . 61	Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini
1.01 . 15 . 62	Pengembangan kurikulum bahan ajar dan modal pembelajaran pendidikan anak usia dini

1.01 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini
1.01 . 15 . 64	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini
1.01 . 15 . 65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
1.01 . 15 . 66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01 . 15 . 67	Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)
1.01 . 15 . 68	Bimbingan Teknis Tenaga Pendidik PAUD dan Sosialisasi Kurikulum PAUD
1.01 . 15 . 69	Bimbingan Teknis Pengelola dan tenaga Pendidik PAUD dan Sosialisasi Kurikulum PAUD dan TK
1.01 . 15 . 70	Monitoring Pemberian Bantuan untuk Pendidik dan Pengembang Anak Usia Dini (PPAUD), Kegiatan Bunda PAUD dan Polisi Cilik
1.01 . 15 . 71	Penilaian Tenaga Pendidik PAUD Teladan dan Lomba Kreatifitas Siswa PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD
1.01 . 15 . 72	Pembinaan dan Monitoring PAUD dalam rangka pengembangan Program Non Formal dan Informal
1.01 . 15 . 73	Monitoring dan Evaluasi Dana Rintisan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Pendidikan Siswa PAUD
1.01 . 15 . 74	Beasiswa S1 Tenaga Pendidik PAUD
1.01 . 15 . 75	Lomba dan Penilaian Gugus PAUD
1.01 . 15 . 76	Magang PAUD
1.01 . 15 . 77	Pelatihan Data Pokok Pendidikan PAUD (DAPODIK PAUD) Online
1.01 . 15 . 78	Apresiasi Bunda PAUD
1.01 . 15 . 79	Pengembangan Kreatifitas Anak Melalui Rumah Pintar
1.01 . 15 . 80	Penyediaan kebutuhan alat permainan edukatif (APE) Paud
1.01 . 16 . 01	Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 16 . 02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
1.01 . 16 . 03	Pembangunan ruang kelas sekolah
1.01 . 16 . 04	Penambahan ruang guru sekolah
1.01 . 16 . 05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1.01 . 16 . 06	Pembangunan ruang locker siswa
1.01 . 16 . 07	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.01 . 16 . 08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01 . 16 . 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 16 . 10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1.01 . 16 . 11	Pembangunan ruang ibadah
1.01 . 16 . 12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1.01 . 16 . 13	Pembangunan jaringan instalasi listrik
1.01 . 16 . 14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01 . 16 . 16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1.01 . 16 . 17	Pengadaan pakaian olahraga
1.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa
1.01 . 16 . 19	Pengadaan meubeleur sekolah
1.01 . 16 . 20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 16 . 21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1.01 . 16 . 22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1.01 . 16 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1.01 . 16 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01 . 16 . 25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01 . 16 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1.01 . 16 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1.01 . 16 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1.01 . 16 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
1.01 . 16 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1.01 . 16 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 16 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1.01 . 16 . 33	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1.01 . 16 . 34	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1.01 . 16 . 35	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01 . 16 . 36	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 16 . 37	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 16 . 38	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur sekolah
1.01 . 16 . 39	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1.01 . 16 . 40	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1.01 . 16 . 41	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1.01 . 16 . 42	Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah
1.01 . 16 . 43	Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01 . 16 . 44	Rehabilitas sedang/berat asrama siswa
1.01 . 16 . 45	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01 . 16 . 46	Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekolah
1.01 . 16 . 47	Rehabilitas sedang/berat ruang locker siswa
1.01 . 16 . 48	Rehabilitas sedang/berat sarana olah raga
1.01 . 16 . 49	Rehabilitas sedang/berat sarana bermain
1.01 . 16 . 50	Rehabilitas sedang/berat ruang serba guna/aula
1.01 . 16 . 51	Rehabilitas sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 16 . 52	Rehabilitas sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1.01 . 16 . 53	Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah
1.01 . 16 . 54	Rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah
1.01 . 16 . 55	Rehabilitas sedang/berat Jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01 . 16 . 56	Rehabilitas sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 16 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01 . 16 . 58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

1.01 . 16 . 59	Pelatihan penyusunan kurikulum
1.01 . 16 . 60	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1.01 . 16 . 61	Pembinaan SMP terbuka
1.01 . 16 . 62	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
1.01 . 16 . 63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS Jenjang SD,MI,SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP
1.01 . 16 . 64	Penyediaan biaya operasional madrasah
1.01 . 16 . 65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
1.01 . 16 . 66	Penyediaan dana pembangunan sekolah untuk SD dan MI dan SMP/MTS
1.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan paket A setara SD
1.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan Paket B setara SMP
1.01 . 16 . 69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) sisatuan pendidikan dasar
1.01 . 16 . 70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
1.01 . 16 . 71	Pembangunan komprehensif teaching and leaning
1.01 . 16 . 72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 16 . 73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi dasar
1.01 . 16 . 74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
1.01 . 16 . 75	Penyediaan beasiswa transisi
1.01 . 16 . 76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1.01 . 16 . 77	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD, SMP
1.01 . 16 . 78	Monitoring evaluasi dan pelaporan
1.01 . 16 . 79	Lanjutan pembangunan SDN beringin kencana
1.01 . 16 . 80	Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan melalui DAK
1.01 . 16 . 81	Pengadaan alat peraga fisika
1.01 . 16 . 82	Survey Data teknis SD dan SMP
1.01 . 16 . 83	Pembinaan Sekolah Unggulan
1.01 . 16 . 84	Lomba kreativitas dan sains sekolah dasar
1.01 . 16 . 85	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran TK/SD
1.01 . 16 . 86	Sosialisasi dan Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah SD, SMP
1.01 . 16 . 87	Dana Operasional dan Pemeliharaan SLB Sidomulyo
1.01 . 16 . 88	Pendamping Sekolah Inklusi
1.01 . 16 . 89	Pembinaan dan Monitoring UKS
1.01 . 16 . 90	Persiapan Pemenang Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke tingkat Nasional
1.01 . 16 . 91	Sekolah Unggulan SD/SMP
1.01 . 16 . 92	Olimpiade Sains SD ( OSN SD ) dan Olimpiade Sains SMP ( OSN SMP )
1.01 . 16 . 93	Pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas
1.01 . 16 . 94	Bimbingan teknis kurikulum pendidikan dasar
1.01 . 16 . 95	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional
1.01 . 16 . 96	Monitoring Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) / Program Indonesia Pintar (PIP)
1.01 . 16 . 97	Sosialisasi dan Monitoring BOS SD, SMP Negeri
1.01 . 16 . 98	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (UASBN SD)
1.01 . 16 . 99	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMP dan Monitoring
1.01 . 16 . 100	Bimtek Data pokok Pendidikan Dasar (DAPODIKDas)
1.01 . 16 . 101	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal
<b>1.01 . 17</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>
1.01 . 17 . 01	Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 17 . 02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
1.01 . 17 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah
1.01 . 17 . 04	Penambahan ruang guru sekolah
1.01 . 17 . 05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1.01 . 17 . 06	Pembangunan ruang locker siswa
1.01 . 17 . 07	Pembangunan sarana dan prasarana oleh raga
1.01 . 17 . 08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01 . 17 . 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 17 . 10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1.01 . 17 . 11	Pembangunan ruang ibadah
1.01 . 17 . 12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1.01 . 17 . 13	Pembangunan jaringan instalasi listrik
1.01 . 17 . 14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 17 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01 . 17 . 16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1.01 . 17 . 17	Pengadaan pakaian olah raga
1.01 . 17 . 18	Pengadaan alat praktik dan alat praga
1.01 . 17 . 19	Pengadaan meubelur sekolah
1.01 . 17 . 20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 17 . 21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1.01 . 17 . 22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1.01 . 17 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1.01 . 17 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01 . 17 . 25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01 . 17 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1.01 . 17 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1.01 . 17 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1.01 . 17 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
1.01 . 17 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1.01 . 17 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 17 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah

1.01 . 17 . 33	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1.01 . 17 . 34	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1.01 . 17 . 35	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01 . 17 . 36	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 17 . 37	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 17 . 38	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur sekolah
1.01 . 17 . 39	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1.01 . 17 . 40	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1.01 . 17 . 41	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1.01 . 17 . 42	Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah
1.01 . 17 . 43	Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01 . 17 . 44	Rehabilitas sedang/berat asrama siswa
1.01 . 17 . 45	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01 . 17 . 46	Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekolah
1.01 . 17 . 47	Rehabilitas sedang/berat ruang locker siswa
1.01 . 17 . 48	Rehabilitas sedang/berat sarana olah raga
1.01 . 17 . 49	Rehabilitas sedang/berat sarana bermain
1.01 . 17 . 50	Rehabilitas sedang/berat ruang serba guna/aula
1.01 . 17 . 51	Rehabilitas sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 17 . 52	Rehabilitas sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1.01 . 17 . 53	Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah
1.01 . 17 . 54	Rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah
1.01 . 17 . 55	Rehabilitas sedang/berat Jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01 . 17 . 56	Rehabilitas sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 17 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01 . 17 . 58	Pelatihan penyusunan kurikulum
1.01 . 17 . 59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1.01 . 17 . 60	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan
1.01 . 17 . 61	Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMA/SMK Negeri
1.01 . 17 . 62	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
1.01 . 17 . 63	Penyelenggaraan paket C setara SMU
1.01 . 17 . 64	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SMA, SMK
1.01 . 17 . 65	Survey Data teknis SMA dan SMK
1.01 . 17 . 66	Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri
1.01 . 17 . 67	Rehabilitasi SMA, SMK dan Pengadaan Sarana Pendidikan melalui DAK
1.01 . 17 . 68	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
1.01 . 17 . 69	Monitoring evaluasi dan pelaporan
1.01 . 17 . 70	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran SMA, SMK.
1.01 . 17 . 71	Uji kompetensi siswa SMK
1.01 . 17 . 72	Pelaksanaan OSN SMA TK Kabupaten dan Pengiriman Peserta ke Propinsi
1.01 . 17 . 73	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi KTSP dan SNP SMA, SMK
1.01 . 17 . 74	Peningkatan Kompetensi Guru SMK bekerjasama dengan DUDI
1.01 . 17 . 75	Belanja Operasional Manajemen Mutu ( BOMM ) SMA/SMK Negeri dan Swasta
1.01 . 17 . 76	Pengembangan Sekolah Standart Nasional ( SSN ) SMA/SMK
1.01 . 17 . 77	Pengembangan Sekolah Standart Nasional RSB1 SMA/SMK
1.01 . 17 . 78	Bimtek Kurikulum Nasional SMA dan SMK
1.01 . 17 . 79	Operasional Sekolah Persiapan Negeri
1.01 . 17 . 80	Dana Sharing Pendidikan bagi siswa/siswi SMK Unggulan dan Terpadu di Negara Bumi Ilir Kabupaten Lampung Tengah
1.01 . 17 . 81	Lomba Keterampilan Siswa SMK
1.01 . 17 . 82	Festifal lomba seni siswa nasional SMA, SMK
1.01 . 17 . 83	Sharing Pendidikan Bagi Siswa SMK Unggulan dan Terpadu (Beasiswa)
1.01 . 17 . 84	Kewirausahaan SMK Negeri
1.01 . 17 . 85	Sosialisasi bantuan siswa miskin (BSM) SMA/SMK
1.01 . 17 . 86	Pembinaan dan Monitoring ijin operasional SMA dan SMK
1.01 . 17 . 87	Akademi Komunitas Negeri (AKN)
1.01 . 17 . 88	Penyelenggaraan UAS SMA, SMK dan Uji Kompetensi Siswa SMK
1.01 . 17 . 89	Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri
1.01 . 17 . 90	Penyaluran Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) SMA, SMK dan Monitoring
1.01 . 17 . 91	Lomba Pidato Bahasa Inggris
1.01 . 17 . 92	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan Pengadaan sarana pendidikan
1.01 . 17 . 93	Pengadaan alat peraga fisika
<b>1.01 . 18</b>	<b>Program Pendidikan non Formal</b>
1.01 . 18 . 01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
1.01 . 18 . 02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
1.01 . 18 . 03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01 . 18 . 04	Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01 . 18 . 05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.01 . 18 . 06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
1.01 . 18 . 07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
1.01 . 18 . 08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
1.01 . 18 . 09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1.01 . 18 . 10	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
1.01 . 18 . 11	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal
1.01 . 18 . 12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
1.01 . 18 . 13	Monitoring evaluasi dan pelaporan
1.01 . 18 . 14	Kegiatan Hardiknas dan olah raga dalam rangka Hari Pendidikan Nasional

1.01 . 18 . 15	Pemberantasan Buta Aksara (Keaksaraan fungsional) dan bantuan operasional PNF (Kegiatan Siger Mas)
1.01 . 18 . 16	Pembinaan sekolah peduli narkoba
1.01 . 18 . 17	Penyelenggaraan pesantren kilat
1.01 . 18 . 18	Bimtek penilik ee-Lampung
1.01 . 18 . 19	Kegiatan prestasi olahraga tingkat pelajar
1.01 . 18 . 20	Lomba kompetensi mata pelajaran SD/MI
1.01 . 18 . 21	Pelaksanaan Paskibraka
1.01 . 18 . 22	Bimbingan Teknis Pengelola dan Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Bimtek Pengelola dan Instruktur Lembaga Kursus dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan PKBM
1.01 . 18 . 23	Pembinaan Warga belajar
1.01 . 18 . 24	Lomba dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara
1.01 . 18 . 25	Pembinaan dan Monitoring PKBM Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam rangka pengembangan Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 18 . 26	Operasional Sekretariat untuk Bantuan Insentif Tutor Paket dan Ketua/Pengelola PKBM
1.01 . 18 . 27	Penguatan Kapasitas Kelembagaan PKBM
1.01 . 18 . 28	Jambore PTK-PNFI
1.01 . 18 . 29	Operasional penilik PNF dan Tenaga pendidik PAUD
1.01 . 18 . 30	Operasional dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal
1.01 . 18 . 31	Sosialisasi Bahaya Perdagangan Orang dan Pengarusutamaan Gender dan Jambore PTK PNFI
1.01 . 18 . 32	Sosialisasi Perlindungan Anak
1.01 . 18 . 33	Perlombaan Drumband pelajar dan studi wisata pelajar
1.01 . 18 . 34	Penyelenggaraan ujian Nasional Paket A, B, C dan Monitoring
1.01 . 18 . 35	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C dan Monitoring
<b>1.01 . 19</b>	<b>Program Pendidikan Luar Biasa</b>
1.01 . 19 . 01	Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 19 . 02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
1.01 . 19 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah
1.01 . 19 . 04	Penambahan ruang guru sekolah
1.01 . 19 . 05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1.01 . 19 . 06	Pembangunan ruang locker siswa
1.01 . 19 . 07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.01 . 19 . 08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01 . 19 . 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 19 . 10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1.01 . 19 . 11	Pembangunan ruang ibadah
1.01 . 19 . 12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1.01 . 19 . 13	Pembangunan jaringan instalasi listrik
1.01 . 19 . 14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 19 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01 . 19 . 16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1.01 . 19 . 17	Pengadaan pakaian olah raga
1.01 . 19 . 18	Pengadaan alat praktik dan alat praga
1.01 . 19 . 19	Pengadaan meubelair sekolah
1.01 . 19 . 20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 19 . 21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1.01 . 19 . 22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1.01 . 19 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1.01 . 19 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01 . 19 . 25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01 . 19 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1.01 . 19 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1.01 . 19 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1.01 . 19 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1.01 . 19 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 19 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1.01 . 19 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1.01 . 19 . 33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1.01 . 19 . 34	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01 . 19 . 35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 19 . 36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 19 . 37	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1.01 . 19 . 38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1.01 . 19 . 39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1.01 . 19 . 40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1.01 . 19 . 41	Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah
1.01 . 19 . 42	Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01 . 19 . 43	Rehabilitas sedang/berat asrama siswa
1.01 . 19 . 44	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01 . 19 . 45	Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekolah
1.01 . 19 . 46	Rehabilitas sedang/berat ruang locker siswa
1.01 . 19 . 47	Rehabilitas sedang/berat sarana olah raga
1.01 . 19 . 48	Rehabilitas sedang/berat sarana bermain
1.01 . 19 . 49	Rehabilitas sedang/berat ruang serba guna/aula
1.01 . 19 . 50	Rehabilitas sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 19 . 51	Rehabilitas sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1.01 . 19 . 52	Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah
1.01 . 19 . 53	Rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah
1.01 . 19 . 54	Rehabilitas sedang/berat Jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

1.01 . 19 . 55	Rehabilitas sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 19 . 56	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01 . 19 . 57	Pelatihan Penyusunan kurikulum
1.01 . 19 . 58	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1.01 . 19 . 59	Monitoring evaluasi dan pelaporan
1.01 . 19 . 60	Dst...
<b>1.01 . 20</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</b>
1.01 . 20 . 01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01 . 20 . 02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 20 . 03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1.01 . 20 . 04	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
1.01 . 20 . 05	Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)
1.01 . 20 . 06	Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)
1.01 . 20 . 07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (S1 PGSD)
1.01 . 20 . 08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 20 . 09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
1.01 . 20 . 11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 20 . 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01 . 20 . 13	Pemilihan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru berprestasi dan Berdedikasi
1.01 . 20 . 14	Pembinaan sekolah standar nasional (SSN)
1.01 . 20 . 15	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (penyetaraan S1 PGSD)
1.01 . 20 . 16	Bimbingan Teknis Tenaga Administrasi dan Kepala Sekolah
1.01 . 20 . 17	Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru berprestasi dan berdedikasi
1.01 . 20 . 18	Seleksi Guru rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI)
1.01 . 20 . 19	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
1.01 . 20 . 20	Bimtek Tenaga Administrasi Sekolah
1.01 . 20 . 21	Bimtek Guru Agama dan Bahasa Lampung
1.01 . 20 . 22	Monitoring Pelaksanaan sertifikasi
1.01 . 20 . 23	Program S1 guru dalam jabatan (PPKHB)
1.01 . 20 . 24	Sosialisasi permendiknas tentang juknis pelaksanaan jabatan fungsional dan angka kredit
1.01 . 20 . 25	Penilaian, penetapan angka kredit PNS fungsional
1.01 . 20 . 26	Data base kepegawaian tenaga pendidik
1.01 . 20 . 27	Administrasi Tim Proses Pemberian Tambahan Penghasilan Guru
1.01 . 20 . 28	Monitoring Guru Honor Murni (GHM)
<b>1.01 . 21</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>
1.01 . 21 . 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
1.01 . 21 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca
1.01 . 21 . 03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.01 . 21 . 04	Pelaksanaan koordianasi pengembangan perpustakaan
1.01 . 21 . 05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
1.01 . 21 . 06	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
1.01 . 21 . 07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
1.01 . 21 . 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1.01 . 21 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1.01 . 21 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01 . 21 . 11	Dst...
<b>1.01 . 22</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>
1.01 . 22 . 01	Pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan
1.01 . 22 . 02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
1.01 . 22 . 03	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dan dekonsentrasi dan dana pembantuan
1.01 . 22 . 04	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
1.01 . 22 . 05	Pembinaan Dewan Pendidikan
1.01 . 22 . 06	Pembinaan Komite Sekolah
1.01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan/ICT
1.01 . 22 . 08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01 . 22 . 10	Peningkatan administrasi perkantoran
1.01 . 22 . 11	Pendataan dan penyusunan profil pendidikan (Padati WEB) dan SIM NUPTK
1.01 . 22 . 12	Penyebarluasan informasi dan sosialisasi pendidikan sistem jaringan komputer/internet
1.01 . 22 . 13	Ujian akhir sekolah SMA/MA/SMK dan monitoring SMP/SMA/MA/SMK
1.01 . 22 . 14	Penyusunan LAKIP dan LKPJ
1.01 . 22 . 22	Penyelenggaraan ujian Paket A dan B dan Monitoring
1.01 . 22 . 23	Penyelenggaraan ujian paket C dan monitoring
1.01 . 22 . 24	Updating Penyusunan Profil Pendidikan
1.01 . 22 . 25	PAKEM (Pendidikan Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan)
1.01 . 22 . 26	Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( NUPTK )
1.01 . 22 . 27	Penilaian Kinerja Sekolah
1.01 . 22 . 28	Bimtek Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Teknologi Pendidikan ( ICT )
1.01 . 22 . 29	Operasional Dewan Pendidikan



1.01 . 22 . 30	Operasional Pengawas Sekolah
1.01 . 22 . 31	Operasional Sekolah TK, SDLB, SMP
1.01 . 22 . 32	Operasional PGRI Kabupaten Lampung Selatan
1.01 . 22 . 33	Operasional MKSS SMP/SMA/SMK ( 3 MKSS )
1.01 . 22 . 34	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
1.01 . 22 . 35	Operasional UPTD dan Operasional Pengawas Sekolah
1.01 . 22 . 36	Publikasi Kinerja Pendidikan
1.01 . 22 . 37	Publikasi Kinerja Pendidikan ( Stand Pendidikan dalam Rangka Pameran Pembangunan tingkat Propinsi Lampung )
1.01 . 22 . 38	Pembuatan Visualisasi Pembangunan Informasi Publik
1.01 . 22 . 39	Pembuatan Website Dinas Pendidikan
1.01 . 22 . 40	Penyusunan Data Capaian sistem informasi dan evaluasi
<b>1.01 . 23</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan</b>
1.01 . 23 . 01	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penambahan RKB SD/MJI, SMP, SMA dan meubelair
1.01 . 23 . 02	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penambahan RKB SD/MI, SMP
1.01 . 23 . 03	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Rajabasa
1.01 . 23 . 04	Pengadaan Meubelair Sekolah Luar Biasa (SDLB) Bumi Daya Kec. Sidomulyo (Dana Pendamping)
1.01 . 23 . 05	Unit Sekolah Baru (USB) SDN Gunung Terang Kecamatan Kalianda
1.01 . 23 . 06	Penyediaan Alat Permainan Eduktatif (APE) untuk Lembaga Formal dan Informal
1.01 . 23 . 07	Pengadaan Sarana Teknik Informasi Komunikasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
1.01 . 23 . 08	Pengadaan Meubelair
1.01 . 23 . 09	Kegiatan dana penyesuaian
1.01 . 23 . 10	Rehabilitasi Gedung Taman Kanak-Kanak
1.01 . 23 . 11	Pembangunan Sarana Pendidikan ( DID )
1.01 . 23 . 12	Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan melalui DAK
1.01 . 23 . 13	Dana sharing SMA Al Kautsar
1.01 . 23 . 14	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SMA, SMK
1.01 . 23 . 15	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SMK
1.01 . 23 . 16	Pembuatan data inventarisasi teknis SD dan SMP
1.01 . 23 . 17	Pembuatan data inventarisasi teknis SD wilayah II
1.01 . 23 . 18	Pembuatan data inventarisasi teknis SMP wilayah I
1.01 . 23 . 19	Pembuatan data inventarisasi teknis SMP wilayah II
1.01 . 23 . 20	Pembuatan data inventarisasi teknis SMA, SMK
1.01 . 23 . 21	Pembuatan data inventarisasi teknis SMK
1.01 . 23 . 22	Pembuatan media pembangunan sekolah
1.01 . 23 . 23	Lanjutan pembangunan SDN beringin kencana
1.01 . 23 . 24	Rehabilitasi SMA, SMK dan Pengadaan Sarana Pendidikan melalui DAK
1.01 . 23 . 25	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD, SMP
1.01 . 23 . 26	Dst...
<b>1.01 . 24</b>	<b>Program Bantuan Operasional Sekolah</b>
1.01 . 24 . 01	Subsidi kegiatan rutin sekolah TK,SMP,SMA,SMK Negeri
1.01 . 24 . 02	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (UASBN SD)
1.01 . 24 . 03	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMP dan Monitoring
1.01 . 24 . 04	Penyelenggaraan UAS SMA/SMK dan Uji Kopetensi Siswa SMK
1.01 . 24 . 05	Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Negeri
1.01 . 24 . 06	Uji Kompetensi Siswa SMK
1.01 . 24 . 07	Monitoring guru honor murni
1.01 . 24 . 08	Monitoring Sekolah Binaan dan Sekolah Standar Nasional, SD, SMP
1.01 . 24 . 09	Rintisan Sekolah Berstandar Internasional ( RSBI ) SMA, SMK
1.01 . 24 . 10	Sekolah Standar Nasional ( SSN ) / Sekolah Model SMA, SMK
1.01 . 24 . 11	Operasional / Dana Khusus Murid Miskin ( BKMM ) SMA dan SMK Negeri
1.01 . 24 . 12	Operasional sekolah TK, SDLB, SMP, SMA, SMK Negeri melalui dana BOSDA
1.01 . 24 . 13	Dst...
1.01 . 25	<b>Program Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK</b>
1.01 . 25 . 01	Pembangunan Ruang Kelas Baru, Unti Gedung Baru dan Pengadaan Meubellair
1.01 . 26	<b>Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SD/SMP/SMA/SMK</b>
1.01 . 26 . 01	Pengadaan Fasilitas Laboratorium Multi Study.
1.02	<b>Kesehatan</b>
<b>1.02 . 15</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>
1.02 . 15 . 01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)
1.02 . 15 . 02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 15 . 03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
1.02 . 15 . 04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1.02 . 15 . 05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 15 . 07	Pembinaan Pengelolaan Obat Poskesdes
1.02 . 15 . 08	Penyebaran Informasi dan Razia Pengamanan Sediaan Farmasi
1.02 . 15 . 09	Penyuluhan Swamedikasi
1.02 . 15 . 10	Pembinaan Bidang Obat dan Kosmetika
1.02 . 15 . 11	Sosialisasi dan Monitoring Penggunaan Obat Rasional
1.02 . 15 . 12	Penyuluhan tentang bahaya obat dan kosmetik palsu

1.02 . 15 . 13	Monitoring penggerak penggunaan obat rasional
1.02 . 15 . 14	Koordinasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
1.02 . 15 . 15	Pendamping Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 15 . 16	Pengadaan Obat-Obatan Essensial
1.02 . 15 . 17	Pengadaan Obat-obatan Penunjang Program Kesehatan
1.02 . 15 . 18	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Obat serta Perbekalan Kesehatan
1.02 . 15 . 19	Pengadaan Obat-Obatan, Reagen dan Alat Penunjang Program Kesehatan
<b>1.02 . 16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>
1.02 . 16 . 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
1.02 . 16 . 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.02 . 16 . 03	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
1.02 . 16 . 04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
1.02 . 16 . 05	Perbaikan gizi masyarakat
1.02 . 16 . 06	Revitalisasi sistem kesehatan
1.02 . 16 . 07	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
1.02 . 16 . 08	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
1.02 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02 . 16 . 10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
1.02 . 16 . 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02 . 16 . 12	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas
1.02 . 16 . 13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1.02 . 16 . 14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 16 . 15	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
1.02 . 16 . 16	Pemulihan Tenaga Kesehatan Teladan (Dokter, Perawat/Bidan, Gizi Kesmas)
1.02 . 16 . 17	Sosialisasi Konsil Kesehatan Masyarakat
1.02 . 16 . 18	Penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) Secara Terpadu
1.02 . 16 . 19	Pertemuan Evaluasi Kinerja Puskesmas
1.02 . 16 . 20	Bhakti Sosial Sunatan Massal Dalam Rangka HKN
1.02 . 16 . 21	Sosialisasi Bahaya Penyakit Kanker
1.02 . 16 . 22	Pemberantasan Penyakit TBC
1.02 . 16 . 23	Penyusunan Profil Kesehatan
1.02 . 16 . 24	Pengembangan sistem informasi kesehatan
1.02 . 16 . 25	Review sistem pencatatan dan pelaporan tingkat desa puskesmas dan Kabupaten
1.02 . 16 . 26	Pelatihan ICD-10 bagi petugas puskesmas di Jakarta
1.02 . 16 . 27	Pemberian Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masy Yg Belum Tercover Asuransi (JAMKESDA)
1.02 . 16 . 28	Pelatihan petugas puskesmas surveilans berbasis masyarakat
1.02 . 16 . 29	Penanggulangan Penyakit Campak (PIN Campak)
1.02 . 16 . 30	Operasional Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat bagi PNS dan Pensiunan
1.02 . 16 . 31	Operasional Pelaksanaan Program JAMKESMAS
1.02 . 16 . 32	Evaluasi Laporan SP2TP Puskesmas Terpadu
1.02 . 16 . 33	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
1.02 . 16 . 34	Evaluasi Kinerja Dan Penyusunan PTP Puskesmas
1.02 . 16 . 35	Penyusunan RanPerda Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
1.02 . 16 . 36	Pelayanan kesehatan penduduk miskin/kurang mampu (JAMKESMAS)
1.02 . 16 . 37	Musrenbang Kesehatan
1.02 . 16 . 39	Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan
1.02 . 16 . 40	Pertemuan dalam rangka peningkatan sumber daya kesehatan dalam rangka penanggulangan krisis akibat bencana
1.02 . 16 . 41	Pertemuan Reaksi Cepat (TRC) dalam penyusunan rencana kontigensi penanggulangan bencana
1.02 . 16 . 42	Sosialisasi petugas kesehatan puskesmas rawan bencana
1.02 . 16 . 43	Pelayanan Kesehatan lansia
1.02 . 16 . 44	Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana
1.02 . 16 . 45	Peningkatan Perencanaan Pendayagunaan SDM
1.02 . 16 . 46	Pelayanan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
1.02 . 16 . 47	Pelayanan Kesehatan pada Daerah Kepulauan dan Desa Tertinggal
1.02 . 16 . 48	Sosialisasi dan Koordinasi Upaya Kesehatan Penunjang
1.02 . 16 . 49	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02 . 16 . 50	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02 . 16 . 51	Peningkatan Manajemen Puskesmas
1.02 . 16 . 52	Upaya Kesehatan Masyarakat pada Situasi Khusus
1.02 . 16 . 53	Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02 . 16 . 54	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan
1.02 . 16 . 55	Koordinasi dan Sosialisasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
<b>1.02 . 17</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>
1.02 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1.02 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.02 . 17 . 03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
1.02 . 17 . 04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
1.02 . 17 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 17 . 06	Peningkatan mutu, Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Makanan dan Minuman
1.02 . 17 . 07	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Kosalkes
1.02 . 17 . 08	Razia Pengamanan sediaan farmasi dan makanan
1.02 . 17 . 09	Dst...
<b>1.02 . 18</b>	<b>Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>
1.02 . 18 . 01	Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat
1.02 . 18 . 02	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia
1.02 . 18 . 03	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri

1.02 . 18 . 04	Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
1.02 . 18 . 05	Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait
1.02 . 18 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 18 . 07	Peningkatan Penyebaran dan pengamanan obat tradisional yang berbahaya bagi masyarakat
1.02 . 18 . 08	Pelatihan petugas puskesmas dan kader TOGA Puskesmas
<b>1.02 . 19</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>
1.02 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (Pajak Rokok)
1.02 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02 . 19 . 03	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
1.02 . 19 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 19 . 05	Peningkatan Mutu Promosi Kesehatan
1.02 . 19 . 06	Pembinaan lomba bidang kesehatan (PSI/GSI, UKBM, P3KSS, UKS, PHBS, Nakerwan)
1.02 . 19 . 07	Pemberdayaan upaya kesehatan bera sumber daya masyarakat (UKBM)
1.02 . 19 . 08	Pemberdayaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)
1.02 . 19 . 09	Sigermas Bidang Kesehatan
1.02 . 19 . 10	Sosialisasi Penerapan PHBS di Sekolah
1.02 . 19 . 11	Fasilitasi Satuan Karya Bhakti Husada (SBH)
1.02 . 19 . 12	Peningkatan SDM Promkes Puskesmas se Kabupaten Lampung Selatan
1.02 . 19 . 13	Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan Poskesdes Desa Siaga
1.02 . 19 . 14	Pelatihan Kader Poskesdes
1.02 . 19 . 15	Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) HIV AIDS
1.02 . 19 . 16	Pengadaan Media Promosi Program Kesehatan (Pajak Rokok)
1.02 . 19 . 17	Penguatan Kinerja Kader Kesehatan
1.02 . 19 . 18	Penyusunan Profil Kesehatan
1.02 . 20	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>
1.02 . 20 . 01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
1.02 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02 . 20 . 03	Penanggulangan kurang energi protein (KEP)
1.02 . 20 . 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1.02 . 20 . 05	Peningkatan gizi lebih
1.02 . 20 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 20 . 07	Peningkatan Gizi Masyarakat
1.02 . 20 . 08	Penyuluhan Tentang Gizi kepada Siswa SD s/d SMA
1.02 . 20 . 09	Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Gizi
1.02 . 20 . 10	Pelayanan Gizi Buruk
1.02 . 20 . 11	Pengembangan Posyandu Peduli TAT (Tumbuh Aktif Tanggap)
1.02 . 20 . 12	Peningkatan Pelayanan Gizi Balita dan Ibu Hamil
1.02 . 20 . 13	Pemberian Suplemen pada Ibu Hamil KEK
1.02 . 20 . 14	Peningkatan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)
1.02 . 20 . 15	Upaya Penurunan Gizi Kurang
1.02 . 20 . 16	Peningkatan Posyandu untuk Tumbuh Kembang Balita dan Remaja Putri
<b>1.02 . 21</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>
1.02 . 21 . 01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1.02 . 21 . 02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02 . 21 . 03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1.02 . 21 . 04	Stimulan Jamban Keluarga Sehat
1.02 . 21 . 05	Perbaikan dan Pengawasan Kualitas Air
1.02 . 21 . 06	Stimulan jamban dan SPAL sehat di Desa Miskin
1.02 . 21 . 07	Pengembangan klinik sanitasi di Puskesmas
1.02 . 21 . 08	Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1.02 . 21 . 09	Advokasi dan Pengembangan Forum Kabupaten dan Kecamatan Sehat
1.02 . 21 . 10	Pengawasan dan Pengembangan Lingkungan Sehat (Pajak Rokok)
1.02 . 21 . 11	Sosialisasi dan Penggalangan Kabupaten Sehat
1.02 . 21 . 12	Dukungan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Bidang Kesehatan
<b>1.02 . 22</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>
1.02 . 22 . 01	Penyuluhan DBD dan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02 . 22 . 02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
1.02 . 22 . 03	Pengadaan vaksin penyakit menular
1.02 . 22 . 04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1.02 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02 . 22 . 06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
1.02 . 22 . 07	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
1.02 . 22 . 08	Peningkatan Imunisasi
1.02 . 22 . 09	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
1.02 . 22 . 10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1.02 . 22 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 22 . 12	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Malaria dan Filariasis
1.02 . 22 . 13	Peningkatan Penanggulangan Penyakit Menular Langaung : TBC - ISPA (Pajak Rokok)
1.02 . 22 . 14	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (DBD, Malaria, Rabies)
1.02 . 22 . 15	Eradikasi Folio
1.02 . 22 . 16	Pengendalian menghadapi pandemi avian influenza Lampung Selatan
1.02 . 22 . 17	Peningkatan pemberantasan Penyakit kusta
1.02 . 22 . 18	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Diare
1.02 . 22 . 19	Peningkatan Pemberantasan Penyakit ISPA
1.02 . 22 . 20	Pemberantasan Penyakit Rabies
1.02 . 22 . 21	Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Kasus Berpotensi KLB
1.02 . 22 . 22	Peningkatan Surveilans Berbasis Masyarakat (Community Base Surveilans)

1.02 . 22 . 23	Peningkatan Pelayanan Imunisasi Bagi Anak Sekolah (BIAS)
1.02 . 22 . 24	Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Bagi Calon Jemaah Haji
1.02 . 22 . 25	Survey SST kelompok resiko tinggi HIV/AIDS
1.02 . 22 . 26	Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS/IMS
1.02 . 22 . 27	Peningkatan Surveilans PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi)
1.02 . 22 . 28	Kampanye Campak dan Polio
1.02 . 22 . 29	Penanggulangan Kasus GHTR
1.02 . 22 . 30	Peningkatan Program Imunisasi Rutin Pada Bayi dan Wanita Usia Subur (Pajak Rokok)
1.02 . 22 . 31	Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)
1.02 . 22 . 32	Penanggulangan Penyakit Diare, Kusta dan Rabies
<b>1.02 . 23</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>
1.02 . 23 . 01	Penyusunan standar kesehatan
1.02 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1.02 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
1.02 . 23 . 04	Penyusunan naskah akademis
1.02 . 23 . 05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
1.02 . 23 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 23 . 07	Peningkatan kinerja Majelis Kesehatan Kabupaten ( MKK )
1.02 . 23 . 08	Pemantapan konsep rancangan Perda, tentang perizinan bidang kesehatan
1.02 . 23 . 09	Perencanaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
1.02 . 23 . 10	Sosialisasi dan Persiapan Akreditasi Puskesmas serta Pendampingan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
<b>1.02 . 24</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>
1.02 . 24 . 01	Pelayanan operasi katarak
1.02 . 24 . 02	Pelayanan kesehatan THT
1.02 . 24 . 03	Pelayanan operasi bibir sumbing
1.02 . 24 . 04	Pelayanan sunatan masal
1.02 . 24 . 05	Penanggulangan ISPA
1.02 . 24 . 06	Penanggulangan penyakit cacangan
1.02 . 24 . 07	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
1.02 . 24 . 08	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
1.02 . 24 . 09	Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu
1.02 . 24 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 24 . 11	Pelayanan kesehatan Komunitas Adat Terpencil
1.02 . 24 . 12	Pelayanan kesehatan keluarga miskin/subsidi Propinsi (Lanjutan)
1.02 . 24 . 13	Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1.02 . 24 . 14	Operasional Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1.02 . 24 . 15	Bantuan Pelayanan Kesehatan Gakin (Subsidi Propinsi)
<b>1.02 . 25</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana</b>
1.02 . 25 . 01	Pembangunan puskesmas
1.02 . 25 . 02	Pembangunan puskesmas pembantu
1.02 . 25 . 03	Pengadaan puskesmas persalinan
1.02 . 25 . 04	Rehabilitasi sedang / berat Puskesmas Induk dan Pembangunan Pagar
1.02 . 25 . 05	Pembangunan Polindes/Poskesdes (Pajak Rokok)
1.02 . 25 . 06	Pembangunan Gedung Laboratorium Puskesmas
1.02 . 25 . 07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK) )
1.02 . 25 . 08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1.02 . 25 . 09	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan
1.02 . 25 . 10	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
1.02 . 25 . 11	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
1.02 . 25 . 12	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap (Pajak Rokok)
1.02 . 25 . 13	Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap (Pajak Rokok)
1.02 . 25 . 14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
1.02 . 25 . 15	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1.02 . 25 . 16	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan
1.02 . 25 . 17	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
1.02 . 25 . 18	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu
1.02 . 25 . 19	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap (Pajak Rokok)
1.02 . 25 . 20	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
1.02 . 25 . 21	Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu (Pajak Rokok)
1.02 . 25 . 22	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan
1.02 . 25 . 23	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 25 . 24	Pembangunan Gedung Obat (DAK)
1.02 . 25 . 25	Pembangunan poskesdes, Pengembangan Puskesmas dan Pustu/DAK
1.02 . 25 . 26	Pembangunan Gedung Laboratorium Puskesmas (DAU)
1.02 . 25 . 27	Pembangunan Gudang Obat Puskesmas (Infrastruktur)
1.02 . 25 . 28	Pembangunan Poskesdes
1.02 . 25 . 29	Pembangunan puskesmas pembantu (Infrastruktur)
1.02 . 25 . 30	Pembangunan Rumah Pelindung Incenerator
1.02 . 25 . 31	Pengadaan Alat-alat Kesehatan
1.02 . 25 . 32	Pembangunan IPAL Puskesmas Rawat Inap
1.02 . 25 . 33	Rehabilitasi rumah dinas paramedis dan pengadaan ambulans (DAK)
1.02 . 25 . 34	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Induk Non Perawatan (DAK)
1.02 . 25 . 35	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Induk Non Perawatan
1.02 . 25 . 36	Pengadaan Ambulans/Pusing Transport (DAK)
<b>1.02 . 26</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit</b>
1.02 . 26 . 01	Pembangunan rumah sakit

1.02 . 26 . 02	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
1.02 . 26 . 03	Pembangunan gudang obat/apotik
1.02 . 26 . 04	Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III )
1.02 . 26 . 05	Pengembangan ruang gawat darurat
1.02 . 26 . 06	Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU
1.02 . 26 . 07	Pengembangan ruang operasi
1.02 . 26 . 08	Pengembangan ruang terapi
1.02 . 26 . 09	Pengembangan ruang isolasi
1.02 . 26 . 10	Pengembangan ruang bersalin
1.02 . 26 . 11	Pengembangan ruang inkubator
1.02 . 26 . 12	Pengembangan ruang bayi
1.02 . 26 . 13	Pengembangan ruang rontgen
1.02 . 26 . 14	Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
1.02 . 26 . 15	Pembangunan kamar jenazah
1.02 . 26 . 16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02 . 26 . 17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit
1.02 . 26 . 18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
1.02 . 26 . 19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.02 . 26 . 20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah
1.02 . 26 . 21	Pengadaan mebelcur rumah sakit
1.02 . 26 . 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
1.02 . 26 . 23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1.02 . 26 . 24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
1.02 . 26 . 25	Pengembangan tipe rumah sakit
1.02 . 26 . 26	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 26 . 27	Pengadaan peralatan kesehatan instalasi gawat darurat (IGD)
1.02 . 26 . 28	Pembangunan UTD RS
1.02 . 26 . 29	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kabupaten Lampung Selatan
1.02 . 26 . 30	Pengadaan Alat-alat UTD Rumah Sakit
1.02 . 26 . 31	Pengadaan peralatan Ponex
1.02 . 26 . 32	Pengadaan pembangunan Gedung Ponex
1.02 . 26 . 33	Pengembangan Ruang IGD Rumah Sakit
1.02 . 26 . 34	Pengembangan Ruang IPAL Rumah Sakit
1.02 . 26 . 35	Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)/DAK
1.02 . 26 . 36	Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan II )/Pendamping
1.02 . 26 . 37	Pembangunan Gedung High Care Unit
1.02 . 26 . 38	Pengembangan Ruang Rawat Inap ( Kelas I, II, III dan VIP )
1.02 . 26 . 39	Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit
1.02 . 26 . 40	Pengembangan ruang rawat inap anak kelas III (DAK)
1.02 . 26 . 41	Pengadaan incenerator (DAK)
1.02 . 26 . 42	Pengembangan ruang rawat inap kelas I
1.02 . 26 . 43	Pembangunan Instalasi Air Bersih Rumah Sakit
1.02 . 26 . 44	Rehabilitasi Ruang Instalasi Farmasi
1.02 . 26 . 45	Pembangunan Ruang Haemodialisa/DAK
<b>1.02 . 27</b>	<b>Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit</b>
1.02 . 27 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02 . 27 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
1.02 . 27 . 03	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
1.02 . 27 . 04	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
1.02 . 27 . 05	Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
1.02 . 27 . 06	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU
1.02 . 27 . 07	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
1.02 . 27 . 08	Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
1.02 . 27 . 09	Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi
1.02 . 27 . 10	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
1.02 . 27 . 11	Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator
1.02 . 27 . 12	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
1.02 . 27 . 13	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen
1.02 . 27 . 14	Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit
1.02 . 27 . 15	Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
1.02 . 27 . 16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02 . 27 . 17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 27 . 18	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
1.02 . 27 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit
1.02 . 27 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
1.02 . 27 . 21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 27 . 22	dst.....
<b>1.02 . 28</b>	<b>Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>
1.02 . 28 . 01	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1.02 . 28 . 02	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
1.02 . 28 . 03	kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
1.02 . 28 . 04	Kemitraan alih teknologi
1.02 . 28 . 05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
1.02 . 28 . 06	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
1.02 . 28 . 07	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
1.02 . 28 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 28 . 09	Health Work Force and Services Projek (HWS)
1.02 . 28 . 10	Community Water Services and Health Project (CWSHP)
1.02 . 28 . 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan

1.02 . 28 . 12	Penyusunan dan Pembahasan Draft Raperda JAMKESDA
1.02 . 28 . 13	Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Masyarakat Hukum Kec. Balikpapan Selatan
1.02 . 28 . 14	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan paramedis
1.02 . 29	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>
1.02 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita
1.02 . 29 . 02	Imunisasi bagi anak balita
1.02 . 29 . 03	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
1.02 . 29 . 04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
1.02 . 29 . 05	Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
1.02 . 29 . 06	Pembangunan panti asuhan
1.02 . 29 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 29 . 08	Lomba Balita Indonesia Tingkat Kabupaten
1.02 . 29 . 09	Pelayanan kesehatan anak dan pembinaan kader
1.02 . 29 . 10	Pengadaan kohort bayi, anak balita, ibu, buku KIA dan formulir MTBS
1.02 . 30	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>
1.02 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan
1.02 . 30 . 02	rekrutmen tenaga perawat kesehatan
1.02 . 30 . 03	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
1.02 . 30 . 04	Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
1.02 . 30 . 05	Pembangunan panti asuhan
1.02 . 30 . 06	Pelayanan kesehatan
1.02 . 30 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 30 . 08	dst.....
1.02 . 31	<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>
1.02 . 31 . 01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
1.02 . 31 . 02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
1.02 . 31 . 03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
1.02 . 31 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 31 . 05	dst.....
1.02 . 32	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>
1.02 . 32 . 01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1.02 . 32 . 02	Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1.02 . 32 . 03	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan (Bidan) dalam Asuhan Persalinan Normal
1.02 . 32 . 04	Sosialisasi perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
1.02 . 32 . 05	Pembahasan kasus kematian ibu dan anak
1.02 . 32 . 06	Evaluasi program kesehatan ibu
1.02 . 32 . 07	Evaluasi program kesehatan anak
1.02 . 32 . 08	Pelayanan kesehatan ibu dan anak (Pajak Rokok)
1.02 . 32 . 09	Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah (UKS)
1.02 . 32 . 10	Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana
1.02 . 32 . 11	Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana, Usia Sekolah dan Lanjut Usia
1.02 . 32 . 12	Deteksi Dini Hipotiroid Kongenital (Pajak Rokok)
1.02 . 32 . 13	Pergerakan Program Distrik Team Problem Solving (DTPS)
1.02 . 33	<b>Program Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)</b>
1.02 . 33 . 01	Pembinaan usaha kesehatan sekolah (dokter kecil)
1.02 . 33 . 02	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan (Lanjutan)
1.02 . 33 . 03	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas UPT & DKK
1.02 . 33 . 04	Pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (Pajak Rokok)
1.02 . 34	<b>Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Kesehatan</b>
1.02 . 34 . 01	Sosialisasi kepegawaian dan operasional tata usaha
1.02 . 34 . 02	Penyusunan dan evaluasi analisis beban kerja
1.02 . 35	<b>Program Peningkatan Pelayanan UPT Balai Laboratorium Kesehatan</b>
1.02 . 35 . 01	Peningkatan pelayanan pemeriksaan kimia kesehatan, kimia klinik dan mikrobiologi
1.02 . 35 . 02	Pelayanan Laboratorium Puskesmas
1.02 . 35 . 03	Pemeriksaan kimia jajanan anak sekolah
1.02 . 36	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit</b>
1.02 . 36 . 01	Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum ( BLU ) RSUD kalianda
1.02 . 36 . 02	Akreditasi Rumah Sakit
1.02 . 36 . 03	Persiapan Pembentukan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Billing System)
1.02 . 36 . 04	Lomba Citra Pelayanan Prima
1.02 . 36 . 05	Monitoring dan Evaluasi BLUD
1.02 . 36 . 06	Pembuatan Sistem Informasi PPK BLUD Berbasis Aplikasi
1.02 . 36 . 07	Monitoring dan Evaluasi BLUD
1.02 . 36 . 08	Evaluasi SPM
1.02 . 37	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan PNS</b>
1.02 . 37 . 01	Pelayanan Kesehatan PNS Melalui ASKES
1.02 . 38	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Rumah Sakit</b>
1.02 . 38 . 01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien
1.02 . 39	<b>Program Jaminan Mutu Pelayanan (Quality Assurance)</b>

1.02 . 39 . 01	·Pembinaan Tenaga Perawat (Paramedis)
1.02 . 39 . 02	Sosialisasi Pembentukan Tim Panitia Mutu Rumah Sakit
1.02 . 39 . 03	Pertemuan dalam Rangka Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan infeksi ( PPI )
1.02 . 39 . 04	Diklat Teknis Perawat
1.02 . 39 . 05	Diklat keperawatan (ICU, PONEK, BTCLS, Perinatologi, Manajemen Bangsal, Manajemen Keperawatan)
<b>1.02 . 40</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Logistik Keperawatan</b>
1.02 . 40 . 01	Pertemuan Manajemen Logistik Keperawatan
<b>1.02 . 41</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>
1.02 . 41 . 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
<b>1.02 . 42</b>	<b>Program Pelayanan Unggulan dalam Rangka Pencapaian MDG'S</b>
1.02 . 42 . 01	Mobile Klinik VCT
1.03	<b>Pekerjaan Umum</b>
1.03 . 15	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>
1.03 . 15 . 01	Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 15 . 02	Survei kantor jalan dan jembatan
1.03 . 15 . 03	Pembangunan Jalan
1.03 . 15 . 04	Perencanaan pembangunan jembatan
1.03 . 15 . 05	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kab. Lampung Selatan
1.03 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 15 . 07	Pembangunan Jalan Dana Penyesuaian (AD HOC)
1.03 . 15 . 08	Pembangunan dan Peningkatan Jalan lingkungan
1.03 . 15 . 09	Pembangunan Jalan Poros Kabupaten Lampung Selatan (PIP)
1.03 . 15 . 10	Pembangunan Jalan (dana stimulus)
1.03 . 15 . 11	Pembangunan Jalan Poros Kabupaten Lampung Selatan (DAK IPD)
1.03 . 15 . 12	Pembangunan Jalan dan Jembatan II
1.03 . 15 . 13	Pembangunan Jalan dan Jembatan III
1.03 . 15 . 14	Pembangunan Transportasi Perdesaan (DAK)
1.03 . 15 . 15	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Wilayah Barat
1.03 . 15 . 16	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Wilayah Tengah
1.03 . 15 . 17	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Wilayah Timur
1.03 . 15 . 18	Peningkatan jalan dan jembatan (dana DAK)
1.03 . 15 . 19	Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan
1.03 . 15 . 20	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah Barat
1.03 . 15 . 21	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah Tengah
1.03 . 15 . 22	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah Timur
1.03 . 16	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>
1.03 . 16 . 01	Perencanaan pembangunan saluran drainase
1.03 . 16 . 02	Survei kantor saluran drainase
1.03 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong
1.03 . 16 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 16 . 05	Dst...
1.03 . 17	<b>Program pembangunan Turap/Talud/Bronjong</b>
1.03 . 17 . 01	Perencanaan turap/tarud bronjong
1.03 . 17 . 02	Survei kemiringan lereng turap
1.03 . 17 . 03	Pembangunan talud
1.03 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 17 . 05	Dst...
1.03 . 18	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>
1.03 . 18 . 01	Perencanaan rehabilitasi pemeliharaan jalan
1.03 . 18 . 02	Perencanaan rehabilitasi pemeliharaan jembatan
1.03 . 18 . 03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan periodik
1.03 . 18 . 04	Rehabilitasi pemeliharaan jembatan
1.03 . 18 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 18 . 06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dana DAK Non-DR
1.03 . 18 . 07	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03 . 18 . 08	Rehabilitasi jalan dana penanganan pasca bencana alam
1.03 . 18 . 09	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03 . 18 . 10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)
1.03 . 19	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong</b>
1.03 . 19 . 01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud,bronjong
1.03 . 19 . 02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 19 . 03	Dst...
1.03 . 20	<b>Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan</b>
1.03 . 20 . 01	Inspeksi kondisi jalan
1.03 . 20 . 02	Inspeksi kondisi jembatan
1.03 . 20 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 20 . 04	Dst...
1.03 . 21	<b>Program tanggap darurat jalan dan jembatan</b>
1.03 . 21 . 01	Rehabilitasi Infrastruktur dalam kondisi tanggap darurat
1.03 . 21 . 02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat

1.03 . 21 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 21 . 04	Dst...
<b>1.03 . 22</b>	<b>Pengendalian Banjir</b>
1.03 . 22 . 01	Penyusunan sistem informasi database jalan
1.03 . 22 . 02	Penyusunan sistem informasi database jembatan
1.03 . 22 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
<b>1.03 . 23</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>
1.03 . 23 . 01	Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan
1.03 . 23 . 02	Pembangunan gedung workshop
1.03 . 23 . 03	Pembangunan laboratorium kebinamargaan
1.03 . 23 . 04	Pengadaan alat-alat berat
1.03 . 23 . 05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1.03 . 23 . 06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1.03 . 23 . 07	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan
1.03 . 23 . 08	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
1.03 . 23 . 09	Rehabilitasi/pemeliharaan Laboratorium kebinamargaan
1.03 . 23 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03 . 23 . 11	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan perlengkapan bengkel
1.03 . 23 . 12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1.03 . 23 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 23 . 14	Dst...
<b>1.03 . 24</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan</b>
1.03 . 24 . 01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03 . 24 . 02	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih, air minum
1.03 . 24 . 03	Perencanaan pembangunan reservoir
1.03 . 24 . 04	Perencanaan pembangunan pintu air
1.03 . 24 . 05	Perencanaan normalisasi saluran sungai
1.03 . 24 . 06	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
1.03 . 24 . 07	Pembangunan reservoir
1.03 . 24 . 08	Pembangunan pintu air
1.03 . 24 . 09	normalisasi sungai dan pengembangan irigasi
1.03 . 24 . 10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.03 . 24 . 11	Rehabilitasi pemeliharaan jaringan air bersih
1.03 . 24 . 12	Rehabilitasi pemeliharaan reservoir
1.03 . 24 . 13	Rehabilitasi pemeliharaan pintu air
1.03 . 24 . 14	Rehabilitasi pemeliharaan normalisasi aliran sungai
1.03 . 24 . 15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
1.03 . 24 . 16	Pemberdayaan petani pemakai air
1.03 . 24 . 17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 24 . 18	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( OP )
1.03 . 24 . 19	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana Loan ADB
1.03 . 24 . 20	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK)
1.03 . 24 . 21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana Hibah
1.03 . 24 . 22	Pembangunan Embung dan Jaringan
1.03 . 24 . 23	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi ( DAU )
1.03 . 24 . 24	Operasional Komisi Irigasi dan Water Resources Data Center (WRDC)
1.03 . 24 . 25	Pemeliharaan jaringan Irigasi
1.03 . 24 . 26	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai (Adhoc)
1.03 . 24 . 27	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03 . 24 . 28	Pengelolaan Sungai dan Irigasi
1.03 . 24 . 29	Pengelolaan Sungai, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1.03 . 24 . 30	Normalisasi saluran dan rawa
1.03 . 24 . 31	Komisi irigasi kabupaten lampung selatan
<b>1.03 . 25</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Dana DAK Non-DR</b>
1.03 . 25 . 01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03 . 25 . 02	Rehabilitasi sarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03 . 25 . 03	Pemeliharaan sarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03 . 25 . 04	Pembangunan sumur-sumur air tanah
1.03 . 25 . 05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
1.03 . 25 . 06	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku dana DAK non DR
1.03 . 25 . 07	Pembangunan sarana dan prasarana air minum IKK
<b>1.03 . 26</b>	<b>Program Partisipasi Masyarakat</b>
1.03 . 26 . 01	Partisipasi Masyarakat
<b>1.03 . 27</b>	<b>Program Penanganan Pasca Bencana Alam</b>
1.03 . 27 . 01	Penanganan Pasca Bencana (dana stimulus)
<b>1.03 . 29</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana Pemerintah Daerah</b>
1.03 . 29 . 01	Pembangunan Prasarana Pemerintah Daerah (DAK)
<b>1.03 . 30</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>
1.03 . 30 . 01	Operasional RIS-PNPM (BOP)
1.03 . 30 . 02	Operasional Pendamping Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ( PPIP )
1.03 . 30 . 03	Operasional Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)



1.03 . 30 . 04	Pembangunan infrastruktur perdesaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (RIS-PNPM) (BOP)
1.03 . 31	<b>Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Daerah Dana DAK non DR</b>
1.03 . 31 . 01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan ( Dana DAK non DR )
1.03 . 33	<b>Program perencanaan tata Ruang</b>
1.03 . 33 . 01	Survey dan Pemetakan
1.03 . 33 . 02	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.03 . 33 . 03	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
1.03 . 33 . 04	Penyusunan Master Plan
1.03 . 33 . 05	Penyusunan Zoning Teks Kecamatan Kalianda dan Natar
1.03 . 33 . 06	Penyusunan kebijakan untuk rencana detail tata ruang
1.03 . 34	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</b>
1.03 . 34 . 01	Penyusunan database dan monitoring pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum
1.03 . 34 . 02	Perencanaan pembangunan bidang bina marga
1.03 . 34 . 03	Perencanaan pembangunan bidang cipta karya
1.03 . 34 . 04	Perencanaan pembangunan bidang pengairan
1.03 . 35	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>
1.03 . 35 . 01	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang
1.03 . 35 . 02	Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis
1.03 . 36	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>
1.03 . 36 . 01	Sistem Pentediaan Air Minum ( SPAM )
1.03 . 36 . 02	Kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)
1.03 . 36 . 03	Inventarisasi Kelayakan Teknis Lokasi DAK Air Minum dan Sanitasi
1.03 . 37	<b>Program Kesehatan Lingkungan Perumahan</b>
1.03 . 37 . 01	Pembangunan Jaringan air bersih/air minum (DAK)
1.03 . 37 . 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman
1.03 . 37 . 03	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah
1.03 . 37 . 04	Pembangunan Prasarana Sanitasi Perumahan dan Permukiman
1.03 . 37 . 05	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
1.03 . 37 . 06	Penata ruang terbuka hijau
1.03 . 37 . 07	Pembangunan Jaringan air bersih/air minum (DAK IPD)
1.03 . 37 . 08	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat (DAK)
1.03 . 37 . 09	Pembangunan Prasarana Sanitasi Perumahan dan Permukiman (DAK)
1.03 . 37 . 10	Pendampingan kegiatan PAMSIMAS Kab. Lampung Selatan
1.03 . 38	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pameran Pembangunan</b>
1.03 . 38 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pameran Pembangunan
1.03 . 39	<b>Program Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan</b>
1.03 . 39 . 01	Survey penyusunan harga satuan upah dan bahan konstruksi
1.03 . 40	<b>Program Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh</b>
1.03 . 40 . 01	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur I
1.03 . 40 . 02	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur
1.03 . 41	<b>Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur</b>
1.03 . 41 . 01	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur
1.03 . 41 . 02	Pembangunan Prasarana Sanitasi dan Permukiman
1.03 . 41 . 03	Pembangunan Gedung Kantor
1.03 . 41 . 04	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
1.03 . 42	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>
1.03 . 42 . 01	Pelatihan Aparatur Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03 . 42 . 02	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis GIS Wilayah Kawasan I (5 Kecamatan)
1.03 . 42 . 03	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis GIS Wilayah Kawasan II (5 Kecamatan)
1.03 . 42 . 04	Pengawasan pemanfaatan ruang
1.03 . 42 . 05	fasilitasi konsultasi publik dan FGD rencana detail tata ruang (RDTR)
1.03 . 43	<b>Program Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga</b>
1.03 . 43 . 01	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.03 . 44	<b>Program Pengendalian Banjir</b>
1.03 . 44 . 01	Pengembangan/pengelolaan daerah rawa dan sungai dalam rangka pengendalian banjir
1.03 . 44 . 02	Normalisasi sungai dan rawa
1.03 . 45	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan SDA lainnya</b>
1.03 . 45 . 01	Pembangunan embung dan jaringan
1.03 . 46	<b>Program pengelolaan ruang terbuka hijau</b>
1.03 . 46 . 01	Rencana penataan ruang terbuka hijau lingkungan strategis
1.03 . 47	<b>Program Pengembangan Perumahan/Permukiman</b>
1.03 . 47 . 01	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK)
1.03 . 47 . 02	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

<b>1.04</b>	<b>Perumahan</b>
<b>1.04 . 15</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>
1.04 . 15 . 01	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
1.04 . 15 . 02	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
1.04 . 15 . 03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
1.04 . 15 . 04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
1.04 . 15 . 05	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
1.04 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1.04 . 15 . 07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
1.04 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04 . 15 . 09	dst...
<b>1.04 . 16</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>
1.04 . 16 . 01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
<b>1.04 . 16 . 02</b>	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
1.04 . 16 . 03	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
1.04 . 16 . 04	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
1.04 . 16 . 05	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hutan berimbang
1.04 . 16 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04 . 16 . 08	Dst...
<b>1.04 . 17</b>	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>
1.04 . 17 . 01	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
1.04 . 17 . 02	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
1.04 . 17 . 03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
1.04 . 17 . 04	Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah
1.04 . 17 . 05	Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
1.04 . 17 . 06	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
1.04 . 17 . 07	Dst...
<b>1.04 . 18</b>	<b>Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial</b>
1.04 . 18 . 01	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
1.04 . 18 . 02	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
1.04 . 18 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04 . 18 . 04	Dst...
<b>1.04 . 19</b>	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>
1.04 . 19 . 01	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 19 . 02	Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 19 . 03	Koordinasi perizinan pemanfaatan gedung
1.04 . 19 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
1.04 . 19 . 05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
1.04 . 19 . 06	Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
1.04 . 19 . 07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 19 . 08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 19 . 09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 19 . 10	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 19 . 11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1.04 . 19 . 12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1.04 . 19 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04 . 19 . 14	Dst...
<b>1.04 . 20</b>	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>
1.04 . 20 . 01	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman
1.04 . 20 . 02	Pengumpulan dan analisis database jumlah jiwa yang meninggal
1.04 . 20 . 03	Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
1.04 . 20 . 04	Koordinasi penataan areal pemakaman
1.04 . 20 . 05	Pemberian Perizinan Pemakaman
1.04 . 20 . 06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
1.04 . 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1.04 . 20 . 08	Monitoring dan evaluasi
1.04 . 20 . 09	Dst...
<b>1.05</b>	<b>Penataan Ruang</b>
<b>1.05 . 15</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>
1.05 . 15 . 01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
1.05 . 15 . 02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
1.05 . 15 . 03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1.05 . 15 . 04	Penyusunan rencana tata ruang wilayah
1.05 . 15 . 05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
1.05 . 15 . 06	Identifikasi kawasan permukiman kumuh di tiap kecamatan
<b>1.05 . 16</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>
1.05 . 16 . 01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1.05 . 16 . 02	Penyusunan , norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang
1.05 . 16 . 03	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.05 . 16 . 04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1.05 . 16 . 05	Survei pemetaan
1.05 . 16 . 06	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
1.05 . 16 . 07	Sosialisasi kebijakan norma, standar prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1.05 . 16 . 08	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1.05 . 16 . 09	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
1.05 . 16 . 10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
1.05 . 17	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>
1.05 . 17 . 01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.05 . 17 . 02	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
1.05 . 17 . 03	Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
1.05 . 17 . 04	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
1.05 . 17 . 05	Pengawasan pemanfaatan ruang
1.05 . 17 . 06	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1.05 . 17 . 07	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05 . 17 . 08	Pembuatan Patok GSB
1.05 . 17 . 09	Monitoring dan Evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang
1.05 . 18	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>
1.05 . 18 . 01	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
1.05 . 18 . 02	Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.05 . 18 . 03	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.05 . 18 . 04	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)
1.05 . 18 . 05	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1.05 . 19	<b>Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup</b>
1.05 . 19 . 01	Pengembangan data informasi lingkungan
1.05 . 20	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>
1.05 . 20 . 01	Pengembangan Tehnologi Pengolahan Persampahan
1.05 . 21	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>
1.05 . 21 . 01	Survey dan Inventarisasi data spasial infrastruktur berbasis GIS di tiap kecamatan
1.06	<b>Perencanaan Pembangunan</b>
1.06 . 15	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>
1.06 . 15 . 01	Pengumpulan, Updeting, analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
1.06 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (IKK)
1.06 . 15 . 03	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan dan pembangunan kawasan rawan bencana
1.06 . 15 . 04	Penyusunan dan data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
1.06 . 15 . 05	Penyusunan profil daerah tertinggal
1.06 . 15 . 06	Penyusunan Data Potensi Daerah
1.06 . 15 . 07	Penyusunan laporan-laporan tahunan Bappeda
1.06 . 15 . 08	Penyusunan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 15 . 09	Pemutakhiran peta administrasi Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 15 . 10	Pengembangan Media Informasi Publik (Website) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 15 . 11	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 15 . 12	Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRE) Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 15 . 13	Penyusunan Profil Data Potensi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 15 . 14	Media Informasi Pembangunan Daerah
1.06 . 15 . 15	Penyusunan Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014
1.06 . 15 . 16	Penyusunan Informasi Pembangunan Kecamatan
1.06 . 15 . 17	Updating Data Spasial Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 15 . 18	Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (Database) Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 15 . 20	Penyusunan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 15 . 21	Penyusunan Buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 15 . 22	Penyusunan Buku Pendapatan Regional Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 15 . 23	Penyusunan Buku data Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 16	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>
1.06 . 16 . 01	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
1.06 . 16 . 02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
1.06 . 16 . 03	Fasilitas kerja sama dengan dunia usaha/lembaga
1.06 . 16 . 04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
1.06 . 16 . 05	Koordinasi dan fasilitasi DAK Bidang Pendidikan, Kesehatan dan KB
1.06 . 16 . 06	Koordinasi dan fasilitasi DAK
1.06 . 16 . 07	Koordinasi dan fasilitasi program kemiskinan (Program pusat dan daerah)
1.06 . 16 . 08	Koordinasi dan evaluasi pasca program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)
1.06 . 16 . 09	Penyusunan Renstra dan RAD KLA Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 16 . 10	Evaluasi Desa Tertinggal
1.06 . 16 . 11	Koordinasi dan Fasilitasi DAK Bidang Kesehatan dan Pendidikan
1.06 . 16 . 12	Koordinasi dan Fasilitasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
1.06 . 16 . 13	Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkeara) Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 16 . 14	Evaluasi Pelaksanaan Tahun II RPJM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015
1.06 . 16 . 15	Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 16 . 16	Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian Pengembangan dan Pendataan
1.06 . 16 . 17	Evaluasi Peruh Waktu RPJMD Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 16 . 18	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

1.06 . 16 . 19	Evaluasi Komoditas Pertanian Dalam Penyusunan Income Usaha Tani di Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 16 . 20	Evaluasi Renja SKPD Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 16 . 21	Koordinasi Kebijakan Pembangunan Daerah
1.06 . 16 . 22	Koordinasi Jaringan Penelitian Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang dan Pendataan
1.06 . 16 . 23	Evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Lampung Selatan
<b>1.06 . 17</b>	<b>Program pengembangan wilayah perbatasan</b>
1.06 . 17 . 01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
1.06 . 17 . 02	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara
1.06 . 17 . 03	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
1.06 . 17 . 04	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
1.06 . 17 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06 . 17 . 06	Dst .....
<b>1.06 . 18</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh</b>
1.06 . 18 . 01	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.06 . 18 . 02	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis
1.06 . 18 . 03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ( Study Kasus 20 Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan )
1.06 . 18 . 04	Kajian Ekonomi, Sosial Budaya dan Kewilayahan Untuk Pembangunan Institut Teknologi Sumatera
<b>1.06 . 19</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar</b>
1.06 . 19 . 01	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
1.06 . 19 . 02	Koordinasi penyelesaian penyelesaian transportasi perkotaan
1.06 . 19 . 03	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
1.06 . 19 . 04	Koordinasi perencanaan penanggulangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
1.06 . 19 . 05	Koordinasi perencanaan penanggulangan pusat-pusat industri
1.06 . 19 . 06	Koordinasi perencanaan penanggulangan pusat-pusat pendidikan
1.06 . 19 . 07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
1.06 . 19 . 08	Koordinasi perencanaan penanganan perparkiran
1.06 . 19 . 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1.06 . 19 . 10	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
1.06 . 19 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06 . 19 . 12	Rencana Induk Air Baku Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 19 . 13	Penataan Bakauheni sebagai kawasan wisata
1.06 . 19 . 14	Penyusunan RP3KP Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 19 . 15	Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lampung Selatan
<b>1.06 . 20</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
1.06 . 20 . 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1.06 . 20 . 02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 20 . 03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 20 . 04	Dana pendamping dan penunjang operasional PIU proyek SCBD
1.06 . 20 . 05	Koordinasi Perencanaan Irigasi Partisipatif
1.06 . 20 . 06	Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 20 . 07	Tindak Lanjut Implementasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas
<b>1.06 . 21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
1.06 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1.06 . 21 . 02	Penyusunan rancangan RPJPD
1.06 . 21 . 03	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
1.06 . 21 . 04	Penetapan RPJPD
1.06 . 21 . 05	Penyusunan rancangan RPJMD
1.06 . 21 . 06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1.06 . 21 . 07	Penetapan RPJMD
1.06 . 21 . 08	Penyusunan Rancangan RKPD
1.06 . 21 . 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 21 . 10	Penetapan RKJMD
1.06 . 21 . 11	Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP)
1.06 . 21 . 12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan Tahun 2015
1.06 . 21 . 13	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati (AMJ)
1.06 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten
1.06 . 21 . 15	Rapat Koordinasi Kecamatan dan Perencanaan Pembangunan
1.06 . 21 . 16	Penyusunan KUA dan PPA
1.06 . 21 . 17	Penyusunan Rancangan (Draft) RPJP
1.06 . 21 . 18	Penyusunan Rancangan (Draft) RPJM
1.06 . 21 . 19	Monitoring Tugas Pembantuan di Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 21 . 20	Penyusunan perencanaan desa-desa pusat pertumbuhan
1.06 . 21 . 21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1.06 . 21 . 22	Perencanaan Umum Bappeda
1.06 . 21 . 23	Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 21 . 24	Koordinasi dan Monitoring Dana DAK Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 21 . 25	Penyelenggaraan Musrenbang ke Kecamatan
1.06 . 21 . 26	Penyusunan Perda RPJP Kabupaten Lampung Selatan 2011-2025
1.06 . 21 . 27	Revisi dan Penyusunan Perda RPJMD 2011 - 2015
1.06 . 21 . 28	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan

1.06 . 21 . 29	Penyusunan Naskah Akademik PERDA Pendirian BUMD (PT)
1.06 . 21 . 30	Penyusunan KUA/PPAS Perubahan
1.06 . 21 . 31	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 21 . 32	Penyusunan Laporan Periodik Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (UKP4)
1.06 . 21 . 33	Penyusunan Laporan Tahunan Bappeda
1.06 . 21 . 34	Penyusunan Indikator Pembangunan Kab. Lampung Selatan
1.06 . 21 . 35	Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 21 . 36	Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Daerah
1.06 . 21 . 37	Penguatan Peranan Organisasi Pengelola Kawasan Reklamasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.06 . 21 . 38	Penyusunan Standar Operasional Prosedur RPJMD dan RKPD
1.06 . 21 . 39	Penyusunan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 21 . 40	Penyusunan KUA/PPAS
1.06 . 21 . 41	Penyusunan Laporan Tahunan (annual-report)
1.06 . 21 . 42	Evaluasi Renja SKPD
1.06 . 21 . 43	Penyusunan SOP Renstra
1.06 . 21 . 44	Evaluasi Dampak Pembangunan Jalan Poros Kecamatan
1.06 . 21 . 45	Pelaporan Rencana Aksi Pemberantasan dan Pengawasan Korupsi
1.06 . 21 . 46	Penyusunan RKPD
1.06 . 21 . 47	Penyusunan, penyiapan, Updating data dan penjarangan aspirasi masyarakat
1.06 . 21 . 48	Penyusunan Rancangan Awal RPJM RPJMD
1.06 . 21 . 49	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
1.06 . 21 . 50	Koordinasi penyusunan laporan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas
1.06 . 21 . 51	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 21 . 52	Penyusunan Rancangan Akhir dan Perda RPJMD tahun 2016 - 2020 Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 21 . 53	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
1.06 . 21 . 54	Analisis Dasar Kebijakan Ekonomi Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 21 . 55	Koordinasi Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi Bidang Akuntabilitas
<b>1.06 . 22</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>
1.06 . 22 . 01	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
1.06 . 22 . 02	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
1.06 . 22 . 03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
1.06 . 22 . 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi masyarakat
1.06 . 22 . 05	Penyusunan tabel input output daerah
1.06 . 22 . 06	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
1.06 . 22 . 07	Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
1.06 . 22 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06 . 22 . 09	Pola Pengembangan Komoditas Berbasis Agribisnis (Pendukung Program Propinsi dalam Pengentasan Kemiskinan)
1.06 . 22 . 10	Statistik indikator ekonomi desa tertinggal (Program Siger Mas) Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 11	Tim koordinasi program percepatan penanggulangan kemiskinan (Program Siger Mas) Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 12	Tim koordinasi dan forum terpadu fasilitas komoditas unggulan pisang Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 13	Revitalisasi pengembangan ekonomi lokal (Program Nasional)
1.06 . 22 . 14	Inventarisasi (CD profile multimedia) kawasan-kawasan miskin pemukiman pesisir Kabupaten Lampung Selatan)
1.06 . 22 . 15	Musrenbangtan sinkronisasi, koordinasi dan fasilitasi perencanaan sektoral perekonomian Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 16	Penyusunan statistik ekonomi daerah Kabupaten Lampung Selatan (Program Nasional)
1.06 . 22 . 17	Fasilitasi kerja sama program bantuan permodalan Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 18	Inventarisasi aplikasi dan seminarisasi ekonomi kerakyatan Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 19	Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 20	Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Bidang Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 21	Perencanaan Umum Bidang Ekonomi
1.06 . 22 . 22	Penyusunan arah dan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 23	Penyusunan cluster ekonomi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 24	Penyusunan Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui Alternatif Rute Perjalanan Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 25	Penyusunan dan Analisis Aspek Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 26	Penyusunan Identifikasi Usaha Unggulan pada Sektor Basis di Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 27	Evaluasi dan Monitoring Program Unggulan Kab.Lampung Selatan
1.06 . 22 . 28	Penyusunan Evaluasi Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 29	Penyusunan Analisis dan Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 30	Penyusunan Analisis dan Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 31	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan UMKM Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 32	Kajian Minwisata Desa Berundung Kecamatan Ketapang
1.06 . 22 . 33	Kajian Pengembangan Potensi/Produk Unggulan Kecamatan
1.06 . 22 . 34	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan usaha Ternak Sapi
1.06 . 22 . 35	Penyusunan Perencanaan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah
1.06 . 22 . 36	Analisis Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah Kab. Lampung Selatan
1.06 . 22 . 37	Kajian Pendirian BPR
1.06 . 22 . 38	Penyusunan Naskah Akademik dan PERDA Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1.06 . 22 . 39	Kajian Potensi Sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 40	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pesisir Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 41	Penyusunan Zonasi Kawasan Pesisir Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 42	Analisis Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah
1.06 . 22 . 43	Kajian Kinerja Implementasi Teknologi Reproduksi Ternak Terhadap Perkembangan Sapi Potong di Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 44	Kajian Dampak Diskontinuitas Jalur Bakauheni - Kalianda Terhadap Perekonomian di Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 45	Kajian Potensi Sumber Daya dan Lingkungan di Rencana Lokasi Kawasan Industri Way Sebalang Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 46	Persiapan Pembentukan BUMD Kab. Lampung Selatan
1.06 . 22 . 47	Penyusunan Studi Pendahuluan Pembangunan Kawasan Industri Ketapang
1.06 . 22 . 48	Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian Kab. Lampung Selatan
1.06 . 22 . 49	Penyusunan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten (MP3EK) Lampung Selatan
1.06 . 22 . 50	Penyusunan Rencana Aksi Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP3K) Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 51	Penyusunan Rencana Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP3K) Kab. Lam-Sel
1.06 . 22 . 52	Fasilitas dan Penyusunan Database Program CSR Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 53	Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 54	Kajian Dampak Diskontinuitas Jalur Bakauheni-Kalianda terhadap Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 55	Kajian Populasi Mamalia Laut Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 56	Kajian Carrying Capacity dalam Pengembangan Ternak Ruminansia di Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 57	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 58	Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZRWP3K)
1.06 . 22 . 59	Penyusunan Kajian Pengembangan Administratif Kecamatan dan Desa
1.06 . 22 . 60	Penyusunan Buku Refleksi dan Publikasi Pencapaian Pembangunan
1.06 . 22 . 61	Penyusunan analisis perekonomian daerah Kab. Lampung Selatan
1.06 . 22 . 62	Pelaksanaan program CSR Kab. Lampung Selatan
1.06 . 22 . 63	Penyusunan perencanaan bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 64	Penyusunan perencanaan bidang Industri, Dunia Usaha, Keuangan dan Pertambangan Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 65	Penyusunan model pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung sektor pariwisata
1.06 . 22 . 66	Penyusunan road map pembangunan pertanian terpadu dan berkelanjutan
1.06 . 22 . 67	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan di Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 22 . 68	Penyusunan Analisis Pengaruh Alokasi Anggaran Terhadap PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Selatan
<b>1.06 . 23</b>	<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>
1.06 . 23 . 01	Koordinasi masterplan pendidikan
1.06 . 23 . 02	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
1.06 . 23 . 03	Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah sosial budaya
1.06 . 23 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06 . 23 . 05	Perencanaan Umum Bidang Sosial Budaya
1.06 . 23 . 06	Penyusunan Profil Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 23 . 07	Penyusunan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 23 . 08	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya
1.06 . 23 . 09	Pembuatan Media Publikasi Sosial Budaya Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 23 . 10	Penyusunan Data Potensi Desa Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 23 . 11	Pembuatan Sistem Informasi Geografi Kondisi Sosial Budaya Lampung Selatan
1.06 . 23 . 12	Kajian Implementasi Program Akademi Komunitas di Lampung Selatan
1.06 . 23 . 13	Kajian Kapasitas dan Strategi Pengembangan Kebhinekaan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 23 . 14	Penyusunan Buku Potensi Desa se-Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 23 . 15	Pembuatan Maket Wilayah Penyebaran Sarana Pendidikan, Kesehatan & Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 23 . 16	Pembuatan Media Publikasi Pembangunan dibidang Pemerintah Sosial dan Budaya Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 23 . 17	Kajian Implementasi Program Akademi Komunitas di Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 23 . 18	Pembuatan Peta Data Sebaran Sarana Prasarana Pendidikan dan Kesehatan
1.06 . 23 . 19	Penyusunan Buku Saku Aku Bangga Menjadi Warga Peduli AIDS
1.06 . 23 . 20	Penyusunan Statistik Potensi Desa se Kab. Lampung Selatan
1.06 . 23 . 21	Pemutakhiran data sebaran sarana pendidikan, kesehatan
1.06 . 23 . 22	Penyusunan buku saku sosial dan budaya
1.06 . 23 . 23	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
1.06 . 23 . 24	Penyusunan Buku Perkembangan dunia Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 23 . 25	Penyusunan kebijakan strategi penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 23 . 26	Koordinasi dan Monitoring Program Gerbang Desa (mendukung program provinsi)
<b>1.06 . 24</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam</b>
1.06 . 24 . 01	Koordinasi masterplan perhubungan daerah
1.06 . 24 . 02	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.06 . 24 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06 . 24 . 04	Perencanaan bidang infrastruktur Kabupaten Lampung Selatan

1.06 . 24 . 05	Koordinasi DAK infrastruktur Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 24 . 06	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
1.06 . 24 . 07	Koordinasi penataan ruang Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 24 . 08	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 24 . 09	Koordinasi Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 24 . 10	Penyusunan Rancangan Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 24 . 11	Optimalisasi Fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
1.06 . 24 . 12	Pembangunan/Pengembangan Kalianda Trade Center (KTC)
1.06 . 24 . 13	Pembaharuan dan Pencetakan Peta
1.06 . 24 . 14	Penyusunan Rencana Induk Sistem Persampahan Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 24 . 15	Penyusunan Master Plan Pengembangan Kota Kalianda
1.06 . 24 . 16	Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah
1.06 . 24 . 17	Penyusunan RDTR Kecamatan Katibung
1.06 . 24 . 18	Penyusunan Master Plan Kawasan Rest Area Masjid Kubah Intan Kalianda
1.06 . 24 . 19	Penyusunan Site Plan Kawasan Perumahan Kota Baru Lampung
1.06 . 24 . 20	Penyusunan Site Plan Kawasan Perumahan Kota Baru Lampung
1.06 . 24 . 21	Penyusunan RDTR Kecamatan Ketapang
1.06 . 24 . 22	Penyusunan Rencana Induk Kawasan Industri Katibung
1.06 . 24 . 23	Penyusunan Ranperda dan Sosialisasi RDTR Kecamatan Katibung
1.06 . 24 . 24	Penyusunan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 24 . 25	Review RPIJM dan PPSP Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 24 . 26	Koordinasi program pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan
1.06 . 24 . 27	Sinkronisasi dan koordinasi program pengembangan kawasan pengembangan kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
1.06 . 24 . 28	Koordinasi penanganan perumahan dan percepatan pengelolaan air minum dan sanitasi
1.06 . 24 . 29	Kajian faktor ketimpangan wilayah (unbalance growth) Kab. Lamsel
1.06 . 24 . 30	Kajian Faktor Peninjauan Kembali RT RW Kab. Lampung Selatan
<b>1.06 . 25</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan</b>
1.06 . 25 . 01	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 25 . 02	Penyusunan Profil Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan
<b>1.06 . 26</b>	<b>Media Informasi Pembangunan Daerah</b>
1.06 . 26 . 01	Penyusunan Calender of Event Kabupaten Lampung Selatan
1.06 . 26 . 02	Pembuatan Media Informasi Pembangunan Daerah
1.06 . 26 . 03	Pameran Pembangunan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
<b>1.06 . 27</b>	<b>Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)</b>
1.06 . 27 . 01	Penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
<b>1.07</b>	<b>Perhubungan</b>
<b>1.07 . 15</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>
1.07 . 15 . 01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1.07 . 15 . 02	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
1.07 . 15 . 03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1.07 . 15 . 04	Peningkatan Keselamatan Transportasi Laut
1.07 . 15 . 05	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
1.07 . 15 . 06	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan
1.07 . 15 . 07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
1.07 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07 . 15 . 09	Pembangunan prasarana perhubungan
1.07 . 15 . 10	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.07 . 15 . 11	Perhubungan dalam angka
1.07 . 15 . 12	Analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas
1.07 . 15 . 13	Pendataan kapal - kapal nelayan di wilayah kabupaten lampung selatan
1.07 . 15 . 14	Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
1.07 . 15 . 15	Sosialisasi Akai Keselamatan Pelayaran
1.07 . 15 . 16	Kajian Teknis dan Pemetaan Alur Pelayaran
<b>1.07 . 16</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>
1.07 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 16 . 02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 16 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
1.07 . 16 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07 . 16 . 05	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
1.07 . 16 . 06	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perambuan dan Fasilitas LLAJ
1.07 . 16 . 07	Pengadaan kelengkapan terminal sementara Bahauheni
<b>1.07 . 17</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>
1.07 . 17 . 01	Penyuluhan dan Pemilihan Awak Angkutan Penumpang
1.07 . 17 . 02	Peningkatan disiplin masyarakat di jalan raya
1.07 . 17 . 03	Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
1.07 . 17 . 04	Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang
1.07 . 17 . 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
1.07 . 17 . 06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal
1.07 . 17 . 07	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
1.07 . 17 . 08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
1.07 . 17 . 09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
1.07 . 17 . 10	Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

1.07 . 17 . 11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
1.07 . 17 . 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
1.07 . 17 . 13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
1.07 . 17 . 14	Forum lalu lintas kabupaten lampung selatan
1.07 . 17 . 15	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kenderaaan angkutan umum teladan
1.07 . 17 . 16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
1.07 . 17 . 17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam persiapan wahana tata nugraha (WTN)
1.07 . 17 . 18	Pelatihan Peningkatan Kinerja Petugas Operasional
1.07 . 17 . 19	Pengumpulan analisis database pelayanan angkutan (load faktor angkutan pedesaan)
1.07 . 17 . 20	Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1.07 . 17 . 21	Pengembangan informasi publik (WEBSITE) Dinas Perhubungan Kabupaten Lamsel
1.07 . 17 . 22	Sosialisasi Aksi Keselamatan dan Pekan Transportasi berlalulintas tingkat provinsi
1.07 . 17 . 23	Perencanaan Jaringan Angkutan Perintis dan Angkutan Barang
1.07 . 18	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>
1.07 . 18 . 01	Pembangunan gedung terminal
1.07 . 18 . 02	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
1.07 . 18 . 03	Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal
1.07 . 18 . 04	Pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan khusus
1.07 . 19	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>
1.07 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan Marka Jalan
1.07 . 19 . 02	Pengadaan marka jalan
1.07 . 19 . 03	Pengadaan pagar pengaman jalan
1.07 . 19 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.07 . 19 . 05	Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07 . 19 . 06	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas (DAK)
1.07 . 19 . 07	Pengendalian dan Pengawasan Lokasi Parkir
1.07 . 20	<b>Program Peningkatan Kelayakan Pegoperasian Kendaraan Bermotor</b>
1.07 . 20 . 01	Pelatihan peningkatan dan monitoring kinerja petugas operasional
1.07 . 20 . 02	Pengadaan bahan keperluan pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 20 . 03	Dst ...
1.07 . 21	<b>Perogram Penyediaan dan Prasarana Perdesaan Tertinggal</b>
1.07 . 21 . 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dan Perairan (DAK)
1.07 . 21 . 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dan Perairan (Pendamping)
1.07 . 22	<b>Program Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah</b>
1.07 . 22 . 01	Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07 . 22 . 02	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Angkutan Penumpang
1.07 . 22 . 03	Pembangunan Fasilitas Pendukung Pelabuhan Khusus
1.07 . 23	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>
1.07 . 23 . 01	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
1.07 . 24	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</b>
1.07 . 24 . 01	Publikasi Implementasi Kebijakan Berbagai Sektor Kabupaten Lampung Selatan
1.07 . 25	<b>Program Sarana dan Prasarana Pameran Pembangunan</b>
1.07 . 25 . 01	Pameran dan promosi tingkat kabupaten
1.07 . 26	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur LLAJ</b>
1.07 . 26 . 01	Pelatihan pengamanan tindak kecelakaan
1.07 . 26 . 02	Pelatihan Peraturan Baris berbaris
1.07 . 26 . 03	Seleksi Penerimaan Anggota Dinas Perhubungan
1.07 . 26 . 04	Pengadaan bahan keperluan pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 26 . 05	Pelatihan dan monitoring kinerja petugas oprasional
1.08	<b>Lingkungan Hidup</b>
1.08 . 15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>
1.08 . 15 . 01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
1.08 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1.08 . 15 . 03	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
1.08 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1.08 . 15 . 05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
1.08 . 15 . 06	Bimbingan teknis persampahan
1.08 . 15 . 07	Kerjasama pengelolaan persampahan
1.08 . 15 . 08	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
1.08 . 15 . 09	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1.08 . 15 . 10	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.08 . 15 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08 . 15 . 12	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
1.08 . 15 . 13	Partisipasi Penyampaian Informasi Pengelolaan Persampahan
1.08 . 15 . 14	Membangunan Sarana dan Prasarana Persampahan
1.08 . 15 . 15	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Persampahan
1.08 . 15 . 16	Penyusunan data persampahan dan pelayanan sedot lumpur tinja
1.08 . 15 . 17	Revisi perda retribusi pelayanan kebersihan
1.08 . 16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>



1.08 . 16 . 01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08 . 16 . 02	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08 . 16 . 03	Pemantauan kualitas lingkungan
1.08 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.08 . 16 . 05	Pengkajian Dampak Lingkungan
1.08 . 16 . 06	Sosialisasi IPAL dan Spetic Tank Komunal kepada masyarakat dan Bimbingan Teknis Calon Pengelola TPA/IPLT
1.08 . 16 . 07	Pemberdayaan Laboratorium Lingkungan Hidup
1.08 . 16 . 08	Revisi perda retrebusi pelayanan sedot tinja
1.08 . 16 . 09	Pengambilan dan Pengujian Sample Air Secara Laboratoris
<b>1.08 . 17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>
1.08 . 17 . 01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
1.08 . 17 . 02	Pantai dan Laut Lestari
1.08 . 17 . 03	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut
1.08 . 17 . 04	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
1.08 . 17 . 05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1.08 . 17 . 06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
1.08 . 17 . 07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
1.08 . 17 . 08	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA
1.08 . 17 . 09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.08 . 17 . 10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
1.08 . 17 . 11	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut
1.08 . 17 . 12	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional
1.08 . 17 . 13	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1.08 . 17 . 14	Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
1.08 . 17 . 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08 . 17 . 16	Menuju Indonesia Hijau
1.08 . 17 . 17	Inventarisasi Gas Rumah Kaca
<b>1.08 . 18</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam</b>
1.08 . 18 . 01	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
1.08 . 18 . 02	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.08 . 18 . 03	Rehabilitasi hutan dan lahan
1.08 . 18 . 04	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
1.08 . 18 . 05	Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
1.08 . 18 . 06	Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
1.08 . 18 . 07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
1.08 . 18 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08 . 18 . 09	Dst...
<b>1.08 . 19</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan</b>
1.08 . 19 . 01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1.08 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.08 . 19 . 03	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
1.08 . 19 . 04	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
1.08 . 19 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08 . 19 . 06	Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
1.08 . 19 . 07	Penyusunan RPPLH
<b>1.08 . 20</b>	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>
1.08 . 20 . 01	Pengujian emisi kendaraan bermotor
1.08 . 20 . 02	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
1.08 . 20 . 03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
1.08 . 20 . 04	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
1.08 . 20 . 05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
1.08 . 20 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08 . 20 . 07	Dst.....
<b>1.08 . 21</b>	<b>Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi</b>
1.08 . 21 . 01	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
1.08 . 21 . 02	Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
1.08 . 21 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08 . 21 . 04	Dst.....
<b>1.08 . 22</b>	<b>Program Pengendalian kebakaran hutan</b>
1.08 . 22 . 01	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
1.08 . 22 . 02	Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
1.08 . 22 . 03	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
1.08 . 22 . 04	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
1.08 . 22 . 05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
1.08 . 22 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08 . 22 . 07	Dst....
<b>1.08 . 23</b>	<b>Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut</b>
1.08 . 23 . 01	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

1.08 . 23 . 02	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
1.08 . 23 . 03	dst ....
<b>1.08 . 24</b>	<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>
1.08 . 24 . 01	Penyusunan kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan RTH
1.08 . 24 . 02	Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
1.08 . 24 . 03	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
1.08 . 24 . 04	Penyusunan program pengembahan RTH
1.08 . 24 . 05	Penataan RTH
1.08 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH
1.08 . 24 . 07	Perbaikan Taman
1.08 . 24 . 08	Pengadaan bibit
1.08 . 24 . 09	Fasilitasi kegiatan hari-hari besar
<b>1.08 . 25</b>	<b>Program Pengadaan Lampu Penerangan Jalan</b>
1.08 . 25 . 01	Pemasangan Lampu Jalan di Kabupaten Lampung Selatan
1.08 . 25 . 02	Pengawasan Usaha Kelistrikan dan Pemeliharaan Lampu Jalan Umum
1.08 . 25 . 03	Penatausahaan LPJU Milik Daerah se-Kabupaten Lampung Selatan
1.08 . 25 . 04	Perencanaan Pembangunan Pemasangan Lampu Jalan di Kabupaten Lampung Selatan
1.08 . 25 . 05	Pengawasan usaha kelistrikan dan pemeliharaan lampu taman
<b>1.08 . 26</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>
1.08 . 26 . 01	Pengembangan Informasi Pasar dan Distribusi Barang
<b>1.08 . 27</b>	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>
1.08 . 27 . 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar
1.08 . 27 . 02	Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar PEMDA Kab. Lampung Selatan
1.08 . 28	<b>Program Optimalisasi Pendapatan Anggaran Daerah</b>
1.08 . 28 . 01	Bimtek Pelaksanaan Perda No. 16 Tahun 2011 di Lingkungan DPDK dan Sosialisasi Perda No. 16 Tahun 2011 bagi Pedagang
1.09	<b>Pertanahan</b>
<b>1.09 . 15</b>	<b>Program pembangunan sistem pendaftaran tanah</b>
1.09 . 15 . 01	Penyusunan sistem pendaftaran tanah
1.09 . 15 . 02	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
1.09 . 15 . 03	Dst...
<b>1.09 . 16</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>
1.09 . 16 . 01	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.09 . 16 . 02	Penyuluhan hukum pertanahan
1.09 . 16 . 03	Pencadangan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan
<b>1.09 . 17</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>
1.09 . 17 . 01	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
1.09 . 17 . 02	Dst...
<b>1.09 . 18</b>	<b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>
1.09 . 18 . 01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1.09 . 18 . 02	Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian Administrasi Pertanahan
<b>1.09 . 19</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Pertanahan</b>
1.09 . 19 . 01	Penyediaan Makan dan Minum
1.09 . 19 . 02	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
1.09 . 19 . 03	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi
1.09 . 19 . 04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Administrasi Kantor
1.09 . 19 . 05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.09 . 19 . 06	Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya
1.09 . 19 . 07	Penertifikatan Tanah Masal (PRODA) Kota Balikpapan
1.09 . 19 . 08	Survey dan Pemetaan Penggunaan Tanah Skala 1 : 25.000
1.09 . 19 . 09	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1.09 . 19 . 10	Redistribusi Tanah Negara
1.09 . 19 . 11	Pembuatan titik Dasar Teknis Orde-4 dan Pembuatan Lembar Peta Pendaftaran Format Digital Skala 1 : 5.000
1.09 . 19 . 12	Updating/Unifikasi Peta
<b>1.10</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>
<b>1.10 . 15</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>
1.10 . 15 . 01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara terpadu
1.10 . 15 . 02	Entri data daftar rumah tangga (DRT) menuju sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)
1.10 . 15 . 03	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun updating dan pemeliharaan)
1.10 . 15 . 04	Pembentukan dan penetaan sistem koneksi NIK
1.10 . 15 . 05	Koordinasi sistem pelaksanaan kebijakan kependudukan
1.10 . 15 . 06	Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan
1.10 . 15 . 07	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1.10 . 15 . 08	Pengembangan database kependudukan
1.10 . 15 . 09	Penyusunan kebijakan kependudukan
1.10 . 15 . 10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
1.10 . 15 . 11	Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10.15.12	Peningkatan kapasitas keseimbangan kependudukan
1.10.15.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.10.15.14	Peningkatan pelayanan akta-akta catatan sipil
1.10.15.15	Pengelolaan premi asuransi rumah tangga miskin
1.10.15.16	Pemutakhiran data penduduk
1.10.15.17	Pelaksanaan Sosialisasi Pemutakhiran data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP
1.10.15.18	Monitoring, Evaluasi, Penyuluhan dan Pengawasan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.15.19	Promosi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.15.20	Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.15.21	Integritas Lintas Sektor Pelayanan Kependudukan
<b>1.10.16</b>	<b>Program Bidang Kesejahteraan Sosial</b>
1.10.16.01	Pelayanan dan rehabilitasi kessos ( Peningkatan Kualitas Bagi Lanjut Usia )
1.10.16.02	Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin
1.10.16.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.10.16.04	Pengembangan bakat dan keterampilan anak kurang mampu
1.10.16.05	Peningkatan kualitas SDM Kessos bagi Organisasi Sosial Masyarakat (Orsos)
<b>1.10.17</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>
1.10.17.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.10.17.02	Peningkatan Kualitas Bagi Lanjut Usia
<b>1.10.18</b>	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>
1.10.18.01	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
<b>1.10.19</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>
1.10.19.01	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat
<b>1.11</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
<b>1.11.15</b>	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>
1.11.15.01	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
1.11.15.02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
1.11.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.15.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.15.05	Operasional Rumah Pintar
1.11.15.06	dst...
<b>1.11.16</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>
1.11.16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
1.11.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
1.11.16.03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
1.11.16.04	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
1.11.16.05	Evaluasi pelaksanaan PUG
1.11.16.06	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
1.11.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.16.08	Pemberdayaan Perempuan
1.11.16.09	Sosialisasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
1.11.16.10	Operasional Pembinaan Kelompok Kerja Bina Keluarga TKI (Pokja BKTKI)
1.11.16.11	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
1.11.16.12	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
1.11.16.13	dst...
<b>1.11.17</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>
1.11.17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
1.11.17.02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
1.11.17.03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
1.11.17.04	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAF)
1.11.17.05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
1.11.17.06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
1.11.17.07	Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
1.11.17.08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1.11.17.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.17.10	Peningkatan Kualitas Keterampilan Perempuan
1.11.17.11	Pembinaan Dasa Wisma
1.11.17.12	dst...
<b>1.11.18</b>	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>
1.11.18.01	Pembinaan organisasi perempuan
1.11.18.02	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
1.11.18.03	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1.11.18.04	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
1.11.18.05	Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
1.11.18.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.18.07	dst...

<b>1.11 . 19</b>	<b>Program Penguatan Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan</b>
1.11 . 19 . 01	Operasional Rumah Pintar Kabupaten Lampung Selatan
1.11 . 19 . 02	Pembinaan Kader P3KSS, Nakerwan dan Pokjanal GSI
1.11 . 19 . 03	Workshop Peningkatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
1.11 . 19 . 04	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini bagi Pelajar
1.11 . 19 . 05	Operasional Gugus Tugas Kota Layak Anak
1.11 . 19 . 06	Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Seksual Terhadap Anak
1.11 . 19 . 07	dst...
<b>1.11 . 20</b>	<b>Program Kerja Sekretariat TP. PKK</b>
1.11 . 20 . 01	Operasional Sekretariat PKK Kabupaten Lampung Selatan
1.11 . 20 . 02	Seminar Sehari Komunikasi Efektif
1.11 . 20 . 03	Sosialisasi dan Pelatihan LP3K
1.11 . 20 . 04	Sandang, Pangan, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
1.11 . 20 . 05	Orientasi Program Kerja
1.11 . 20 . 06	Lomba Administrasi PKK, Kader PKK dan Pembinaan Dasa Wisma
1.11 . 20 . 07	Operasional untuk Anak Yatim Piatu
1.11 . 20 . 08	Operasional untuk Peringatan Hari Kartini, HUT RI dan Hari Ibu
1.11 . 20 . 09	Peningkatan Kualitas SDM melalui Gerakan PKK untuk Kesrak
1.11 . 20 . 10	Pengadaan ATK untuk Kecamatan Dan Desa
1.11 . 20 . 11	Pembinaan PKK Tingkat Kecamatan
1.11 . 20 . 12	Sosialisasi Posdaya dan LKKS Kabupaten Lampung Selatan
1.11 . 20 . 13	Pameran Promosi Produk Kerajinan TP PKK
1.11 . 20 . 14	Jambore Tingkat Provinsi dan Nasional
1.11 . 20 . 15	dst...
<b>1.11 . 21</b>	<b>Program Kerja TP PKK Bidang Penghayatan, Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong (Pokja I)</b>
1.11 . 21 . 01	Pembinaan Mental dan Spiritual Kelompok Ibu - Ibu PKK
1.11 . 21 . 02	Seminar Sehari Komunikasi Efektif
1.11 . 21 . 03	dst...
<b>1.11 . 22</b>	<b>Program Kerja TP PKK Bidang Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi (Pokja II)</b>
1.11 . 22 . 01	Sosialisasi dan Pelatihan LP3K
1.11 . 22 . 02	Peningkatan Rasa Kebangsaan dan Kecintaan terhadap Pejuang Wanita
1.11 . 22 . 03	Sosialisasi dan Pelatihan LP3PKK, Lomba UP2K, BKB dan PAUD
1.11 . 22 . 04	Pelaksanaan Lomba UP2K, BKB dan PAUD
<b>1.11 . 23</b>	<b>Program Kerja TP PKK Bidang Sandang, Pangan, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga (Pokja III)</b>
1.11 . 23 . 01	Sandang, Pangan, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
1.11 . 23 . 02	Penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung
1.11 . 23 . 03	dst...
<b>1.11 . 24</b>	<b>Program Kerja TP PKK Bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat (Pokja IV)</b>
1.11 . 24 . 01	Orientasi Program Kerja
1.11 . 24 . 02	Peningkatan Mutu Kehidupan Keluarga
1.11 . 24 . 03	Penilaian Lomba P3KSS, Nakerwan dan GSI/PSI Tingkat Provinsi Lampung
1.11 . 24 . 04	Peningkatan Kualitas SDM melalui Hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan
1.11 . 24 . 05	dst...
<b>1.12</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>
<b>1.12 . 15</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>
1.12 . 15 . 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1.12 . 15 . 02	Pelayanan KIE
1.12 . 15 . 03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
1.12 . 15 . 04	Pelatihan PLKB dan PKB Tingkat Nasional
1.12 . 15 . 05	Orientasi Penilaian Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana ( PKB)
1.12 . 15 . 06	Penilaian Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana ( PKB )
1.12 . 15 . 07	Operasional Pelayanan KB Melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)
1.12 . 15 . 08	Operasional Pelayanan KB/KS Melalui Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kesehatan Tk.Kabupaten dan Provinsi
1.12 . 15 . 09	Operasional Pelayanan KB Melalui Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK - KB - Kesehatan Tk. Nasional
1.12 . 15 . 10	Penerangan KB/KS melalui mobil unit penerangan (MUPEN)
1.12 . 15 . 11	Bhakti Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
1.12 . 15 . 12	Penilaian Keluarga Harmonis, IMP, PLKB/PKB dan UPPKS Tk. Provinsi
1.12 . 15 . 13	Pelayanan KB Keliling (TKBK)
1.12 . 15 . 14	Pertemuan lengkap petugas lapangan KB
1.12 . 15 . 15	Lomba KB di Lingkungan Perusahaan
1.12 . 15 . 16	Pekan Promosi Program KB/KS dan Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS
1.12 . 15 . 17	Peringatan Harganas Tk. Kabupaten
1.12 . 15 . 18	Pelatihan PLKB dan PKB Tk. Nasional
1.12 . 15 . 19	Pelayanan KB Keliling (TKBK)
1.12 . 15 . 20	Penyediaan Mobil Penerangan (MUPEN) KB
1.12 . 15 . 21	Penyediaan kendaraan bermotor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB
1.12 . 15 . 22	Pengadaan Publik Adress (Wireless) Sarana KIE
1.12 . 15 . 23	Penyediaan kendaraan bermotor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB (Pendamping DAK)

1.12 . 15 . 24	Penyediaan Mobil Pelayanan KB Keliling (Pendamping DAK)
1.12 . 15 . 25	Pengadaan Publik Adress (wireless) sarana KJE (Pendamping DAK)
1.12 . 15 . 26	Fasilitasi Kelompok Ekonomi Produktif Perempuan di Desa Prima
1.12 . 15 . 27	Pengadaan Sarana Pelayanan KB dan KJE (DAK dan Pendamping DAK)
1.12 . 15 . 28	Analisis Jabatan Badan PP dan KB
1.12 . 15 . 29	Standar Operasional Prosedur (SOP)
1.12 . 15 . 30	Analisis Beban Kerja Badan PP dan KB
1.12 . 15 . 31	Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan
1.12 . 15 . 32	Orientasi Program Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS)
1.12 . 15 . 33	Revitalisasi Petugas Lini Lapangan KB
1.12 . 15 . 34	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.12 . 15 . 35	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), PPKBD dan Sub PPKBD
1.12 . 15 . 36	Lomba Bina Keluarga Balita Tingkat Provinsi
1.12 . 15 . 37	Lomba Pengelolaan dan Kader BKB
<b>1.12 . 16</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>
1.12 . 16 . 01	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) Bagi Kelompok Remaja
1.12 . 16 . 02	dst...
<b>1.12 . 17</b>	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>
1.12 . 17 . 01	Pelayanan konseling KB
1.12 . 17 . 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
1.12 . 17 . 03	Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis
1.12 . 17 . 04	Pelayanan KB medis operasi
1.12 . 17 . 05	dst...
<b>1.12 . 18</b>	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</b>
1.12 . 18 . 01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
1.12 . 18 . 02	Peningkatan Pendapatan Kelompok UPPKS
1.12 . 18 . 03	Sosialisasi Program Bina Keluarga TKI/ TKW
1.12 . 18 . 04	Pelaksanaan Pendataan Keluarga
1.12 . 18 . 05	Penyusunan Analisa dan Dampak Program
1.12 . 18 . 06	Pembentukan dan pelatihan kader P3KSS, Nakerwan dan Pokjanel GSI untuk persiapan lomba Tk. Provinsi
1.12 . 18 . 07	Sosialisasi kebijakan Kota Layak Anak ( KLA ) di kecamatan
1.12 . 18 . 08	Operasional Pembinaan perempuan tani
1.12 . 18 . 09	Peningkatan Promosi Hasil Pendataan Keluarga
1.12 . 18 . 10	Temu Kader UPPKS
1.12 . 18 . 11	Pengolahan Hasil Pendataan Keluarga
1.12 . 18 . 12	Koordinasi Pengelolaan Program
1.12 . 18 . 13	Orientasi Petugas Pendataan Keluarga
1.12 . 18 . 14	Sosialisasi Undang-undang tentang Perlindungan Anak
1.12 . 18 . 15	Forum Anak Daerah
1.12 . 18 . 16	Orientasi Tribina Kader BKB, BKR dan BKL
1.12 . 18 . 17	Orientasi Saka Kencana
1.12 . 18 . 18	Sosialisasi Koalisi Kependudukan
1.12 . 18 . 19	Operasional Pusat Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
1.12 . 18 . 20	Rapat koordinasi Badan PP dan KB
1.12 . 18 . 21	Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan PP dan KB
1.12 . 18 . 22	Sosialisasi Pelaporan Klinik KB dan Pelaporan Pengendalian Lapangan KB
1.12 . 18 . 23	Orientasi Penginputan Pelaporan Klinik KB dan Pengendalian Lapangan KB
1.12 . 18 . 24	Pembuatan Analisa Program KB
1.12 . 18 . 25	Pembinaan BKB, PPKBD dan Sub PPKBD
1.12 . 18 . 26	Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
1.12 . 18 . 27	Lomba Cerdas Cermat BKB HI
<b>1.12 . 19</b>	<b>Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat</b>
1.12 . 19 . 01	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
1.12 . 19 . 02	dst...
<b>1.12 . 20</b>	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>
1.12 . 20 . 01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
1.12 . 20 . 02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
1.12 . 20 . 03	Pengadaan Sarana KEI Kesehatan Reproduksi Remaja
1.12 . 20 . 04	Orientasi Bagi Fasilitator PIK - KRR dan SKR
1.12 . 20 . 05	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK- KRR)
1.12 . 20 . 06	Dst...
<b>1.12 . 21</b>	<b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS</b>
1.12 . 21 . 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
1.12 . 21 . 02	dst...
<b>1.12 . 22</b>	<b>Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</b>
1.12 . 22 . 01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.12 . 22 . 02	Pembinaan Ketahanan Keluarga
1.12 . 22 . 03	Lomba Bina Keluarga Balita Tingkat Provinsi
1.12 . 22 . 04	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
1.12 . 22 . 05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.12 . 22 . 06	dst...

<b>1.12 . 23</b>	<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>
1.12 . 23 . 01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan
1.12 . 23 . 02	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga
1.12 . 23 . 03	Pembinaan Kelembagaan Institusi Masyarakat Pedesaan
1.12 . 23 . 04	Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
1.12 . 23 . 05	dst...
<b>1.12 . 24</b>	<b>Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD</b>
1.12 . 24 . 01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD
1.12 . 24 . 02	Studi banding keterpaduan program posyandu, BKB dan PAUD
1.12 . 24 . 03	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
1.12 . 24 . 04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.12 . 24 . 05	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.12 . 24 . 06	dst...
<b>1.12 . 25</b>	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi</b>
1.12 . 25 . 01	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
1.12 . 25 . 02	Sosialisasi Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja Tahap Tumbuh
1.12 . 25 . 03	Sosialisasi Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja Tahap Tegak
1.12 . 25 . 04	Sosialisasi PIK Remaja Tahap Tumbuh, Tegak dan Tegar
<b>1.12 . 26</b>	<b>Program Kerja Anggota Dharma Wanita Persatuan di Bidang Sosial Budaya</b>
1.12 . 26 . 01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS, Kesehatan Jasmani dan Rohani
1.12 . 26 . 02	Bhakti Sosial dan Penghijauan
1.12 . 26 . 03	Lomba Baca Pusi Bertema Pahlawan
1.12 . 26 . 04	Wisata Rohani, Wisata Husada dan Ceramah Kesehatan Alat Reproduksi Wanita
1.12 . 26 . 05	Peningkatan Semangat Kebersamaan dan Kualitas Anggota Dharma Wanita Persatuan
1.12 . 26 . 06	dst...
<b>1.12 . 27</b>	<b>Program Kerja Anggota Dharma Wanita Persatuan di Bidang Sekretariat</b>
1.12 . 27 . 01	Penyusunan Rencana Program Kerja, Penetapan Program Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja
1.12 . 27 . 02	Peningkatan Semangat Kebersamaan dan Kreativitas Anggota Dharma Wanita Persatuan
1.12 . 27 . 03	Rapat-rapat, Musdaprop dan Bimtek Dharma Wanita Persatuan
1.12 . 27 . 04	Operasional Sekretariat Dharma Wanita Persatuan
1.12 . 27 . 05	Perbendaharaan Dharma Wanita Persatuan
1.12 . 27 . 06	Seleksi Dharma Wanita Idole
1.12 . 27 . 07	Seminar Etika dan Kepribadian
1.12 . 27 . 08	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Unsur Pelaksana DWP
1.12 . 27 . 09	dst...
<b>1.12 . 28</b>	<b>Program Kerja Anggota Dharma Wanita Persatuan di Bidang Pendidikan</b>
1.12 . 28 . 01	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Melalui Pendidikan
1.12 . 28 . 02	Beasiswa Bagi Putra Putri DWP dan Perpustakaan Serta Taman Bacaan
1.12 . 28 . 03	Peningkatan Keterampilan melalui Pendidikan TK DWP
1.12 . 28 . 04	Beasiswa bagi Putra-Putri Anggota DWP
1.12 . 28 . 05	dst...
<b>1.12 . 29</b>	<b>Program Kerja Anggota Dharma Wanita Persatuan di Bidang Ekonomi</b>
1.12 . 29 . 01	Pengembangan Kemandirian Usaha Anggota Dharma Wanita Persatuan Secara Profesional
1.12 . 29 . 02	Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Produktif
1.12 . 29 . 03	dst...
<b>1.13</b>	<b>Sosial</b>
<b>1.13 . 15</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>
1.13 . 15 . 01	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1.13 . 15 . 02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
1.13 . 15 . 03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
1.13 . 15 . 04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.13 . 15 . 05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.13 . 15 . 06	Operasional Program Raskin
1.13 . 15 . 07	Bantuan Subsidi Harga Beras
1.13 . 15 . 08	dst...
<b>1.13 . 16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>
1.13 . 16 . 01	Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
1.13 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
1.13 . 16 . 03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.13 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
1.13 . 16 . 05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
1.13 . 16 . 06	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
1.13 . 16 . 07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1.13 . 16 . 08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan Sosial
1.13 . 16 . 09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1.13 . 16 . 10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.13 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13 . 16 . 12	Pelayanan dan perlindungan sosial lansia
1.13 . 16 . 13	Pembinaan Wanita Tuna Sosila (WTS)
1.13 . 16 . 14	Kegiatan Pembinaan Pelayanari dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial
1.13 . 16 . 15	Dapur Umum Tanggap Darurat Bencana
1.13 . 16 . 16	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif para Penyandang Cacat dan LK3
<b>1.13 . 17</b>	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>
1.13 . 17 . 01	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
1.13 . 17 . 02	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
1.13 . 17 . 03	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
1.13 . 17 . 04	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
1.13 . 17 . 05	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
1.13 . 17 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13 . 17 . 07	dst...
<b>1.13 . 18</b>	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>
1.13 . 18 . 01	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
1.13 . 18 . 02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
1.13 . 18 . 03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
1.13 . 18 . 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
1.13 . 18 . 05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
1.13 . 18 . 06	Pendataan dan sosialisasi rehabilitasi penyandang cacat
1.13 . 18 . 07	dst...
<b>1.13 . 19</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>
1.13 . 19 . 01	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
1.13 . 19 . 02	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo
1.13 . 19 . 03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
1.13 . 19 . 04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
1.13 . 19 . 05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
1.13 . 19 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13 . 19 . 07	Monitoring dan pembinaan panti asuhan dan jompo dan KUBE Gakin
1.13 . 19 . 08	dst...
<b>1.13 . 20</b>	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba penyakit sosial lainnya) dan</b>
1.13 . 20 . 01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 20 . 02	Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 20 . 03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 20 . 04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 20 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13 . 20 . 06	dst...
<b>1.13 . 21</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>
1.13 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
1.13 . 21 . 02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
1.13 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1.13 . 21 . 04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
1.13 . 21 . 05	Operasional Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
1.13 . 21 . 06	Pembinaan dan pemberian bantuan modal usaha bagi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) Kelurahan
1.13 . 21 . 07	Bimbingan Teknis bagi Petugas Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
1.13 . 21 . 08	Bimbingan Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
1.13 . 21 . 09	Penyuluhan Sosial Masyarakat
1.13 . 21 . 10	Penyusunan Profil Kelurahan
1.13 . 21 . 11	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1.13 . 21 . 12	Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)
1.13 . 21 . 13	dst...
<b>1.13 . 22</b>	<b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS</b>
1.13 . 22 . 01	Penanggulangan Masalah Narkoba dan HIV/AIDS
1.13 . 22 . 02	dst...
<b>1.13 . 23</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan</b>
1.13 . 23 . 01	Bantuan Modal Usaha Dana Bergulir kepada Keluarga Miskin
1.13 . 23 . 02	Penyusunan Modul Pengembangan Wira Usaha Baru Modul Incubator Business Center (IBC) (Lanjutan)
1.13 . 23 . 03	Pelatihan Tenaga Kerja Keluarga Miskin
1.13 . 23 . 04	Pelayanan Tenaga Kerja Bagi Keluarga Miskin
1.13 . 23 . 05	Operasional Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan (Lanjutan)
1.13 . 23 . 06	Monitoring Cakupan Kerja Gakin Pasca Pelatihan (Lanjutan)
1.13 . 23 . 07	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja bagi Keluarga Miskin (Lanjutan)
1.13 . 23 . 08	Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Siswa yang Berasal dari Keluarga Miskin

1.13 . 23 . 09	Bantuan Modal Usaha Dana Bergulir kepada Keluarga Miskin (Subsidi)
<b>1.13 . 24</b>	<b>Program Penanggulangan Korban Bencana</b>
1.13 . 24 . 01	Penyediaan Buffer Stock bencana di Lampung Selatan
1.13 . 24 . 02	dst...
<b>1.13 . 25</b>	<b>Program Keluarga Harapan (PKH)</b>
1.13 . 25 . 01	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
1.13 . 25 . 02	dst...
<b>1.13 . 26</b>	<b>Program Pembinaan Sosial dan Pahlawan</b>
1.13 . 26 . 01	Pemberian Gelar Daerah Kepala Tokoh dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan
1.13 . 26 . 02	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
<b>1.14</b>	<b>Tenaga Kerja</b>
<b>1.14 . 15</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>
1.14 . 15 . 01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah
1.14 . 15 . 02	Pembangunan balai latihan kerja
1.14 . 15 . 03	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
1.14 . 15 . 04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
1.14 . 15 . 05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
1.14 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
1.14 . 15 . 07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK
1.14 . 15 . 08	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK
1.14 . 15 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.14 . 15 . 10	Pelatihan/BIMTEK Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14 . 15 . 11	Peningkatan Pelatihan Tenaga kerja
1.14 . 15 . 12	Pelatihan Tenaga Kerja di BLK
1.14 . 15 . 13	Pelatihan Kerja Sektor Informal untuk Penyandang Cacat
1.14 . 15 . 14	dst...
<b>1.14 . 16</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>
1.14 . 16 . 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1.14 . 16 . 02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1.14 . 16 . 03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan
1.14 . 16 . 04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1.14 . 16 . 05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
1.14 . 16 . 06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
1.14 . 16 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.14 . 16 . 08	Monitoring dan Evaluasi Keppres No.4/1980 tentang Wajib Lowongan kerja di PT dan Tenaga Asing
1.14 . 16 . 09	Monev UU No.4/1980 tentang wajib lapor lowongan kerja perusahaan, hubungan industrial dan syarat kerja
1.14 . 16 . 10	Pemagangan Nasional
1.14 . 16 . 11	JOB Market Fair (JMF) / Pameran Bursa Kerja
1.14 . 16 . 12	Menyusun Porpeksi Ketenagakerjaan lingkup Lokal dan Regional, Mengalisisasi dan Mengevaluasi dampak Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan terhadap Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja
1.14 . 16 . 13	Membuat Naskah / bentuk lainnya untuk penyebarluasan Informasi Pasar Kerja
1.14 . 16 . 14	Menyusun Pedoman Penuntun Jabatan Menyuluh dan Pelayanan Konsultasi Bimbingan Jabatan
1.14 . 16 . 15	Pembuatan Renstra Ketenagakerjaan
1.14 . 16 . 16	Informasi Pasar Kerja On-Line
1.14 . 16 . 17	Dana Pendamping Padat Karya Produktif
1.14 . 16 . 18	Dana Pendamping Padat Karya Infrastruktur
1.14 . 16 . 19	dst...
<b>1.14 . 17</b>	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>
1.14 . 17 . 01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
1.14 . 17 . 02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1.14 . 17 . 03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
1.14 . 17 . 04	Sosialisasi peraturan tentang ketenagakerjaan
1.14 . 17 . 05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1.14 . 17 . 06	Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
1.14 . 17 . 07	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
1.14 . 17 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.14 . 17 . 09	Pemeriksaan Pertama, Ulang/Berkala, Khusus/Kasus
1.14 . 17 . 10	Penyidikan Terhadap Perusahaan Yang Melanggar Peraturan Perundangan
1.14 . 17 . 11	Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
1.14 . 17 . 12	Audit SMK3 (Sistem Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Perusahaan
1.14 . 17 . 13	Pembekalan Ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
1.14 . 17 . 14	Pembinaan Kemitraan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha
1.14 . 17 . 15	Pembinaan Lembaga Kerjasama Bipartit
1.14 . 17 . 16	Persidangan/Pertemuan (LKS Tripartit, Tim Deteksi Dini, Dewan Pengupahan)
1.14 . 17 . 17	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit
1.14 . 17 . 18	Penyuluhan / Pemasyarakatan Hubungan Industrial
1.14 . 17 . 19	Penyuluhan Peran dan Fungsi SP/SB



1.14 . 17 . 20	Monitoring Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK), Upah Minimum Sektor Propinsi (UMSP)
1.14 . 17 . 21	Pembinaan Pembuatan PK,PP, PKB
1.14 . 17 . 22	Pemantauan dan Pengumpulan Data PHK Bipartit
1.14 . 17 . 23	Survey Pasar-pasar & Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (NHKL) dan UMK
1.14 . 17 . 24	Penertiban Perizinan
1.14 . 17 . 25	Pembinaan dan Perlindungan TKW dan Anak
1.14 . 17 . 26	Peningkatan Perlindungan Pekerja Wanita dan Anak
1.14 . 17 . 27	Peningkatan Perlindungan Pekerja Wanita dan Anak
1.14 . 17 . 28	BPJS Ketenagakerjaan (THLS)
1.14 . 18	<b>Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja</b>
1.14 . 18 . 01	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja (Lanjutan)
1.14 . 18 . 02	dst...
1.14 . 19	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja</b>
1.14 . 19 . 01	Bimtek Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (Lanjutan)
1.14 . 19 . 02	Peningkatan Tenaga Kerja Bidang Perhotelan (Lanjutan)
1.14 . 19 . 03	Peningkatan Tenaga Kerja Bidang Pramusaji (Lanjutan)
1.14 . 19 . 04	dst...
1.14 . 20	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan</b>
1.14 . 20 . 01	Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Keluarga Miskin
1.14 . 20 . 02	Bantuan Alat Keterampilan Kerja Secara Kelompok Bagi Penduduk Miskin
1.14 . 20 . 03	Operasional Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan (Lanjutan)
1.14 . 20 . 04	Monitoring Cakupan Kerja Gakin Pasca Pelatihan ( Lanjutan )
1.14 . 20 . 05	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Bagi Keluarga Miskin (Lanjutan)
1.14 . 20 . 06	dst...
1.14 . 22	<b>Program Penyelesaian Kasus-Kasus</b>
1.14 . 22 . 01	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja, Unjuk Rasa/Mogok Kerja
1.14 . 22 . 02	dst...
1.14 . 24	<b>Program Peningkatan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>
1.14 . 24 . 01	Pengujian Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
1.14 . 24 . 02	dst...
1.14 . 25	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan</b>
1.14 . 25 . 01	Aplikasi seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dan tata usaha umum (Lanjutan)
1.14 . 25 . 02	dst...
1.14 . 26	<b>Program Promosi Ketenagakerjaan</b>
1.14 . 26 . 01	Lomba Bidang Ketenagakerjaan dan Promosi Pembangunan
1.14 . 26 . 02	Promosi Pembangunan
1.14 . 27	<b>Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)</b>
1.14 . 27 . 01	Penciptaan Wira Usaha Baru Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
1.15	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>
1.15 . 15	<b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>
1.15 . 15 . 01	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
1.15 . 15 . 02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
1.15 . 15 . 03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 15 . 04	Pendirian unit penanganan pengaduan
1.15 . 15 . 05	Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional
1.15 . 15 . 06	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 15 . 07	Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah
1.15 . 15 . 08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 15 . 09	Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
1.15 . 15 . 10	Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 15 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
1.15 . 15 . 12	Diklat Management UKM
1.15 . 15 . 13	Monitoring dan evaluasi UKM penerima dana Program Pemerintah
1.15 . 15 . 14	Penilaian UKM Berprestasi
1.15 . 15 . 15	Pengembangan Wirausaha baru UKM
1.15 . 15 . 16	Promosi / pameran dagang UKM
1.15 . 15 . 17	Temu usaha kemitraan bagi UKM
1.15 . 15 . 18	Diklat Achievement Motivation Training (AMT) bagi UKM
1.15 . 15 . 19	Bazar bersama Industri Kerajinan UKM / IKM
1.15 . 15 . 20	Monitoring Dana Bergulir
1.15 . 16	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>
1.15 . 16 . 01	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
1.15 . 16 . 02	Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
1.15 . 16 . 03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 . 16 . 04	Peningkatan kerja sama dibidang HAKI
1.15 . 16 . 05	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi
1.15 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15 . 16 . 07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

1.15.16.08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.16.09	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan UMKM
1.15.16.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.15.16.11	Bimbingan Penyuluhan Anggota KUKM dan Dukungan Lomba Desa/UKS/P3KSS
1.15.16.12	Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam ( KSP/USP- Koperasi )
1.15.16.13	Pengembangan produk unggulan komoditi pisang
1.15.16.14	Pengembangan dan Pemasaran Produk Koperasi
1.15.16.15	Peningkatan Peran Koperasi Dalam Rangka Mendukung Produk Unggulan Kabupaten Lampung Selatan
1.15.16.16	Bimbingan Teknis Administrasi Kelompok dan UMKM
1.15.16.17	Pendataan Usaha Kecil Menengah
1.15.16.18	Sosialisasi Launching Peraturan Bupati dan Perpres Tahun 2014 tentang Perizinan UKM
1.15.16.19	Bimbingan Teknis UKM
1.15.16.20	Pelatihan bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah
1.15.16.21	Temu Usaha kemitraan Koprasi
1.15.16.22	Pemetaan dan Pendataan Koprasi
1.15.16.23	Bimbingan Teknis Perkoprasian
<b>1.15.17</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>
1.15.17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
1.15.17.02	Pengembangan klaster bisnis
1.15.17.03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
1.15.17.04	Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.17.06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.17.07	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah
1.15.17.08	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.17.09	Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
1.15.17.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.15.17.11	Dst.....
<b>1.15.18</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>
1.15.18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
1.15.18.02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
1.15.18.03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
1.15.18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
1.15.18.05	Perbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
1.15.18.06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
1.15.18.07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
1.15.18.08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi
1.15.18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.15.18.10	Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima dana Program Pemerintah
1.15.18.11	Magang Pengurus Koperasi
1.15.18.12	Penilaian Koperasi Berprestasi
1.15.18.13	Pengembangan Wirausaha Baru
1.15.18.14	Sosialisasi Pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris
<b>1.15.19</b>	<b>Program Peningkatan Industri Rumah tangga, Industri Kecil dan Menengah</b>
1.15.19.01	Inventarisasi dan Evaluasi Program Indagkop
1.15.19.02	Monitoring dan Evaluasi Industri (IKAH)
1.15.19.03	Monitoring dan Evaluasi Industri (ILMEA)
1.15.19.04	Monitoring dan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
1.15.19.05	Monitoring dan Evaluasi bagi UKM (Seksi UKM)
1.15.19.06	Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (Seksi Metrologi)
1.15.19.07	Pengawasan / Kontrol Tugas Kemetrolgian (Seksi Metrologi)
1.15.19.08	Pengawasan / Monitoring barang-Barang Parcel (Seksi Metrologi)
1.15.19.09	Penyuluhan Usaha Indagkop (Pejabat Fungsional)
1.15.19.10	Penyuluhan Usaha Kecil dan Koperasi
<b>1.15.20</b>	<b>Penguatan Kelembagaan Koperasi</b>
1.15.20.01	Koperasi On Line
1.15.20.02	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
1.15.20.03	Pemeringkatan Koperasi
1.15.20.04	Pokja Pembinaan Koperasi
1.15.20.05	Pembubaran, Penggabungan, Peleburan Badan Hukum Koperasi
1.15.20.06	Pelaksanaan Pekan Koperasi Kota Depok
1.15.20.07	Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi
1.15.20.08	Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi
1.15.20.09	Fasilitasi Kelembagaan Koperasi
1.15.20.10	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
<b>1.15.21</b>	<b>Peningkatan Kualitas SDM Koperasi</b>
1.15.21.01	Peningkatan Partisipasi Anggota
1.15.21.02	Pendidikan Kewirausahaan dan Kewirakoperasian/Perkoperasian
<b>1.15.22</b>	<b>Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan Koperasi</b>
1.15.22.01	Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi
<b>1.15.23</b>	<b>Penanggulangan Kemiskinan Terpadu</b>

1.15 . 23 . 01	Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi Kemiskinan dan P2WKSS
<b>1.16</b>	<b>Penanaman Modal</b>
<b>1.16 . 15</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>
1.16 . 15 . 01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
1.16 . 15 . 02	Pengembangan potensi unggulan daerah
1.16 . 15 . 03	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPD/T)
1.16 . 15 . 04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
1.16 . 15 . 05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
1.16 . 15 . 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
1.16 . 15 . 07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
1.16 . 15 . 08	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
1.16 . 15 . 09	Penyelenggaraan pameran investasi
1.16 . 15 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.16 . 15 . 11	Promosi dan Penanaman Modal
1.16 . 15 . 12	Pembinaan, Pengendalian PMA / PMDN dan Penyusunan LKPM
1.16 . 15 . 13	Sosialisasi Pengendalian PMA/PMDN dan Penyusunan LKPM
1.16 . 15 . 14	Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
<b>1.16 . 16</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>
1.16 . 16 . 01	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
1.16 . 16 . 02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
1.16 . 16 . 03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal
1.16 . 16 . 04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
1.16 . 16 . 05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
1.16 . 16 . 06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
1.16 . 16 . 07	Kajian Kebijakan penanaman modal
1.16 . 16 . 08	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal
1.16 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.16 . 16 . 10	Perkuatan Koperasi Dalam Rangka Mendukung Produk Unggulan Kabupaten Lampung Selatan
1.16 . 16 . 11	Penyusunan Naskah Akademik dan Perda Insentif Fiskal
<b>1.16 . 17</b>	<b>Program Penyetapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah</b>
1.16 . 17 . 01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
1.16 . 17 . 02	Pemetaan Potensi Sumber Daya Investasi
1.16 . 17 . 03	Pengadaan Sarana Prasarana Promosi dan Penanaman Modal
<b>1.16 . 18</b>	<b>Program Peningkatan Penanaman Modal</b>
1.16 . 18 . 01	Promosi investasi dan penanaman modal
1.16 . 18 . 02	Penyusunan potensi dan peluang investasi
1.16 . 18 . 03	Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)
<b>1.16 . 19</b>	<b>Program Peningkatan PAD di Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Perizinan</b>
1.16 . 19 . 01	Pembuatan Program Aplikasi SIM Perizinan Satu Pintu
1.16 . 19 . 02	Monitoring dan Pengawasan Perizinan Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha
1.16 . 19 . 03	Pembahasan terpadu tim teknis Dinas/Instansi tentang Perusahaan skala menengah dan besar yang mengajukan perizinan
1.16 . 19 . 04	Sosialisasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
1.16 . 19 . 05	Sosialisasi dan Pendataan Dokumen Perizinan dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
1.16 . 19 . 06	Revisi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan
1.16 . 19 . 07	Sosialisasi dan Pembinaan tentang Ketentuan Perizinan
1.16 . 19 . 08	Pendataan Izin Membangun Bangunan Milik Perusahaan
1.16 . 19 . 09	Monitoring, Evaluasi dan Penertiban Dokumen Perizinan kepada Pelaku Usaha di Wilayah Kab. Lampung Selatan
1.16 . 19 . 10	Pengelolaan Website Informasi di Bidang Perizinan dan Pengaduan
1.16 . 19 . 11	Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Masyarakat dan Pelaku Usaha (Penanaman Modal)
1.16 . 19 . 12	Sosialisasi tentang Pelayanan Perizinan
1.16 . 19 . 13	Koordinasi Pelayanan Perizinan
1.16 . 19 . 14	Monitoring, Evaluasi dan Penertiban Dokumen Perizinan kepada Pelaku Usaha
1.16 . 19 . 15	Pengelolaan Website Informasi di Bidang Perizinan dan Pengaduan
1.16 . 19 . 16	Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Masyarakat dan Pelaku Usaha (Penanaman Modal)
1.16 . 19 . 17	Sosialisasi tentang Pelayanan Perizinan, Informasi dan Penanganan Pengaduan
<b>1.16 . 20</b>	<b>Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Bidang Perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Merk dan Undang-undang Gangguan (Ho)</b>
1.16 . 20 . 01	Operasional Tim dan Sekretariat Tim Penegakan Perda dari Bidang Perizinan dilingkungan Pemerintah Kab Lampung Selatan
1.16 . 20 . 02	Pengacaraan Lintas sektor Perusahaan Skala Besar yang Mengajukan Perzinan
1.16 . 20 . 03	Registrasi Pembinaan Perekonomian Daerah
1.16 . 20 . 04	Pengelolaan Pelayanan Perizinan
1.16 . 20 . 05	Pembuatan Media Sadar Retribusi dan Peneng
1.16 . 20 . 06	Optimalisasi sarana kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (P2TSP) Kabupaten Lampung Selatan

1.16.20.07	Registrasi perekonomian daerah
1.17	<b>Kebudayaan</b>
1.17.15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>
1.17.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.17.15.02	Penatagunaan naskah kuno nusantara
1.17.15.03	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
1.17.15.04	Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
1.17.15.05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1.17.15.06	Pagelaran Pentas Seni Budaya di Dalam Daerah
1.17.15.07	Pagelaran Promosi Budaya di Luar Daerah
1.17.15.08	Pengembangan dan Pelestarian Sejarah Budaya Lampung Selatan
1.17.15.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
1.17.15.10	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1.17.15.11	Perekat Adat Budaya Lampung Selatan
1.17.15.12	Sosialisasi, Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung
1.17.15.13	Pengembangan dan aktualisasi adat budaya
1.17.16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>
1.17.16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1.17.16.02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
1.17.16.03	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1.17.16.04	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1.17.16.05	Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya dan Kepurbakalaan
1.17.16.06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1.17.16.07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah
1.17.16.08	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
1.17.16.09	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
1.17.16.10	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
1.17.16.11	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
1.17.16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
1.17.16.13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
1.17.16.14	Pembinaan SMP Terbuka
1.17.16.15	Dst.....
1.17.17	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>
1.17.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1.17.17.02	Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan
1.17.17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan
1.17.17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
1.17.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.17.17.06	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
1.17.17.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
1.17.17.08	Lomba Tari Daerah Tingkat Pelajar SLTP dan SLTA
1.17.17.09	Lomba Lagu Daerah Tingkat Pelajar SLTP dan SLTA
1.17.17.10	Festival Kompangan antar Kecamatan Se-Kabupaten Batang Hari
1.17.17.11	Festival Raja Basa Lampung Selatan
1.17.17.12	Lomba tari daerah dan lagu daerah
1.17.17.13	Lomba Kesenian Tradisional
1.17.18	<b>Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</b>
1.17.18.01	Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
1.17.18.02	Fasilitasi Ppembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah
1.17.18.03	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
1.17.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.17.18.05	Dst.....
1.18	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>
1.18.15	<b>Program Pengembangan dan Keserastan Kebijakan Pemuda</b>
1.18.15.01	Pendataan potensi kepemudaan
1.18.15.02	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
1.18.15.03	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
1.18.15.04	Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH
1.18.15.05	Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda
1.18.15.06	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
1.18.15.07	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
1.18.15.08	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
1.18.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.18.15.10	Dst.....
1.18.16	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>
1.18.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan
1.18.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
1.18.16.03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
1.18.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
1.18.16.05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
1.18.16.06	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
1.18.16.07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

1.18 . 16 . 08	Pameran prestasi hasil karya pemuda
1.18 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.18 . 16 . 10	Dialog Pemuda
1.18 . 16 . 11	Pertukaran Pemuda Antar Propinsi ( PPAP )
1.18 . 16 . 12	Masa Orientasi Siswa ( MOS )
1.18 . 16 . 13	Pelatihan pelatih PASKRIBAKA
1.18 . 16 . 14	Temu Karya Siswa
1.18 . 16 . 15	Pengadaan Alat Studio
1.18 . 16 . 16	Pelatihan Manajemen Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna
1.18 . 16 . 17	Seleksi dan pengiriman peserta PASKIBRAKA ke tingkat Provinsi dalam rangka HUT RI
1.18 . 16 . 18	Pembinaan Pemuda Pelopor/Mandiri melalui Organisasi Kepemudaan
1.18 . 16 . 19	Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
1.18 . 16 . 20	Fasilitasi dan Monitoring Pasca Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3)
1.18 . 16 . 21	Bhakti Pemuda Antar Propinsi ( BPAP )
1.18 . 16 . 22	Pelatihan Ketrampilan Pemuda Perdesaan
1.18 . 16 . 23	Penguohan Purna Paskibraka Indonesia (PPPI)
<b>1.18 . 17</b>	<b><i>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</i></b>
1.18 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.18 . 17 . 02	Pelatihan keterampilan bagi pemuda
1.18 . 17 . 03	Dst.....
<b>1.18 . 18</b>	<b><i>Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba</i></b>
1.18 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
1.18 . 18 . 02	Dst...
<b>1.18 . 19</b>	<b><i>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga</i></b>
1.18 . 19 . 01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
1.18 . 19 . 02	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi
1.18 . 19 . 03	pengembangan perencanaan olahraga terpadu
1.18 . 19 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
1.18 . 19 . 05	Pembinaan manajemen organisasi olahraga
1.18 . 19 . 06	Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
1.18 . 19 . 07	Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga
1.18 . 19 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.18 . 19 . 09	Dst.....
<b>1.18 . 20</b>	<b><i>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</i></b>
1.18 . 20 . 01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
1.18 . 20 . 02	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
1.18 . 20 . 03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1.18 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 20 . 05	Liga Pendidikan Indonesia
1.18 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.18 . 20 . 07	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
1.18 . 20 . 08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
1.18 . 20 . 09	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga
1.18 . 20 . 10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
1.18 . 20 . 11	Pengembangan olahraga rekreasi
1.18 . 20 . 12	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.18 . 20 . 13	Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
1.18 . 20 . 14	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
1.18 . 20 . 15	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
1.18 . 20 . 16	Lomba O2SN SMA, SMK dan pengiriman atlet ke tingkat Propinsi
1.18 . 20 . 17	Lomba O2SN, SMP, SMA dan pengiriman atlet prestasi ke tingkat Propinsi dan Nasional
1.18 . 20 . 18	Olahraga Usia Dini ( Pelajar Tingkat Sekolah Dasar / SD )
1.18 . 20 . 19	Pekan Olahraga Cacat Daerah ( PORCADA ) dan Porcaprop ( Pekan Olahraga Caca Propinsi )
1.18 . 20 . 20	Olahraga Tradisional
1.18 . 20 . 21	Pelatih Wasit Olahraga Volley Ball
1.18 . 20 . 22	Pemberian Bantuan Peralatan Olahraga
1.18 . 20 . 23	Pengadaan Komputer
1.18 . 20 . 24	Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar/Kejuaraan Daerah Pelajar dan Pengiriman Atlet ke Tingkat Propinsi
1.18 . 20 . 25	Kegiatan Olahraga dalam Rangka HUT Lampung Selatan
1.18 . 20 . 26	Pekan Olahraga Guru dan Karyawan (PORGUKAR) TK.Kabupaten
1.18 . 20 . 27	Seleksi Paskibraka dalam Rangka Memperingati HUT RI dan Pengiriman Peserta
1.18 . 20 . 28	Kegiatan Upacara
1.18 . 20 . 29	Seleksi Duta Pemuda TK.Kabupaten dan Pengiriman Pemuda
1.18 . 20 . 30	Pengadaan Peralatan Kantor dan Komputer
1.18 . 20 . 31	Kompetisi Olahraga Pelajar Tingkat SD, SMP, SMA/SMK se- Kabupaten Lampung Selatan
1.18 . 20 . 32	Lomba O2SN SD dan O2SN SMP dan Pengiriman Atlet ke Tingkat Propinsi
1.18 . 20 . 33	Lomba O2SN, SMP dan Pengiriman Atlet ke Tingkat Propinsi
1.18 . 20 . 34	Lomba O2SN, SMA, SMK dan Pengiriman Atlet ke Tingkat Propinsi
1.18 . 20 . 35	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
1.18 . 20 . 36	Pelatihan Juri dan Wasit
1.18 . 20 . 37	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Rekreasi (Lomba Senam Poco-Poco)
1.18 . 20 . 38	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah (Pelatihan Senam Siger 17 Kecamatan)
1.18 . 20 . 39	Pembinaan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) di 17 Kecamatan

1.18 . 20 . 40	Pembinaan Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI)
1.18 . 20 . 41	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat (Pelatihan Atlit dalam rangka Persiapan PORPROV)
1.18 . 20 . 42	Kompetisi Olahraga Atletik
1.18 . 20 . 43	Kompetisi Olahraga Pencak Silat
1.18 . 20 . 44	Kompetisi Olahraga Kejuaraan Pelajar Daerah (KEJURDA)
1.18 . 20 . 45	Pembinaan Cabang Olahraga di Tingkat Daerah
1.18 . 20 . 46	Kegiatan PORPROV
1.18 . 20 . 47	Sosialisasi Senam Kesegaran Jasmani
1.18 . 20 . 48	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan
1.18 . 20 . 49	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga tingkat Kabupaten
1.18 . 20 . 50	Lomba Gerak Jalan Sehat
<b>1.18 . 21</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>
1.18 . 21 . 01	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.18 . 21 . 02	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.18 . 21 . 03	Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
1.18 . 21 . 04	Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
1.18 . 21 . 05	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
1.18 . 21 . 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga SMA
1.18 . 21 . 07	Persiapan Pengembangan Struktur UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18 . 21 . 08	Operasional UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga
<b>1.18 . 22</b>	<b>Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga</b>
1.18 . 22 . 01	Pembangunan Gedung Olah Raga
1.18 . 22 . 02	Penyelesaian Gedung Olah Raga
1.18 . 22 . 03	Pengadaan Scoring Board Gedung Olah Raga/Dome
1.18 . 22 . 04	Site Development GOR
1.18 . 22 . 05	Pembangunan Aula Graha Pemuda KNPI
1.18 . 22 . 06	Pembangunan Stadion Balikpapan
1.18 . 22 . 07	Pembangunan Lapangan Tennis
1.18 . 22 . 08	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat
1.18 . 22 . 09	Aksi Pramuka Peduli Karya Bhakti Lebaran
1.18 . 22 . 10	Kegiatan Seminar Undang-Undang No.40 Tahun 2009
1.18 . 22 . 11	Pengukuhan Purna Paslabraka Indonesia (PPI)
1.18 . 22 . 12	Pembinaan dan Pelatihan Karang Taruna se-Kabupaten Lampung Selatan
1.18 . 22 . 13	Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka (PERANSAKA)
1.18 . 22 . 14	Pengiriman Kontingen Cabang dalam Rangka Raimuna Nasional X
1.18 . 22 . 15	Sidang Paripurna Cabang dan Rapat Kerja Cabang
1.18 . 22 . 16	Lomba Tingkat III Regu Pramuka Penggalang
1.18 . 22 . 17	Pengiriman Kontingen Cabang dalam rangka Lomba Tingkat IV Regu Pramuka Penggalang
1.18 . 22 . 18	Pelatihan Pembina Pramuka Mahir Lanjutan
1.18 . 22 . 19	Gladian Pimpinan Satuan
1.18 . 22 . 20	Fasilitasi Fungsi Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Selatan
1.18 . 22 . 21	Kegiatan Pelatihan Survey
1.18 . 22 . 22	Kegiatan Donor Darah
1.18 . 22 . 23	Sosialisasi Sadar Hukum Pengurus KNPI Se-Kabupaten Lampung Selatan
1.18 . 22 . 24	Pelatihan Koperasi Anggota KNPI Lampung Selatan
1.18 . 22 . 25	Musyawarah Daerah dan Pelantikan KNPI
1.18 . 22 . 26	Fasilitasi dan Monitoring Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3)
1.18 . 22 . 27	Sosialisasi Pengurus KNPI Kabupaten Lampung Selatan
1.18 . 22 . 28	Karang Pamitran Pembina Pramuka Gelombang I
1.18 . 22 . 29	Karang Pamitran Pembina Pramuka Gelombang II
1.18 . 22 . 30	Pesta Pramuka Siaga
1.18 . 22 . 31	Jambore Cabang Pramuka Penggalang
1.18 . 22 . 32	Giat Prestasi Pramuka Penegak dan Pandega
1.18 . 22 . 33	Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD)
1.18 . 22 . 34	Pelatihan Kewirausahaan
1.18 . 22 . 35	Perkemahan Wirakarya
1.18 . 22 . 36	Muspaniteracab dan Muscab ke XIII
1.18 . 22 . 37	Pengiriman Kontingen cabang Jambore Nasional Tahun 2016
1.18 . 22 . 38	Pendataan potensi kepemudaan (KNPI)
<b>1.18 . 23</b>	<b>Program Pembinaan Kepramukaan Kwartir Cabang Lampung Selatan</b>
1.18 . 23 . 01	Operasional Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Selatan
1.18 . 23 . 02	Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)
1.18 . 23 . 03	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kewirausahaan
1.18 . 23 . 04	Kursus Orientasi Pimpinan Satuan Karya Cabang
1.18 . 23 . 05	Aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran
1.18 . 23 . 06	Kirab Tunas Kelapa
1.18 . 23 . 07	Raimuna Cabang Pramuka Penegak dan Pandega
1.18 . 23 . 08	Sidparcab Pramuka Penegak/Pandega dan Rapat Kerja
1.18 . 23 . 09	Partisipasi Kegiatan Tingkat Daerah/Nasional
1.18 . 23 . 10	Kursus Orientasi Singkat Majelis Pembimbingan dan Andalan
1.18 . 23 . 11	Pitran Pelatih Pembina Pramuka
1.18 . 23 . 12	Lomba Keterampilan Kepramukaan (LKK) Pramuka Penggalang
1.18 . 23 . 13	Dst...
<b>1.19</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>
<b>1.19 . 15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>
1.19 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kermanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 15 . 02	Pembangunan pos jaga/ ronda

1.19 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 15 . 04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
1.19 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19 . 15 . 07	Pembinaan Anggota Linmas Lomba Desa
1.19 . 15 . 08	Pembinaan Anggota Linmas Lomba P3KSS
1.19 . 15 . 09	Pelatihan dan Pembekalan Anggota Linmas
1.19 . 15 . 10	Pengawasan Bangunan, lahan dan penertiban umum di kelurahan
1.19 . 15 . 11	Patroli wilayah kecamatan
1.19 . 15 . 12	Petugas Polisi Bangunan, lahan dan lingkungan
1.19 . 15 . 13	Pembinaan Mental Rohani
1.19 . 15 . 14	Simulasi Penanganan Bencana Banjir Model 3 Tungku
1.19 . 15 . 15	Monitoring / pemantauan masalah yang berkembang dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi Kabupaten Lampung Selatan
1.19 . 15 . 16	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/ POLRI
1.19 . 15 . 17	Silaturahmi Anggota Linmas se Kabupaten Lampung Selatan
1.19 . 15 . 18	Dialog dan Komunikasi antara Pemerintah dengan LSM dan Ormas
1.19 . 15 . 19	Penitia Seleksi Penambahan Personalia Anggota Polisi Pamong Praja
1.19 . 15 . 20	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) untuk 17 Kecamatan
1.19 . 15 . 21	Sosialisasi dan Pembekalan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM )
1.19 . 15 . 22	Pelatihan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat (Linmas) Desa
1.19 . 15 . 23	Pendukung Operasional Pemilu Legislatif
1.19 . 15 . 24	Pengamanan Jalannya Pemilu Presiden
1.19 . 15 . 25	Pengamanan Jalannya Pemilihan Gubernur
1.19 . 15 . 26	Pelatihan Dalmas PHH ( Penanganan Huru Hara )
1.19 . 15 . 27	Pemantauan kegiatan orang asing (NGO)
1.19 . 15 . 28	Operasional Pencegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
1.19 . 15 . 29	Pelatihan Satuan LINMAS Desa
1.19 . 15 . 30	Pendukung pengamanan Pemilu
1.19 . 15 . 31	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
1.19 . 15 . 32	Pengawasan dan Pengamanan Pejabat dan Tamu VVIP
1.19 . 15 . 33	Pengamanan aset - aset Daerah (piket)
1.19 . 15 . 34	Pengamanan dan Pengendalian Massa (dalmas)
1.19 . 15 . 35	Patroli Siaga
<b>1.19 . 16</b>	<b><i>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</i></b>
1.19 . 16 . 01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1.19 . 16 . 02	Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dan teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 16 . 03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan
1.19 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwarkarsa di daerah
1.19 . 16 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19 . 16 . 06	Penyuluhan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Terhadap Masyarakat
1.19 . 16 . 07	Penertiban Gubuk-Gubuk Liar disepanjang Damija
1.19 . 16 . 08	Pelatihan PPNS Anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan
1.19 . 16 . 09	Peningkatan Jiwa Kesamaptaan Anggota Polisi Pamong Praja
1.19 . 16 . 10	Operasi Gerakan Disiplin Nasional
1.19 . 16 . 11	Penambahan Peralatan Drum Band dan Kooraik Anggota Polisi Pamong Praja
1.19 . 16 . 12	Operasi razia reklame, spanduk dan sejenis
1.19 . 16 . 13	Operasi penertiban anak jalanan (ANJAL) / GEPENG
1.19 . 16 . 14	Operasi penertiban gelandangan psikotik (Orang Gila)
1.19 . 16 . 15	Pelatihan Pengembangan Anggota POL PP dengan TNI/POLRI
1.19 . 16 . 16	Dst...
<b>1.19 . 17</b>	<b><i>Program pengembangan wawasan kebangsaan</i></b>
1.19 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 17 . 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
1.19 . 17 . 03	Peningkatan Kcsadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Budaya Bangsa
1.19 . 17 . 04	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Propinsi
1.19 . 17 . 05	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
1.19 . 17 . 06	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten
1.19 . 17 . 07	Pentas Seni dan Budaya, Festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1.19 . 17 . 08	Pelestarian Idiologi Bangsa dan Negara
1.19 . 17 . 09	Oprasional Tim Penanganan Kerukunan Antar Umat Beragama
1.19 . 17 . 10	Tim oprasional pendidikan wawasan
1.19 . 17 . 11	Pengembangan Informasi Publik ( WEBSITE ) Sat POL PP Kabupaten Lam Sel.
1.19 . 17 . 12	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
1.19 . 17 . 13	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
1.19 . 17 . 14	Sosialisasi dan pengukuhan Adat Lampung
<b>1.19 . 18</b>	<b><i>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</i></b>
1.19 . 18 . 01	Pameran promosi pembangunan Tk. Propinsi
1.19 . 18 . 02	Pameran promosi pembangunan Tk. Kabupaten
1.19 . 18 . 03	Sosialisasi dan Diskusi Wawasan Kebangsaan
1.19 . 18 . 04	Sosialisasi Permendagri No. 08 dan 09 Tahun 2006
1.19 . 18 . 05	Sosialisasi PERMENDAGRI NO 33 TAHUN 2012
1.19 . 18 . 06	Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Selatan
1.19 . 18 . 07	Perubahan Lambang Daerah
1.19 . 18 . 08	Perubahan Nama Rumah Sakit
1.19 . 18 . 09	Perubahan Nama-Nama Jalan

1.19 . 18 . 10	Sosialisasi Forum Komunikasi antar Tokoh Adat, Agama dan Masyarakat
1.19 . 18 . 11	Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran ORMAS dan LSM
1.19 . 18 . 12	Pembinaan Forum Komunikasi Keamanan Tokoh Adat, Agama dan Masyarakat
1.19 . 18 . 13	Pembinaan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat
1.19 . 18 . 14	Bimtek Keormasan
1.19 . 18 . 15	Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Ormas, LSM, dan bantuan Ormas
1.19 . 18 . 16	Sosialisasi Forum pembauran bangsa
1.19 . 18 . 17	Sosialisasi dan diskusi bela negara
1.19 . 18 . 18	Monitoring dan Evaluasi (Tim Koordinasi pileg dan pilpres)
1.19 . 18 . 19	Penertiban banner, spanduk, stiker caleg dan capres dan cawapres serta bendera partai politik
1.19 . 18 . 20	Sosialisasi pemilu melalui media masa, elektronik dan spanduk
1.19 . 18 . 21	Sosialisasi Undang - undang nomor 17 tahun 2013
1.19 . 18 . 22	Sosialisasi dan Pembentukan tim pembauran bangsa
1.19 . 18 . 23	Pendaftaran, Pendaftaran dan verifikasi bantuan ormas
1.19 . 18 . 24	Monitoring dan pendataan seni dan budaya
<b>1.19 . 19</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>
1.19 . 19 . 01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
1.19 . 19 . 02	Forum Diskusi Politik Inteligen Daerah (KOMINDA)
1.19 . 19 . 03	Penyuluhan Kepada Masyarakat
1.19 . 19 . 04	Verifikasi Bantuan Parpol
1.19 . 19 . 05	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19 . 19 . 06	Dialog dan Komunikasi antara Pemerintah dengan LSM dan ORMAS
1.19 . 19 . 07	Dst...
<b>1.19 . 20</b>	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>
1.19 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
1.19 . 20 . 02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
1.19 . 20 . 03	Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu
1.19 . 20 . 04	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
1.19 . 20 . 05	Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan
1.19 . 20 . 06	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
1.19 . 20 . 07	Penegakan Peraturan Daerah Melalui Operasi Bersama Dinas Terkait
1.19 . 20 . 08	Peningkatan Kesamaptan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
1.19 . 20 . 09	Sosialisasi Kegiatan PFNS
1.19 . 20 . 10	Penegakan Peraturan Daerah pada Badan Usaha
1.19 . 20 . 11	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
<b>1.19 . 21</b>	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>
1.19 . 21 . 01	Penyuluhan kepada masyarakat
1.19 . 21 . 02	Koordinasi Forum Diskusi Politik
1.19 . 21 . 03	Pembiayaan Tim Koordinator dukungan kelancaran pelaksanaan Pilkada Lampung Selatan
1.19 . 21 . 04	Penyusunan data base partai politik dan Ormas
1.19 . 21 . 05	Dialog politik dan pembangunan bagi kaum perempuan
1.19 . 21 . 06	DESK pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.19 . 21 . 07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.19 . 21 . 08	Penyuluhan Kepada Masyarakat (UU Politik)
1.19 . 21 . 09	Verifikasi Bantuan Parpol
1.19 . 21 . 10	Sosialisasi Politik Kepada Masyarakat
1.19 . 21 . 11	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pileg dan Pilpres
1.19 . 21 . 12	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
1.19 . 21 . 13	Penanganan Konflik Sosial
1.19 . 21 . 14	Tim terpadu penanganan dan keamanan dalam negeri / rencana aksi
1.19 . 21 . 15	Dst...
<b>1.19 . 22</b>	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>
1.19 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1.19 . 22 . 02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
1.19 . 22 . 03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
1.19 . 22 . 04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
1.19 . 22 . 05	Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Anggota Satlak PB dan Petugas Operasional Desa
1.19 . 22 . 06	Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana
1.19 . 22 . 07	Sosialisasi dan Penyuluhan Bencana Alam
1.19 . 22 . 08	Operator Posko Penanggulangan Bencana
1.19 . 22 . 09	Pengendalian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1.19 . 22 . 10	Rapat Koordinasi Anggota Satgas Komunikasi Penanggulangan Bencana
1.19 . 22 . 11	Pemetaan Daerah Rawan Bencana
1.19 . 22 . 12	Optimalisasi SATGAS komunikasi Penanggulangan Bencana
1.19 . 22 . 13	Pelatihan Dasar Manajemen Pengurangan Resiko Bencana
1.19 . 22 . 14	Simulasi Penanggulangan Bencana
1.19 . 22 . 15	Pembangunan Jalur Evakuasi
1.19 . 22 . 16	Sosialisasi dan Penyuluhan Pra Bencana
1.19 . 22 . 17	Penyusunan profil BPBD
1.19 . 22 . 18	Sosialisasi pengurangan resiko bencana
1.19 . 22 . 19	Penyusunan peta jalur evakuasi Tsunami
1.19 . 22 . 20	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Daerah potensi rawan bencana
1.19 . 22 . 21	Dst ...
<b>1.19 . 23</b>	<b>Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan</b>
1.19 . 23 . 01	Melaksanakan Pkct Pos Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Posko PBP)



1.19 . 23 . 02	Komunitas Intejejen Daerah (Kominda)
1.19 . 23 . 03	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pertemuan Silaturahmi Paguyuban
1.19 . 23 . 04	Monitoring Kondisi Politik Kota Pra Pilgub Kaltim 2008
1.19 . 23 . 05	Pendataan Eks. G.30 S.PKI
1.19 . 23 . 06	Koordinasi Antisipasi Keamanan Kota
1.19 . 23 . 07	Dst...
<b>1.19 . 24</b>	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>
1.19 . 24 . 01	Pengendalian Penanggulangan Bencana
1.19 . 24 . 02	Dst...
<b>1.19 . 25</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>
1.19 . 25 . 01	Sosialisasi dan penyuluhan pasca Bencana
1.19 . 25 . 02	Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
1.19 . 25 . 03	Inventarisasi dan Identifikasi Kerugian, Kerusakan Pasca Bencana
1.19 . 25 . 04	Monitoring dan evaluasi pasca bencana
1.19 . 25 . 05	Dst ...
<b>1.20</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian</b>
1.20 . 15	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>
1.20 . 15 . 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1.20 . 15 . 02	Hearing Dialog dan Komunikasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama
1.20 . 15 . 03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1.20 . 15 . 04	Rapat-Rapat Paripurna
1.20 . 15 . 05	Kegiatan Reses
1.20 . 15 . 06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
1.20 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1.20 . 15 . 08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 15 . 09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
1.20 . 15 . 10	Belanja kegiatan penunjang operasional pimpinan DPRD
1.20 . 15 . 11	dst ...
<b>1.20 . 16</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>
1.20 . 16 . 01	Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
1.20 . 16 . 02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Deparemen/Lembaga/Non Departemen
1.20 . 16 . 03	Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
1.20 . 16 . 04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
1.20 . 16 . 05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20 . 16 . 06	Koordinasi dengan pemerintah pusat pemerintah daerah lainnya
1.20 . 16 . 07	Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah
1.20 . 16 . 08	Fasilitasi, Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah, Luar Negeri, Pihak ketiga dan Lembaga Internasional
1.20 . 16 . 09	Briefing Pejabat Pemerintah Daerah
1.20 . 16 . 10	Pelayanan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20 . 16 . 11	Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( APKASI )
1.20 . 16 . 12	Rapat Koordinasi Teknis Wilayah
1.20 . 16 . 13	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Luar Provinsi
1.20 . 16 . 14	Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Lembaga
1.20 . 16 . 15	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
1.20 . 16 . 16	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 16 . 17	Workshop Otonomi Daerah
1.20 . 16 . 18	Pemekaran Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 16 . 19	Penyusunan Perda tentang Tata cara kerjasama daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 16 . 20	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati Lampung Selatan
1.20 . 16 . 21	Monitoring Pelaksanaan Kerjasama Daerah
1.20 . 16 . 22	Fasilitasi dan Dukungan Staf Ahli dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan
<b>1.20 . 17</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>
1.20 . 17 . 01	Penyusunan analisis standar belanja
1.20 . 17 . 02	Penyusunan Standar Satuan Harga
1.20 . 17 . 03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
1.20 . 17 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 17 . 05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
1.20 . 17 . 06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
1.20 . 17 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
1.20 . 17 . 08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
1.20 . 17 . 09	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.20 . 17 . 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 17 . 11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 17 . 12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah/Penyusunan Laporan Triwulan
1.20 . 17 . 13	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 17 . 14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 17 . 15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 17 . 16	Peningkatan manajemen barang aset daerah

1.20.17.17	Peningkatan manajemen investasi daerah
1.20.17.18	Revaluasi appraisal aset/barang daerah
1.20.17.19	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1.20.17.20	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Kabupaten
1.20.17.21	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1.20.17.22	Penyusunan laporan mutasi barang
1.20.17.23	Penatausahaan Administrasi Keuangan
1.20.17.24	Evaluasi dan Monitoring SPJ Bendahara
1.20.17.25	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah
1.20.17.26	Asistensi penyusunan neraca akhir
1.20.17.27	Penyusunan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD
1.20.17.28	Penyusunan laporan triwulanan
1.20.17.29	Pengembangan Sistem Administrasi Kas Daerah
1.20.17.30	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1.20.17.31	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran
1.20.17.32	Penyusunan sistem informasi LPPD dan ILPPD Kabupaten Lampung Selatan
1.20.17.33	Peningkatan SDM Pengelolaan Pembangunan Daerah
1.20.17.34	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kas Daerah
1.20.17.35	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan
1.20.17.36	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
1.20.17.37	Sensus dan Penilaian ASET
1.20.17.38	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.20.17.39	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi
1.20.17.40	Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1.20.17.41	Koordinasi Pengendalian dan Pemantauan DAK
1.20.17.42	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lampung Selatan
1.20.17.43	Pembinaan Jasa Konstruksi
1.20.17.44	Penyusunan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah
1.20.17.45	Verifikasi dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan
1.20.17.46	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah
1.20.17.47	Monitoring Dan Evaluasi Penerimaan Pajak-Pajak Daerah
1.20.17.48	Koordinasi dan Sosialisasi Percepatan Pembangunan
1.20.17.49	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
1.20.17.50	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
1.20.17.51	Pemutahiran Data Wajib Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Evaluasi Penerimaan PPJU Wilayah Kabupaten Lampung Selatan
1.20.17.52	Bulan Bakti/Bulan Panutan PBB Kabupaten Lampung Selatan
1.20.17.53	Penyusunan Pelaporan Pajak-Pajak Daerah
1.20.17.54	Koordinasi dan Monitoring PNPM-MP/RIS-PNPM
1.20.17.55	Publikasi Iklan Layanan Masyarakat Tentang Sadar Pajak Daerah
1.20.17.56	Operasional Unit Layanan Pengadaan
1.20.17.57	Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.17.58	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
1.20.17.59	Penyusunan Peraturan KDH tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Lampung Selatan
1.20.17.60	Pelatihan Aparatur Pengelola Keuangan SKPD tentang Tata Usaha Keuangan Daerah
1.20.17.61	Asistensi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.17.62	Seminar Capaian Program Pembangunan
1.20.17.63	Konsolidasi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Sekretariat
1.20.17.64	Penatausahaan dan Kearsipan Keuangan Sekretariat
1.20.17.65	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat
1.20.17.66	Koordinasi Pengendalian Administrasi Keuangan dan Aset Pemerintah Pusat di Kabupaten Lampung Selatan
1.20.17.67	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga
1.20.17.68	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal
1.20.17.69	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayaan/Aset Daerah
1.20.17.70	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.20.17.71	Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk persiapan pendaerahan PBB P2
1.20.17.72	Pendampingan Pendaerahan PBB
1.20.17.73	Sosialisasi Penatausahaan Administrasi Keuangan pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten
1.20.17.74	Penertiban Barang Milik Daerah
1.20.17.75	Infrastruktur Jaringan Pengelolaan PBB
1.20.17.76	Sistem Informasi Manajemen PBB
1.20.17.77	Modifikasi dan Implementasi Aplikasi Sismiop PBB
1.20.17.78	Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
1.20.17.79	Analisa Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.20.17.80	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah
1.20.17.81	Pembinaan PPTK dan Pembantu PPTK Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.20.17.82	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
1.20.17.83	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Secara Elektronik
1.20.17.84	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.20.17.85	Penghapusan Barang Milik Daerah
1.20.17.86	Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
1.20.17.87	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kas Daerah
1.20.17.88	Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
1.20.17.89	Penatausahaan Barang Milik Daerah
1.20.17.90	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah
1.20.17.91	Penelusuran Barang Milik Daerah

1.20 . 17 . 92	Sistem Monitoring Pengelolaan Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran
1.20 . 17 . 93	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
1.20 . 17 . 94	Cetak dan Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1.20 . 17 . 95	Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
1.20 . 17 . 96	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.20 . 17 . 97	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)
1.20 . 17 . 98	Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 17 . 99	Penatausahaan Surat Penyediaan Dana
1.20 . 17 . 100	Penatausahaan Dana Bagi Hasil
1.20 . 17 . 101	Penatausahaan Dana Cadangan
1.20 . 17 . 102	Penatausahaan Pinjaman Daerah
1.20 . 17 . 103	Pemutakhiran Data PBB-P2 dan Pendataan Individual Objek Pajak PBB-P2 Golongan 4 dan 5
1.20 . 17 . 104	Sosialisasi Dalam Rangka Meningkatkan PBB
1.20 . 17 . 105	Penyusunan dan Sosialisasi Perbup tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Berbasis Teknologi Informasi
1.20 . 17 . 106	Pelaksanaan Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1.20 . 17 . 107	Pengelolaan PBB dan Pembukuan Penerimaan Pajak PBB P2
1.20 . 17 . 108	Bimbingan Teknis Penyusunan HPS dan Kontrak
1.20 . 17 . 109	Koordinasi dan Monitoring BUMD PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 17 . 110	Optimalisasi Peningkatan Potensi Pajak Air Tanah
<b>1.20 . 18</b>	<b>Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>
1.20 . 18 . 01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten
1.20 . 18 . 02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten
1.20 . 18 . 03	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten
1.20 . 18 . 04	Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten
1.20 . 18 . 05	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten
1.20 . 18 . 06	Bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintahan
1.20 . 18 . 07	dst ...
<b>1.20 . 19</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</b>
1.20 . 19 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
1.20 . 19 . 02	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
1.20 . 19 . 03	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
<b>1.20 . 20</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal &amp; Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>
1.20 . 20 . 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1.20 . 20 . 02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
1.20 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 20 . 04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
1.20 . 20 . 05	Inventarisasi Hasil Pengawasan
1.20 . 20 . 06	Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
1.20 . 20 . 07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dalam penyelenggaraan dan ketertiban umum
1.20 . 20 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1.20 . 20 . 09	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan APBD Bid. PU, Pendidikan dan Kesehatan
1.20 . 20 . 10	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu RKA
1.20 . 20 . 11	Kormonev Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 20 . 12	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi
1.20 . 20 . 13	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
1.20 . 20 . 14	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP Ekstern Lainnya
1.20 . 20 . 15	Pembuatan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Pengawasan
1.20 . 20 . 16	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
1.20 . 20 . 17	Penelitian dan Penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 20 . 18	Inventarisasi Data Alamat Tempat Tinggal Pejabat Eselon II, III, IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 20 . 19	Monitoring Disiplin Kerja PNS se-Lampung Selatan
1.20 . 20 . 20	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
1.20 . 20 . 21	Sosialisasi Laporan Pajak-pajak Pribadi dan Workshop PERMENPAN 60 Tahun 2012
1.20 . 20 . 22	Sosialisasi Pengawasan SKPD di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 20 . 23	dst...
<b>1.20 . 21</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa &amp; Aparatur Pengawasan</b>
1.20 . 21 . 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20 . 21 . 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
1.20 . 21 . 03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20 . 21 . 04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.20 . 21 . 05	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan di lingkungan Inspektorat Kab. Lamsel
1.20 . 21 . 06	Bimbingan Teknis Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah dan Bimtek Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 21 . 07	Pelatihan Teknis Penyusunan LHP, PKP, KKP Aparatur Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Lampung Selatan
1.20 . 21 . 08	Pelatihan Mekanisme Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.20 . 21 . 09	Pelatihan Komputer Dalam Menunjang LHP dan Admin Perkantoran

<b>1.20 . 22</b>	<b>Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>
1.20 . 22 . 01	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem prosedur pengawasan
1.20 . 22 . 02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1.20 . 22 . 03	dst...
<b>1.20 . 23</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi</b>
1.20 . 23 . 01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1.20 . 23 . 02	Pembuatan buku register administrasi pemerintahan Kecamatan dan papan data/bank data Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 23 . 03	Inventarisasi dan Pembakuan Toponimi Nama-Nama Unsur Rupa Bumi
1.20 . 23 . 04	Pelacakan, Penyelesaian, Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 23 . 05	dst...
<b>1.20 . 24</b>	<b>Program pengintensifikasikan penanganan pengaduan masyarakat</b>
1.20 . 24 . 01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
1.20 . 24 . 02	Pembentukan unit khusus pengaduan masyarakat di bidang pertanahan
1.20 . 24 . 03	Fasilitasi Pengaduan dan Pembinaan Masyarakat oleh FOKORPIMCAM
1.20 . 24 . 04	Mediasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 24 . 05	dst...
<b>1.20 . 25</b>	<b>Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah</b>
1.20 . 25 . 01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
1.20 . 25 . 02	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
1.20 . 25 . 03	Fasilitas pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum
1.20 . 25 . 04	Fasilitasi pembentukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
1.20 . 25 . 05	dst...
<b>1.20 . 26</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>
1.20 . 26 . 01	Koordinasi kerjasama permasalahan perundang-undangan
1.20 . 26 . 02	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah
1.20 . 26 . 03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1.20 . 26 . 04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20 . 26 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 26 . 06	Kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan-undangan daerah
1.20 . 26 . 07	Penyuluhan Hukum Terpadu, Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum
1.20 . 26 . 08	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum
1.20 . 26 . 09	Pendidikan dan pelatihan implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 26 . 10	Pembuatan katalogisasi dan abstrak peraturan perundang-undangan
1.20 . 26 . 11	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan
1.20 . 26 . 12	Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan pertanahan dalam rangka tertib administrasi pertanahan
1.20 . 26 . 13	Publikasi peraturan perundang-undangan tentang kode wilayah administrasi pertanahan
1.20 . 26 . 14	Pembinaan Kadarkum dalam rangka lomba desa/P3KSS penyelesaian sengketa hukum dan inventarisasi data PPNS
1.20 . 26 . 15	Pembinaan Desa Sadar Hukum Dan Kadarkum Dalam Rangka Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi
1.20 . 26 . 16	Legislasi Daerah
1.20 . 26 . 17	Konsultasi dan Bantuan Hukum Pihak Ketiga
1.20 . 26 . 18	Pembina dan Tim Kuasa Hukum
1.20 . 26 . 19	Pengkajian dan Penelaahan Hukum
1.20 . 26 . 20	Sosialisasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM)
1.20 . 26 . 21	Sistem Informasi Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 26 . 22	Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Daerah
1.20 . 26 . 23	Perencanaan dan Pelaporan Bidang Hukum
<b>1.20 . 27</b>	<b>Program penataan daerah otonomi baru</b>
1.20 . 27 . 01	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
1.20 . 27 . 02	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
1.20 . 27 . 03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
1.20 . 27 . 04	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
1.20 . 27 . 05	Pembuatan Peta Administrasi Kecamatan se- Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 27 . 06	Penataan/Pemekaran Daerah
1.20 . 27 . 07	Inventarisir dan Koordinasi Data Personil, Pendanaan, Sarana Prasarana dan Dokumen (P3D) Kabupaten Lampung Selatan
<b>1.20 . 28</b>	<b>Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan</b>
1.20 . 28 . 01	Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa
1.20 . 28 . 02	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Kepahlawanan
1.20 . 28 . 03	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tingkat Kecamatan
1.20 . 28 . 04	dst...
<b>1.20 . 29</b>	<b>Program Peningkatan Syiar Agama</b>
1.20 . 29 . 01	Musabaqoh Tilawatil Qur'an
1.20 . 29 . 02	Training Center (TC) Kafilah dengan LPTQ Provinsi
1.20 . 29 . 03	Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinsi
1.20 . 29 . 04	Pembinaan Imam dan Khotib
1.20 . 29 . 05	Posko Terpadu hari Besar Keagamaan Nasional
1.20 . 29 . 06	Sosialisasi Membangun Peradaban Zakat
1.20 . 29 . 07	Pembinaan Remaja Islam Masjid (RISMA)

1.20 . 29 . 08	Safari Ramadhan
1.20 . 29 . 09	Syl'ar Islamiyah
1.20 . 29 . 10	Pelaksanaan Doa Bersama (Istighosah)
1.20 . 29 . 11	Peringatan Isra Mijrad dan Maulid Nabi
1.20 . 29 . 12	Peringatan Tahun Baru Islam
1.20 . 29 . 13	Pembinaan Keluarga Sakinah
1.20 . 29 . 14	Bantuan OTD Haji dan BPIH Petugas Haji Daerah
1.20 . 29 . 15	Pengajian Rutin ASN dan Pengajian Anak Yatim Fiatu
1.20 . 29 . 16	Penghargaan Umroh bagi Muslim
1.20 . 29 . 17	Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan
1.20 . 29 . 18	OTD TPHD
1.20 . 29 . 19	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
1.20 . 29 . 20	Training Center Qori-qori'ah di rumah Dewan Hakim dan Pondok Pesantren
1.20 . 29 . 21	Seleksi Qori-qori'ah Kab. Lampung Selatan
1.20 . 29 . 22	Operasional Sekretariat MTQ
1.20 . 29 . 23	Peralatan home stay kafilah MTQ
1.20 . 29 . 24	Pemantapan Qori Qori'ah
1.20 . 29 . 25	Pembinaan Ta'mir Masjid
1.20 . 29 . 26	Perjalanan Spiritual Keagamaan
1.20 . 29 . 27	Nikah Massal
1.20 . 29 . 28	Pengajian Ibu-Ibu Majelis Takdim se-Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 29 . 29	Rumah Khatam Al-Qur'an
1.20 . 29 . 30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan
1.20 . 29 . 31	Rekrutmen dan Pembinaan Calon Kafilah MTQ Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 29 . 32	Tabligh Akbar
1.20 . 29 . 33	Pengembangan dan Pemantapan Seni Budaya Islam
1.20 . 29 . 34	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
1.20 . 29 . 35	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Qori qori'ah
1.20 . 29 . 36	Pengajian majelis taqlim desa
1.20 . 29 . 37	Kunjungan safari jum'at
1.20 . 29 . 38	Lomba Qosidah Tingkat Kecamatan
1.20 . 29 . 39	Perayaan Hari-Hari Besar Islam
1.20 . 30	<b>Program Peningkatan Peran dan Fungsi Sarana Dan Prasarana</b>
1.20 . 30 . 01	Penyerahan Bantuan Rumah Ibadah, TPA, Pondok Pesantren dan Yayasan Bernuansa Agama
1.20 . 30 . 02	Operasional Penyerahan Bantuan Yayasan Pendidikan
1.20 . 30 . 03	Operasional Penyerahan Bantuan TPA
1.20 . 30 . 04	Operasional Penyerahan Bantuan Pondok Pesantren
1.20 . 30 . 05	dst...
1.20 . 31	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Terhadap Masalah Sosial</b>
1.20 . 31 . 01	Pembinaan TP UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 31 . 02	Temu Kader Pokjanel Posyandu Kabupaten dan Kader Posyandu
1.20 . 31 . 03	Workshop TP. UKS Kecamatan dan TP. UKS Kabupaten
1.20 . 31 . 04	Sosialisasi Pokjanel Posyandu Kecamatan dan Kader Posyandu
1.20 . 31 . 05	Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten dan Persiapan Lomba Tk. Provinsi Lampung
1.20 . 31 . 06	Operasional Rumah Singgah dan Orang Terlantar
1.20 . 31 . 07	Pelatihan Pokjanel Posyandu Desa
1.20 . 31 . 08	Pelatihan Tim Pembina UKS Sekolah
1.20 . 31 . 09	Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten dalam rangka Persiapan Lomba Tingkat Provinsi dan Nasional
1.20 . 31 . 10	Pendataan dan Penertiban Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 31 . 11	Sosialisasi Tim Pelaksana UKS
1.20 . 31 . 12	Pembinaan Pokja Posyandu dalam rangka Lomba Desa dan Kesarak
1.20 . 32	<b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>
1.20 . 32 . 01	Peningkatan SDM Tim Pembina Satgas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba dan Satgas Desa/Kelurahan
1.20 . 32 . 02	Temu Koordinasi Tim Pembina Satgas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba dan Satgas Desa/Kelurahan
1.20 . 32 . 03	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Resiko Tinggi
1.20 . 32 . 04	Operasional Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
1.20 . 32 . 05	Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
1.20 . 32 . 06	Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS dan VCT Mobile bagi Masyarakat
1.20 . 33	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa</b>
1.20 . 33 . 01	Penerbitan Tabloid Pemda Kabupaten Lampung Selatan 'Regom Helau'
1.20 . 33 . 02	Pembuatan Buku Data Fakta dan Kalender
1.20 . 33 . 03	Pengadaan buku agenda kerja
1.20 . 33 . 04	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
1.20 . 33 . 05	Pengadaan maket Lampung Selatan
1.20 . 33 . 06	Penyelenggaraan Pembinaan Keprotokolan Pemdakab. Lampung Selatan
1.20 . 33 . 07	dst...
1.20 . 34	<b>Program Fasilitas Peningkatan Fasilitas SDM bidang Komunikasi dan Dokumentasi</b>
1.20 . 34 . 01	Penyertaan Pelatihan Kehumasan
1.20 . 34 . 02	dst...
1.20 . 35	<b>Program Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Analisis Jabatan</b>
1.20 . 35 . 01	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

1.20 . 35 . 02	Sosialisasi dan evaluasi pengembangan budaya kerja Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 03	Penyusunan pedoman pakaian dinas
1.20 . 35 . 04	Penyusunan rincian tugas jabatan pada perangkat daerah
1.20 . 35 . 05	Implementasi pengukuran indek kepuasan masyarakat (IKM)
1.20 . 35 . 06	Revisi Perda No 06 Tahun 2008 tetang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
1.20 . 35 . 07	Penyusunan Laporan Inpres No.5 tahun 2004
1.20 . 35 . 08	Sosialisasi dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 09	Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 10	Bimbingan Teknis Analisis Jabatan
1.20 . 35 . 11	Sosialisasi dan Evaluasi pengembangan Budaya Kerja
1.20 . 35 . 12	Pelaksanaan Permendagri No. 54 dan Sosialisasi tentang tataanaakah Dinas
1.20 . 35 . 13	Penyusunan Laporan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan publik
1.20 . 35 . 14	Sosialisasi Pakaian Dinas Bupati dan PNS
1.20 . 35 . 15	Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja
1.20 . 35 . 16	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik
1.20 . 35 . 17	Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naakah Dinas, Kode-Kode Surat Dinas, Fungsi Koordinasi, Pakaian Dinas dan Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja
1.20 . 35 . 18	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP)
1.20 . 35 . 19	Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Penyusunan Implementasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1.20 . 35 . 20	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)
1.20 . 35 . 21	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
1.20 . 35 . 22	Reformasi Birokrasi Bidang Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 23	Revisi Perda tentang struktur organisasi Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 24	Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah Kab. Lamsel
1.20 . 35 . 25	Survei kepuasan masyarakat
1.20 . 35 . 26	Pelaksanaan reformasi birokrasi bidang ketatalaksanaan
1.20 . 35 . 27	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Aparatur dalam Penyusunan SOP di Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 28	Pelaksanaan Penyusunan Revisi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas
1.20 . 35 . 29	Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
1.20 . 35 . 30	Pembuatan Pakta Integritas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 31	Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 32	Penyusunan Road Map Reformasi Birokraai
1.20 . 35 . 33	Pilot Project Reformasi Birokrasi
1.20 . 35 . 34	Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Provinsi Lampung
1.20 . 35 . 35	Pengadaan Atribut Pakaian Dinas PNS Eselon II dan III SKPD Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 36	Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
1.20 . 35 . 37	Pemetaan Formasi Jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 38	Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.20 . 35 . 39	Penyusunan Laporan Pencrapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 40	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.20 . 35 . 41	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 42	Penyusunan Standar Pelayanan Publik
1.20 . 35 . 43	Evaluasi dan Penataan UPT se Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 44	Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi Jabatan
1.20 . 35 . 45	Pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
1.20 . 35 . 46	Revisi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
1.20 . 35 . 47	Penyusunan dan Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi
1.20 . 35 . 48	Grand Design Reformasi Birokrasi
1.20 . 35 . 49	Pembuatan Buku Profil Reformasi Birokrasi
1.20 . 35 . 50	Survey Kebijakan Publik Bidang Pemerintahan Umum
1.20 . 35 . 51	Penyusunan Prediksi Kebutuhan PNS di Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 52	Penyusunan dan evaluasi analisis beban kerja
1.20 . 35 . 53	Pengembangan dan pembentukan kelompok budaya kerja
1.20 . 35 . 54	Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran
1.20 . 35 . 55	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan rincian tugas jabatan perangkat daerah
1.20 . 35 . 56	Pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada Lembaga Teknis Daerah
1.20 . 35 . 57	Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi Jabatan (EJ) pada Lembaga Teknis Daerah
1.20 . 35 . 58	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
1.20 . 35 . 59	Pemetaan Urusan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 60	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungai (Tupoksi) Perangkat Daerah
1.20 . 35 . 61	Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 62	Penataan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 35 . 63	Monitoring Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.20 . 35 . 64	Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur
1.20 . 35 . 65	Penyusunan Pelayanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
<b>1.20 . 36</b>	<b>Program Peningkatan Administrasi Kecamatan</b>
1.20 . 36 . 01	Bimbingan Teknis Sekcam dan Kasi Pemerintahan dan Pengadaan Buku Administrasi Kecamatan
1.20 . 36 . 02	Sosialisasi Pemekaran Kecamatan
1.20 . 36 . 03	Pembinaan Administrasi Kecamatan

1.20 . 36 . 04	Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi
1.20 . 36 . 05	dst...
<b>1.20 . 37</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparansi dan Akuntabilitas</b>
1.20 . 37 . 01	Penyusunan LPPD dan IPPD Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 37 . 02	dst...
<b>1.20 . 38</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemantapan Pemerintahan Desa</b>
1.20 . 38 . 01	Bimbingan Teknis Administrasi Desa dan Keuangan Desa
1.20 . 38 . 02	Penyuluhan Juklak dan Juknis Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
1.20 . 38 . 03	Pemilihan Kepala Desa se Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 38 . 04	Pemekaran Desa di Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 38 . 05	ASKES Bagi Aparat Desa
1.20 . 38 . 06	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa sarana kantor desa dan Pembinaan Dalam Rangka Lomba Desa
1.20 . 38 . 07	Pembinaan Bagi Anggota BPD
1.20 . 38 . 08	Administrasi Alokasi Dana Desa
1.20 . 38 . 09	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran DPPUD
1.20 . 38 . 10	Sosialisasi Pemekaran Kecamatan
1.20 . 38 . 11	Pembinaan Kepala Desa
1.20 . 38 . 12	Pembinaan Sekretaris Desa dan Validasi Data Sekdes Se-Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 38 . 13	Pembinaan Keuangan Desa se-Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 38 . 14	Pembinaan Sekdes dan Pelantikan Pengurus FORSEKDESI Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 38 . 15	Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa
1.20 . 38 . 16	Pembinaan Kaur Pemerintahan Desa se-Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 38 . 17	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Desa
1.20 . 38 . 18	Pembinaan Rukun Tetangga se-Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 38 . 19	Penyaluran Dana Tali Asih Rukun Tetangga se Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 38 . 20	Pembinaan Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 38 . 21	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Desa
1.20 . 38 . 22	Facilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa
1.20 . 38 . 23	Pembinaan Administrasi Desa
1.20 . 38 . 24	Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tentang Desa
<b>1.20 . 39</b>	<b>Program Peningkatan Bantuan Sarana Dan Prasarana Desa Penunjang Bagi Pemerintahan Desa</b>
1.20 . 39 . 01	Pembinaan Pendataan dalam rangka Pembentukan BUMDes
1.20 . 39 . 02	Asuransi Kesejahteraan Hari Tua Bagi Kepala Desa se Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 39 . 03	Perbaikan Kantor Desa/Balai Desa
1.20 . 39 . 04	Pembinaan terhadap desa tertinggal
1.20 . 39 . 05	dst...
<b>1.20 . 40</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>
1.20 . 40 . 01	Monitoring Pendistribusian Raskin di Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 40 . 02	Pemantauan Harga Sembako dan Bahan Penting Lainnya di Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 40 . 03	Monitoring dan Koordinasi Program Corporate Social Responsibility (CSR)
1.20 . 40 . 04	Pemantau Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 40 . 05	dst...
<b>1.20 . 41</b>	<b>Program Peningkatan PAD di bidang perizinan</b>
1.20 . 41 . 01	Sosialisasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
1.20 . 41 . 02	Pembahasan terpadu tim teknis Dinas/Instansi tentang perusahaan skala menengah dan besar yang mengajukan perizinan
1.20 . 41 . 03	Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kab.Lampung Selatan
1.20 . 41 . 04	dst...
<b>1.20 . 42</b>	<b>Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah</b>
1.20 . 42 . 01	Penyuluhan dan pebinaan usaha mikro kecil dan menengah
1.20 . 42 . 02	dst...
<b>1.20 . 43</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>
1.20 . 43 . 01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1.20 . 43 . 02	Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS daerah
1.20 . 43 . 03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
1.20 . 43 . 04	Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Formasi Umum
1.20 . 43 . 05	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Honorer Kategori I dan II
1.20 . 43 . 06	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angkatan II
1.20 . 43 . 07	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angkatan III
1.20 . 43 . 08	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angkatan IV
1.20 . 43 . 09	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angkatan V
1.20 . 43 . 10	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angkatan VI
1.20 . 43 . 11	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angkatan VII
1.20 . 43 . 12	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angkatan VIII
1.20 . 43 . 13	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angkatan IX
1.20 . 43 . 14	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angkatan X
1.20 . 43 . 15	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angkatan XI
1.20 . 43 . 16	
1.20 . 43 . 17	
1.20 . 43 . 18	
1.20 . 43 . 19	Penyelenggaraan Diklat Pengawasan TK/SD

1.20 . 43 . 20	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 43 . 21	Diklat prajabatan golongan I & II Reguler Angkatan V
1.20 . 43 . 22	Diklat prajabatan golongan I & II Reguler Angkatan VI
1.20 . 43 . 23	Diklat prajabatan golongan I & II Reguler Angkatan VII
1.20 . 43 . 24	Diklat prajabatan golongan I & II Reguler Angkatan VIII
1.20 . 43 . 25	Pengiriman Pegawai Tugas Belajar
1.20 . 43 . 26	Pengiriman Pegawai Bimbingan Teknis/Diklat Teknis
1.20 . 43 . 27	Pengiriman Bimbingan Teknis/Diklat Teknis dan Diklat Fungsional
1.20 . 43 . 28	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dan Kediklatan
<b>1.20 . 44</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>
1.20 . 44 . 01	Seleksi Penerimaan Calon PNS
1.20 . 44 . 02	Penempatan dan Pengembangan Karir PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional
1.20 . 44 . 03	Updating/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
1.20 . 44 . 04	Seleksi Berkas Pendaftaran Calon Praja IPDN
1.20 . 44 . 05	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
1.20 . 44 . 06	Pelaksanaan Pelayanan Pensiun PNS Terpadu
1.20 . 44 . 07	Pemberian Penghargaan SLKS PNS dan Penertiban Kartu-kartu Kepegawaian
1.20 . 44 . 08	Pembuatan Tanda Pengenal (ID CARD) PNS
1.20 . 44 . 09	Penyelesaian Penilaian dan Penetapan Angka Kredit PNS Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah
1.20 . 44 . 10	Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS dan Gaji Berkala PNS
1.20 . 44 . 11	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD Kabupaten Lampung Selatan Golongan II dan III
1.20 . 44 . 12	Pemberian Cindera mata Purna Bhakti PNS
1.20 . 44 . 13	Pemberian Kartu Ucapan Ulang Tahun PNS
1.20 . 44 . 14	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dan Kediklatan ke Kecamatan se Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 44 . 15	Evaluasi Kehadiran PNS dan THLS dalam Rangka Implementasi PP 53 Tahun 2010 dan Perbup 11 Tahun 2011
1.20 . 44 . 16	Pengiriman Pegawai BKD untuk mengikuti Bimtek/Diklat Teknis
1.20 . 44 . 17	Pelaksanaan Sumpah Janji PNS
1.20 . 44 . 18	Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II
1.20 . 44 . 19	Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1.20 . 44 . 20	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Angkatan I
1.20 . 44 . 21	Penyajian Media Informasi Kepegawaian Daerah
1.20 . 44 . 22	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
1.20 . 44 . 23	Penyusunan Arsip Elektronik dan Buku Informasi Kepegawaian
1.20 . 44 . 24	Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian THLS Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 44 . 25	Pelaksanaan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (P4) serta Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai
1.20 . 44 . 26	Penyelesaian Usulan Mutasi/Alih Tugas PNS dan THLS
1.20 . 44 . 27	Penyelenggaraan Assesment Pejabat Struktural
1.20 . 44 . 28	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Daerah
1.20 . 44 . 29	Penyelesaian Proses Pengadaan CPNSD Formasi Honorer Kategori II
1.20 . 44 . 30	Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan PNS dan THLS yang Berprestasi
1.20 . 44 . 31	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
1.20 . 44 . 32	Seleksi Berkas Pendaftaran Calon Praja STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat)
<b>1.20 . 45</b>	<b>Program Peningkatan Keterampilan Calon Tenaga Kerja</b>
1.20 . 45 . 01	Penyelenggaraan diklat teknis montir sepeda motor
1.20 . 45 . 02	Penyelenggaraan diklat teknis menjahit dan bordir
1.20 . 45 . 03	Penyelenggaraan diklat teknik las listrik dan karbit
1.20 . 45 . 04	Penyelenggaraan diklat instalasi listrik rumah tangga
1.20 . 45 . 05	Penyelenggaraan diklat teknologi hasil pertanian
1.20 . 45 . 06	Penyelenggaraan diklat teknik mobil bensin
1.20 . 45 . 07	dst...
<b>1.20 . 46</b>	<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>
1.20 . 46 . 01	Pembinaan jasa konstruksi
1.20 . 46 . 02	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Jasa Konstruksi
1.20 . 46 . 03	Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
1.20 . 46 . 04	Dst...
<b>1.20 . 47</b>	<b>Program Penciptaan iklim usaha yang sehat</b>
1.20 . 47 . 01	Fasilitasi kerjasama kemitraan pasar pisang dan profil pasar pisang
1.20 . 47 . 02	Pembuatan profil pisang di Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 47 . 03	dst...
<b>1.20 . 48</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>
1.20 . 48 . 01	Pemilihan perusahaan pembina tenaga kerja wanita terbaik Tingkat Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 48 . 02	dst...
<b>1.20 . 49</b>	<b>Program Pengembangan Komoditas Daerah</b>
1.20 . 49 . 01	Pendataan dan monitoring perkembangan usaha sektor perekonomian
1.20 . 49 . 02	Pelaporan Perekonomian Kab. Lampung Selatan
1.20 . 49 . 03	Pameran Lampung Fair
1.20 . 49 . 04	dst...
<b>1.20 . 50</b>	<b>Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah</b>
1.20 . 50 . 01	Fasilitas Pertemuan dan Penyuluhan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan
1.20 . 50 . 02	Monitoring Perkembangan Usaha Perekonomian Kerakyatan



1.20 . 50 . 03	Penyusunan Profil Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 50 . 04	Analisis Kebijakan Perkembangan Perekonomian
1.20 . 50 . 05	dst...
<b>1.20 . 51</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Masyarakat</b>
1.20 . 51 . 01	Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT
1.20 . 51 . 02	dst...
<b>1.20 . 52</b>	<b>Program Pelatihan Keterampilan Berorientasi Lapangan Kerja</b>
1.20 . 52 . 01	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Kelompok Usaha Perempuan
1.20 . 52 . 02	dst...
<b>1.20 . 53</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur KORPRI</b>
1.20 . 53 . 01	Sosialisasi Kelembagaan Bagi Anggota KORPRI
1.20 . 53 . 02	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Anggota KORPRI
1.20 . 53 . 03	Pendataan Anggota KORPRI
1.20 . 53 . 04	Perlombaan Anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 53 . 05	Sosialisasi rancangan Undang-undang aparatur sipil negara
1.20 . 53 . 06	Sosialisasi Kebijakan Program KORPRI
1.20 . 53 . 07	Operasional Kegiatan Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 53 . 08	Pembinaan dalam rangka Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS)
1.20 . 53 . 09	Pembentukan Badan Pembinaan Olahraga (BAPOR KORPRI) bagi PNS
1.20 . 53 . 10	Pembentukan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) bagi PNS
1.20 . 53 . 11	Penyediaan Obat-Obatan untuk Balai Pengobatan KORPRI
<b>1.20 . 54</b>	<b>Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah</b>
1.20 . 54 . 01	Evaluasi dan Monitoring Dalam Rangka Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah
1.20 . 54 . 02	dst...
<b>1.20 . 55</b>	<b>Program Penataan Batas Administrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan</b>
1.20 . 55 . 01	Penyelesaian, Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.20 . 55 . 02	dst...
<b>1.20 . 56</b>	<b>Program Peningkatan Komoditas Unggulan Kabupaten Lampung Selatan</b>
1.20 . 56 . 01	Koordinasi dan Monitoring Program Unggulan
1.20 . 56 . 02	Sosialisasi Program Unggulan Kecamatan
1.20 . 56 . 03	dst...
<b>1.21</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>
<b>1.21 . 15</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>
1.21 . 15 . 01	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
1.21 . 15 . 02	Inventarisasi dan Identifikasi Produk Pangan Segar
1.21 . 15 . 03	Pengembangan Lumbung Pangan Desa
1.21 . 15 . 04	Penyusunan Data Base, NBH/PPH dan SKPG
1.21 . 15 . 05	Penguatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
1.21 . 15 . 06	Pendamping Diversifikasi Pangan
1.21 . 15 . 07	Penguatan Desa Mandiri Pangan
1.21 . 15 . 08	Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam rangka Penanganan Daerah Rawan Pangan
1.21 . 15 . 09	Partisipasi Gerakan Masyarakat (Siger Mas) Melalui Kegiatan Pangan Olahan
1.21 . 15 . 10	Pengembangan Unggulan Komoditi Pisang untuk Peningkatan Ketahanan Pangan
1.21 . 15 . 11	Penguatan Dewan Ketahanan Pangan
1.21 . 15 . 12	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Masyarakat
1.21 . 15 . 13	Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur
1.21 . 15 . 14	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan
1.21 . 15 . 15	Penumbuhan dan Pengembangan Komoditas Lokal Sebagai Sumber Pangan Alternatif
1.21 . 15 . 16	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar
1.21 . 15 . 17	Penumbuhan OKKPD Kab.Lampung Selatan
1.21 . 15 . 18	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
1.21 . 15 . 19	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
1.21 . 15 . 20	Sertifikasi Produk Pangan Segar (Sayuran dan Buah)
1.21 . 15 . 21	Identifikasi Produk Pangan Segar, Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan
1.21 . 15 . 22	Penyediaan Cadangan Pangan
1.21 . 15 . 23	Pembinaan dan Pemantauan Mutu Komoditi Unggulan ( Pepaya Calopornia Way Panji )
1.21 . 15 . 24	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
1.21 . 15 . 25	Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan
1.21 . 15 . 26	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian
1.21 . 15 . 27	Advokasi dan Sertifikasi Pepaya California, Buah Naga dan Belimbing Mendukung Komoditi Unggulan
1.21 . 15 . 28	Penyusunan Master Plan Desa Mandiri Pangan
1.21 . 15 . 29	Pengembangan Moci pisang dan Produk Unggulan Khas Kabupaten Lampung Selatan Menuju Go Internasional
1.21 . 15 . 30	Identifikasi dan Sosialisasi Mutu Pangan Segar
1.21 . 15 . 31	Penyusunan Master Plan Desa Mandiri Pangan
1.21 . 15 . 32	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
1.21 . 15 . 33	Pembangunan Gudang Cadangan Pangan
1.21 . 15 . 34	Pemberdayaan Petani Jamur Tiram
1.21 . 15 . 35	Pengembangan Rumah Pangan Lestari

1.21 . 15 . 36	Promosi Makanan Lokal Khas Lampung Selatan
1.21 . 15 . 37	Lomba Kegiatan Ketahanan Pangan
1.21 . 15 . 38	Pembangunan Sarana Pengolahan Pangan
1.21 . 15 . 39	Festival Makanan Berbahan Baku Pangan Lokal dalam Rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia
1.21 . 15 . 40	Gerakan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan
1.21 . 15 . 41	Penyusunan Kajian Distribusi Pangan Kabupaten Lampung Selatan
<b>1.22</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
<b>1.22 . 15</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
1.22 . 15 . 01	Peberdayaan lembaga dan organisasi
1.22 . 15 . 02	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
1.22 . 15 . 03	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
1.22 . 15 . 04	Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS
1.22 . 15 . 05	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
1.22 . 15 . 06	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1.22 . 15 . 07	Pelatihan Keterampilan Masyarakat
1.22 . 15 . 08	dst ...
<b>1.22 . 16</b>	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>
1.22 . 16 . 01	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1.22 . 16 . 02	Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman
1.22 . 16 . 03	Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik negara
1.22 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan
1.22 . 16 . 05	Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah dipedesaan
1.22 . 16 . 06	fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
1.22 . 16 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 16 . 08	Penyiapan masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna (pengolahan pisang)
1.22 . 16 . 09	Pameran/Gelar Teknologi Tepat guna Pedesaan
1.22 . 16 . 10	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
1.22 . 16 . 11	Pelatihan Kader Posyantekdes
1.22 . 16 . 12	Sosialisasi BUM des
1.22 . 16 . 13	Pelatihan Teknologi tepat guna
1.22 . 16 . 14	Pelatihan BUM des
1.22 . 16 . 15	Monitoring Pelaksanaan BUMDES
1.22 . 16 . 16	Monitoring Pasar Desa
1.22 . 16 . 17	Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
<b>1.22 . 17</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>
1.22 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1.22 . 17 . 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1.22 . 17 . 03	Pembangunan stimulan pembangunan desa
1.22 . 17 . 04	Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat
1.22 . 17 . 05	Pemugaran rumah sehat & lingkungan kumuh
1.22 . 17 . 06	PNPM-PPK
1.22 . 17 . 07	Pendampingan dan Monitoring Kel. Simpan Pijam Perempuan PNPB-Mandiri Perdesaan
1.22 . 17 . 08	Pembangunan embrio pasar rakyat dan semenisasi rumah kumuh
1.22 . 17 . 09	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMB) dan Karya Bhakti TNI
1.22 . 17 . 10	Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan
1.22 . 17 . 11	Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
1.22 . 17 . 12	Musrenbang Desa
1.22 . 17 . 13	Semenisasi Rumah Kumuh
1.22 . 17 . 14	Sosialisasi profil Desa
1.22 . 17 . 15	Pembinaan Administrasi Desa
1.22 . 17 . 16	Identifikasi Potensi dan Penyusunan Road Map Program Pengembangan Desa Pesisir Terpadu
1.22 . 17 . 17	Bimtek Profil Desa dan Monitoring Profil Desa
1.22 . 17 . 18	Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik
1.22 . 17 . 19	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pesisir Terpadu bagi Desa Pesisir Se-Kabupaten Lampung Selatan
1.22 . 17 . 20	Sosialisasi aksi daerah penghapusan bentuk - bentuk pekerjaan terburuk unruk anak
1.22 . 17 . 21	Masterplan percepatan dan pengurangan kemiskinan indonesia (MP3KI)
1.22 . 17 . 22	Pembukaan dan Penutupan Karya Bhakti TNI/TMMB
1.22 . 17 . 23	Stimulan Rumah Tidak Sehat dan Lingkungan Kumuh
1.22 . 17 . 24	Pembinaan Pokjanel Posyandu
1.22 . 17 . 25	Perbaikan Sarana Prasarana Desa Binaan (P3KSS)
1.22 . 17 . 26	Pengembangan Desa Berbasis IT
1.22 . 17 . 27	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
1.22 . 17 . 28	Pendampingan Gerbang Desa
1.22 . 17 . 29	Fasilitasi Program Kawasan Perdesaan
<b>1.22 . 18</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>
1.22 . 18 . 01	Sosialisasi Perundang - Undangan bagi pengurus BPD
1.22 . 18 . 02	Monitoring dan Pengawasan Alokasi Dana Desa
1.22 . 18 . 03	Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)
1.22 . 18 . 04	Bantuan Operasional BPD
1.22 . 18 . 05	Pelatihan dan pembinaan pengelolaan keuangan ADD
1.22 . 18 . 06	Pelantikan Anggota BPD
1.22 . 18 . 07	Operasional Penyaluran Alokasi Dana Desa
1.22 . 18 . 08	Perda Perubahan tentang Pembentukan BPD ( PROLEGDA )
1.22 . 18 . 09	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
1.22 . 18 . 10	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa
1.22 . 18 . 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa

1.22 . 18 . 12	Pembinaan Administrasi Pertanahan Desa
1.22 . 18 . 13	Operasional Rehab Kantor Desa Tejang Pulau Sebesi
1.22 . 18 . 14	Sosialisasi dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (anggota BPD)
1.22 . 18 . 15	Prolegda Perda dan Perbup
1.22 . 18 . 16	Bimtek Penyusunan APBDes bagi aparatur pemerintah desa
1.22 . 18 . 17	Pelatihan SIMDA Desa
1.22 . 18 . 18	Pelatihan Administrasi Keuangan Desa
<b>1.22 . 19</b>	<b>Program Peningkatan Peranan Perempuan di Pedesaan</b>
1.22 . 19 . 01	Penguatan Kelembagaan Posyandu
1.22 . 19 . 02	Pelatihan Kader Posyantekdes
1.22 . 19 . 03	PKK Kabupaten Lampung Selatan
<b>1.22 . 20</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>
1.22 . 20 . 01	Pembinaan Perangkat Desa
<b>1.23</b>	<b>Statistik</b>
<b>1.23 . 15</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>
1.23 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.23 . 15 . 02	Pengolahan, updating dan analisa data dan statistik daerah
1.23 . 15 . 03	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
1.23 . 15 . 04	Pengolahan, updating dan analisa PDRB
<b>1.24</b>	<b>Kearsipan</b>
<b>1.24 . 15</b>	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>
1.24 . 15 . 01	Pembangunan data base informasi kearsipan
1.24 . 15 . 02	Pengumpulan Data
1.24 . 15 . 03	Pengklasifikasian data
1.24 . 15 . 04	Penyusunan sistem katalog data
1.24 . 15 . 05	Pengadaan sarana penyimpanan
1.24 . 15 . 06	Kajian sistem administrasi kearsipan
1.24 . 15 . 07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
1.24 . 15 . 08	dst ...
<b>1.24 . 16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>
1.24 . 16 . 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1.24 . 16 . 02	Pendataan dan penataandokumen/arsip daerah
1.24 . 16 . 03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
1.24 . 16 . 04	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
1.24 . 16 . 05	dst ...
<b>1.24 . 17</b>	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>
1.24 . 17 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala pengolahan dan penyimpanan arsip
1.24 . 17 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
1.24 . 17 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
1.24 . 17 . 04	dst ..
<b>1.24 . 18</b>	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>
1.24 . 18 . 01	Penyusunan dan penbertiban naskah sumber arsip
1.24 . 18 . 02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip
1.24 . 18 . 03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
1.24 . 18 . 04	dst ...
<b>1.25</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>
<b>1.25 . 15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>
1.25 . 15 . 01	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
1.25 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1.25 . 15 . 03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
1.25 . 15 . 04	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
1.25 . 15 . 05	Pengadaan alat studio dan komunikasi
1.25 . 15 . 06	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
1.25 . 15 . 07	Penerbitan Tabloid Pemda Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 08	Pembuatan buku data - fakta
1.25 . 15 . 09	Pengadaan Kalender Pemda Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 10	Pengadaan buku agenda kerja Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 11	Pengadaan peralatan peliputan
1.25 . 15 . 12	Publikasi Kegiatan Media Cetak dan Elektronik
1.25 . 15 . 13	Pembuatan Buku Potensi Daerah, Leaflet dan Buku Agenda Kerja
1.25 . 15 . 14	Pembinaan dan Pengembangan Portal/Website Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 15	Pembuatan Panel Foto Bupati-Wakil Bupati Untuk Sekolah dan UPTD
1.25 . 15 . 16	Pembuatan Panel Foto Bupati-Wakil Bupati untuk Puskesmas, Puskesmasdes, UPTD dan Uspika Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 17	Pembuatan Panel Foto Ketua-Wakil Ketua TP-PKK Lampung Selatan untuk Desa dan UPTD
1.25 . 15 . 18	Penyelenggaraan Pembinaan Kehumasan dan Pembinaan Radio Pemda Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 19	Penyelenggaraan pembinaan keprotokolanan Pemda Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 20	Penyusunan Buku Data Fakta Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 21	Pembinaan Humas Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 22	Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolanan Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 23	Penyebarluasan Informasi melalui radio Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 24	Tour Media dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

1.25 . 15 . 25	Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 26	Pembuatan Panel Foto Bupati-Wakil Bupati dan Ketua-Wakil TP-PKK Lampung Selatan untuk SD, TK dan PAUD
1.25 . 15 . 27	Kehumasan dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 28	Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 29	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 30	Penerbitan Majalah Pemda Kabupaten Lampung Selatan
1.25 . 15 . 31	Monitoring Menara Telekomunikasi dan Pembinaan Provider Telekomunikasi
1.25 . 15 . 32	dst ...
<b>1.25 . 16</b>	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>
1.25 . 16 . 01	Pengembangan ICT Pemkab Lampung Selatan
1.25 . 16 . 02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pos dan Telekomunikasi
1.25 . 16 . 03	Monitoring Warung Internet
1.25 . 16 . 04	Dst...
1.25 . 17	<b>Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika</b>
1.25 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1.25 . 17 . 02	Penyertaan pelatihan dan sosialisasi kehumasan
1.25 . 17 . 03	Study Penerapan E-Government
1.25 . 17 . 04	dst ...
<b>1.25 . 18</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</b>
1.25 . 18 . 01	Publikasi Implementasi Kebijakan Berbagai Sektor Di Kab.Lampung Selatan
1.25 . 18 . 02	dst ...
<b>1.25 . 19</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>
1.25 . 19 . 01	Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
1.25 . 19 . 02	dst ...
<b>1.26</b>	<b>Perpustakaan</b>
<b>1.26 . 15</b>	<b>Pengembangan Perpustakaan Daerah</b>
1.26 . 15 . 01	Akuisisi Arsip
1.26 . 15 . 02	Diklat Kearsipan
1.26 . 15 . 03	Bimbingan Teknis Kearsipan
1.26 . 15 . 04	Diklat Kearsipan
1.26 . 15 . 05	Sosialisasi Kearsipan dan Perpustakaan
1.26 . 15 . 06	Jadwal retensi arsip
1.26 . 15 . 07	dst ...
1.26 . 16	<b>Program Pengembangan Perpustakaan</b>
1.26 . 16 . 01	Bimbingan Teknis Perpustakaan
1.26 . 16 . 02	Diklat Perpustakaan
1.26 . 16 . 03	Gerakan gemar membaca masyarakat
1.26 . 16 . 04	Diklat Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi di Jakarta
1.26 . 16 . 05	Penambahan Koleksi Bacaan/Buku
1.26 . 16 . 06	Pelayanan mobil perpustakaan keliling
1.26 . 16 . 07	Pengembangan perpustakaan umum (perpustakaan desa dan sekolah)
1.26 . 16 . 08	Pembentukan taman baca masyarakat
1.26 . 16 . 09	Gerakan Gemar Membaca Masyarakat
1.26 . 16 . 10	Lomba dan Bazar Buku Dalam Rangka Gerakan Gemar Membaca Masyarakat
1.26 . 16 . 11	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perpustakaan
1.26 . 17	<b>Program Pengembangan Dokumentasi</b>
1.26 . 17 . 01	Diklat Dokumentasi
1.26 . 17 . 02	Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah
1.26 . 17 . 03	dst ...
<b>1.26 . 18</b>	<b>Program Pengembangan dan Pelayanan Bidang Arsip Vital dan Statis</b>
1.26 . 18 . 01	Akuisisi Arsip Pejabat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan
<b>2</b>	<b>Urusan Pilihan</b>
<b>2.01</b>	<b>Pertanian</b>
<b>2.01 . 15</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>
2.01 . 15 . 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01 . 15 . 02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
2.01 . 15 . 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani
2.01 . 15 . 04	Peningkatan sistem intensif dan disinsentif bagi petani kelompok tani
2.01 . 15 . 05	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
2.01 . 15 . 06	Pembinaan dan tindak lanjut revitalisasi perkebunan
2.01 . 15 . 07	Pemberdayaan peningkatan pendapatan petani (P4)
2.01 . 15 . 08	Pengembangan Komunitas Nilam (Dana AD HOCK)
2.01 . 15 . 09	Saraschan
2.01 . 15 . 10	Pembinaan Masyarakat Miskin (Siger Mas)
2.01 . 15 . 11	Temu Usaha dan Kemitraan
2.01 . 15 . 12	Monitoring dan Evaluasi Gapoktan Penerima PUAP
2.01 . 15 . 13	Pembinaan Desa Miskin Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan
2.01 . 15 . 14	Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Tani Berbasis Perkebunan
2.01 . 15 . 15	Temu Mitra Petani Perkebunan
2.01 . 15 . 16	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
2.01 . 15 . 17	Temu Mitra Petani, Peningkatan Usaha Kelompok Tani Berbasis Perkebunan

2.01 . 15 . 18	Penguatan Kelembagaan Penyuluh
2.01 . 15 . 19	Gebyar Bangkit Tani
2.01 . 15 . 20	Pembinaan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Mitra Binaan Program CSR/PKBL
2.01 . 15 . 21	Peningkatan Fungsi Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)
2.01 . 15 . 22	Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau
2.01 . 15 . 23	Pembinaan Peolahan Hasil Perkebunan
<b>2.01 . 16</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>
2.01 . 16 . 01	Penanganan daerah rawan pangan
2.01 . 16 . 02	Penyusunan Database Potensi Produksi Pertanian
2.01 . 16 . 03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
2.01 . 16 . 04	Analisis jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
2.01 . 16 . 05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
2.01 . 16 . 06	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
2.01 . 16 . 07	Promosi Atas Hasil Pertanian Unggulan Daerah
2.01 . 16 . 08	Monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
2.01 . 16 . 09	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
2.01 . 16 . 10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
2.01 . 16 . 11	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
2.01 . 16 . 12	Fenanganan pasca panen pengolahan hasil pertanian
2.01 . 16 . 13	Pengembangan cadangan pangan daerah
2.01 . 16 . 14	Pengembangan desa mandiri pangan
2.01 . 16 . 15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija
2.01 . 16 . 16	Pengembangan Diversifikasi Tanaman
2.01 . 16 . 17	Pengembangan pertanian pada lahan kering
2.01 . 16 . 18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa
2.01 . 16 . 19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
2.01 . 16 . 20	Pengembangan perbenihan perbibitan
2.01 . 16 . 21	Pengembangan sistem ekonomi pasar
2.01 . 16 . 22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2.01 . 16 . 23	Koordinasi kebijakan perbesaran
2.01 . 16 . 24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan pedesaan
2.01 . 16 . 25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
2.01 . 16 . 26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi
2.01 . 16 . 27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya
2.01 . 16 . 28	Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
2.01 . 16 . 29	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan/Produk Pertanian
2.01 . 16 . 30	Penyuluhan sumber pangan alternatif
2.01 . 16 . 31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01 . 16 . 32	Penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan
2.01 . 16 . 33	Pengembangan alat mesin pertanian
2.01 . 16 . 34	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Kawasan Hortikultura
2.01 . 16 . 35	Pengelolaan Lahan dan Air
2.01 . 16 . 36	Penanggulangan desa miskin melalui pengembangan pembibitan
2.01 . 16 . 37	Pengembangan Sentra Produksi Hortikultura (Pendamping TP)
2.01 . 16 . 38	Penguatan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)
2.01 . 16 . 39	Pengembangan sentra produksi dan agribisnis hortikultura
2.01 . 16 . 40	Penyusunan perencanaan penyuluhan pertanian
2.01 . 16 . 41	Penanganan pasca panen komoditas unggulan
2.01 . 16 . 42	Penanganan desa miskin (Siger Mas)
2.01 . 16 . 43	Akurasi data dan promosi pembangunan perkebunan
2.01 . 16 . 44	Diversifikasi kelapa dan pisang
2.01 . 16 . 45	Partisipasi gerakan masyarakat melalui pengembangan komoditas kakao
2.01 . 16 . 46	Pemantapan sumber benih kakao dan karet (DANA AD HOCK)
2.01 . 16 . 48	Peningkatan sarana dan prasarana produksi (Dana DAK)
2.01 . 16 . 49	Pengembangan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.01 . 16 . 50	Pemeliharaan kebun sumber benih/bibit tanaman perkebunan
2.01 . 16 . 51	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
2.01 . 16 . 52	Peningkatan sarana dan prasarana produksi (Dana DAK dan Pendampingan)
2.01 . 16 . 53	Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian Kabupaten Lampung Selatan
2.01 . 16 . 54	Perstatistikan dan Sistem Informasi Perkebunan
2.01 . 16 . 55	Pengembangan Keterpaduan Kawasan Perkebunan
2.01 . 16 . 56	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran
2.01 . 16 . 57	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian TPH
2.01 . 16 . 58	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran
2.01 . 16 . 59	Pengembangan Cadangan Benih Daerah
2.01 . 16 . 60	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan
2.01 . 16 . 61	Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)
2.01 . 16 . 62	Pengembangan Sistem Integrasi Kelapa Sawit dan Sapi (siskapi)
2.01 . 16 . 63	Pengembangan komoditas kelapa kopyor puan kalianda
2.01 . 16 . 64	Pengembangan komoditas cengkeh
2.01 . 16 . 65	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkebunan (DAK dan Pendamping)
2.01 . 16 . 66	Percepatan tanam padi dengan aplikasi teknologi budidaya salibu
2.01 . 16 . 67	Peningkatan Produktivitas Padi dengan Penerapan GPPTT
2.01 . 16 . 68	Peningkatan Produktivitas Jagung dengan Penerapan GPPTT
2.01 . 16 . 69	Fasilitasi Investasi, Permodalan dan Kemitraan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.01 . 16 . 70	Pengembangan Sistem Integrasi Kakao dan Sapi
<b>2.01 . 17</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan</b>
2.01 . 17 . 01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan

2.01 . 17 . 02	Fasilitas kerjasama regional/nasional internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplement
2.01 . 17 . 03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan pedesaan produksi hasil pertanian perkebunan
2.01 . 17 . 04	Pembangunan pusat-pusat etalase eksebisi,promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan
2.01 . 17 . 05	Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan pedesaan produksi hasil pertanian perkebunan
2.01 . 17 . 06	Penyuluhan pusat-pusat etalase eksebisi,promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan
2.01 . 17 . 07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan unggulan daerah
2.01 . 17 . 08	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon
2.01 . 17 . 09	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
2.01 . 17 . 10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian perkebunan masyarakat
2.01 . 17 . 11	Penyuluhan distribusi pemasaran atau hasil produksi pertanian
2.01 . 17 . 12	penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian
2.01 . 17 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01 . 17 . 14	Kerjasama Pengembangan Pengolahan Kelapa Terpadu
2.01 . 17 . 16	Pembangunan Jalan Akses Menuju Sub Terminal Agribisnis, Pasar Tani dan Pasar Lelang
2.01 . 17 . 18	Fasilitasi kerja sama pemasaran dan gelar teknologi perkebunan
2.01 . 17 . 19	Penyebarluasan Informasi Petanian Melalui Media Elektronik (Siaran pedesaan)
2.01 . 17 . 20	Cetakan media pertanian
2.01 . 17 . 21	Promosi dan informasi pasar hasil produksi pertanian
2.01 . 17 . 22	Pembinaan dalam rangka Lomba desa
2.01 . 17 . 23	Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan Peranan perempuan menuju Keluarga sehat Sejahtera (P3KSS)
2.01 . 17 . 24	Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah
2.01 . 17 . 25	Pelatihan Pengawas Mutu Hasil Tanaman Kakao
2.01 . 17 . 26	Pembinaan Pasca Panen Tanaman Perkebunan dan Seminar Perkelapaan
2.01 . 17 . 27	Temu Usaha dan Kemitraan
2.01 . 17 . 28	Pembinaan Pasca Panen Tanaman Perkebunan dan Hari Perkelapaan
2.01 . 17 . 29	Pembinaan dalam rangka Lomba Kesejahteraan Rakyat (Kerak)
2.01 . 17 . 30	Pengembangan Terminal Agribisnis (TA), Sub Terminal Agribisnis (STA), Pasar Tani dan Pasar Lelang
2.01 . 17 . 31	Pencatatan jejaring usaha tingkat Kab. dalam mendukung Terminal Agribisnis
2.01 . 17 . 32	Pengolahan Informasi Pasar (dalam rangka mendukung terminal agribisnis)
2.01 . 17 . 33	Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah
2.01 . 17 . 34	Pemasaran Produk Beras Organik
2.01 . 17 . 35	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perkebunan
<b>2.01 . 18</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan</b>
2.01 . 18 . 01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01 . 18 . 02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna
2.01 . 18 . 03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna
2.01 . 18 . 04	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Tehnologi Pertanian Tepat Guna
2.01 . 18 . 05	Pelatihan dan bimbingan pengoprasian teknologi pertanian /perkebunan tepat guna
2.01 . 18 . 06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
2.01 . 18 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01 . 18 . 08	Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani jarak menuju desa mandiri energi
2.01 . 18 . 09	Demplot Pertanian Organik
2.01 . 18 . 10	SL PTT Padi (Penanda Padi)
2.01 . 18 . 11	SL pertanian organik
2.01 . 18 . 12	SL sapi
2.01 . 18 . 13	SL ikan kolam
2.01 . 18 . 14	SLPHT jagung
2.01 . 18 . 15	SLPHT kelapa dalam
2.01 . 18 . 16	SLPHT kelapa sawit
2.01 . 18 . 17	Pengembangan desamandiri energi berbasis perkebunan (Dana AD HOCK)
2.01 . 18 . 18	Pengelolaan Manajemen Cyber Extention
2.01 . 18 . 19	Pengembangan Teknologi Perkebunan
2.01 . 18 . 20	Percepatan tanam padi dengan aplikasi teknologi budidaya salibu
<b>2.01 . 19</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan</b>
2.01 . 19 . 01	Penyuluhan peningkatan perproduksi pertanian perkebunan
2.01 . 19 . 02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan
2.01 . 19 . 03	Pengembangan Bibit unggul Pertanian / Perkebunan
2.01 . 19 . 04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
2.01 . 19 . 05	Penyuluhan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
2.01 . 19 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01 . 19 . 07	Pengembangan keterpaduan kawasan strategis perkebunan
2.01 . 19 . 08	Pengembangan sentra komoditas perkebunan
2.01 . 19 . 09	Pengolahan lahan dan air untuk perkebunan
2.01 . 19 . 10	Pengembangan kawasan agropolitan melalui penyediaan sarana produksi
2.01 . 19 . 11	Pengembangan keterpaduan hutan kemasyarakatan dengan komoditas perkebunan
2.01 . 19 . 12	Pelatihan peningkatan produksi dan mutu produk makanan
2.01 . 19 . 13	Perbaikan Infratraktur Lahan
2.01 . 19 . 14	Pengembangan Holtikultura Unggulan dan bernilai Ekonomis Tinggi
2.01 . 19 . 15	Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air ( DAK )
2.01 . 19 . 16	Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air ( Pendamping DAK )
2.01 . 19 . 17	Peningkatan Sarana/Prasarana Perkebunan

2.01 . 19 . 18	Percepatan Pembangunan Daerah
2.01 . 19 . 19	Penyediaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
2.01 . 19 . 20	Pengembangan Sentra Komoditas Perkebunan Melalui Pembibitan Tanaman Perkebunan
2.01 . 19 . 21	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan
2.01 . 19 . 22	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
2.01 . 19 . 23	Sosialisasi Pengembangan Komoditi Tembakau di Kabupaten Lampung Selatan
2.01 . 19 . 24	Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao
2.01 . 19 . 25	Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Kecamatan Merbau Mataram
2.01 . 19 . 26	Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit
2.01 . 19 . 27	Pengembangan Komoditas Unggulan Kecamatan Penengahan
2.01 . 19 . 28	Pengembangan Komoditas Unggulan Kecamatan Sragi
2.01 . 19 . 29	Pengembangan Komoditas Unggulan Kecamatan Way Panji
2.01 . 19 . 30	Peningkatan Kualitas Tembakau
2.01 . 19 . 31	Pengembangan Kawasan Hortikultura Mendukung Operasional Terminal Agribisnis
2.01 . 19 . 32	Penyediaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)
2.01 . 19 . 33	Pengembangan Komoditas Unggulan Kecamatan
2.01 . 19 . 34	Fasilitasi Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk komoditas perkebunan
2.01 . 19 . 35	Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air
<b>2.01 . 20</b>	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>
2.01 . 20 . 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian /perkebunan
2.01 . 20 . 02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian /perkebunan
2.01 . 20 . 03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan
2.01 . 20 . 04	Peningkatan Operasional Penyuluh Pertanian
2.01 . 20 . 05	Temu teknis penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
2.01 . 20 . 06	Penghargaan petani dan penyuluh prestasi
2.01 . 20 . 07	Penilaian angka kredit point
2.01 . 20 . 08	Penilaian kelas kemampuan kelompok tani
2.01 . 20 . 09	Penyuluhan perencanaan penyuluhan pertanian
2.01 . 20 . 10	BPP model
2.01 . 20 . 11	Penguatan dan pengembangan kelembagaan BP4K dan BPP
2.01 . 20 . 12	Sarana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2.01 . 20 . 13	Studi Banding penyuluhan Pertanian
2.01 . 20 . 14	Sosialisasi Pengembangan usaha agribisnis pedesaan ( PUAP )
2.01 . 20 . 15	Pengelolaan Manajemen Cyber Extension
2.01 . 20 . 16	Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Point Penyuluh dan Seleksi Penyuluh Teladan dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Penyuluh
2.01 . 20 . 17	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Kabupaten, BPP dan Desa
2.01 . 20 . 18	Perencanaan Pengembangan Komisi Penyuluhan
<b>2.01 . 21</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>
2.01 . 21 . 01	Pendataan masalah peternakan
2.01 . 21 . 02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2.01 . 21 . 03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
2.01 . 21 . 04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
2.01 . 21 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01 . 21 . 06	Penanganan dan Pengendalian Penyakit Avian Influenza
2.01 . 21 . 07	Kegiatan pemberantasan dan pengendalian Avian Influenza
2.01 . 21 . 08	Kegiatan pelayanan kesehatan hewan
<b>2.01 . 22</b>	<b>Program Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak</b>
2.01 . 22 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Produktivitas
2.01 . 22 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi Proyek
2.01 . 22 . 03	Pemanfaatan Lahan Kering ( DAK )
2.01 . 22 . 04	Pemanfaatan Lahan Kering ( Per damping DAK )
2.01 . 22 . 05	Siger Mas
2.01 . 22 . 06	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbibitan
2.01 . 22 . 07	Peningkatan Produksi ternak desa misidin ( Siger Mas )
2.01 . 22 . 08	Pengembangan Bibit Ternak
<b>2.01 . 23</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>
2.01 . 23 . 01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
2.01 . 23 . 02	Fasilitas kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer
2.01 . 23 . 03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
2.01 . 23 . 04	Pembangunan pusat-pusat etalase /eksebisasi promosi atas hasil produksi peternakan
2.01 . 23 . 05	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2.01 . 23 . 06	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
2.01 . 23 . 07	Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
2.01 . 23 . 08	Expo / Promosi Potensi dan Hasil Pembangunan Peternakan
2.01 . 23 . 09	Pembinaan Kelembagaan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
2.01 . 23 . 10	Gebyar Peternakan
<b>2.01 . 24</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi, Sarana dan Prasarana Peternakan</b>
2.01 . 24 . 01	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
2.01 . 24 . 02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
2.01 . 24 . 03	Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
2.01 . 24 . 04	Kegiatan penyuluhan pencrapan teknologi penerapan tepat guna
2.01 . 24 . 05	Pelatihan dan Bimbingan Peloperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
2.01 . 24 . 06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.01 . 24 . 07	Introduksi bibit ternak baru

2.01 . 24 . 08	Aplikasi Teknologi Usaha Ternak Rakyat
2.01 . 24 . 09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelestarian dan Pengembangan Plasma Nutfah Sapi PO (Unggulan)
2.01 . 24 . 10	Pengembangan Pola Agribisnis Itik (Unggulan)
2.01 . 24 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Kambing PE (Unggulan)
2.01 . 24 . 12	Percepatan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) melalui Peningkatan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Transportasi
2.01 . 24 . 13	Optimalisasi Kelahiran Melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE)
2.01 . 24 . 14	Pembangunan Peskeswan
2.01 . 24 . 15	Pengembangan Sarana Pengolahan Limbah Ternak
2.01 . 24 . 16	Penyediaan Sarana Prasarana Puskesmas
2.01 . 24 . 17	Fasilitasi Pengolahan Pakan Ternak
<b>2.01 . 25</b>	<b>Program Pendampingan Kegiatan Tugas Pembantuan</b>
2.01 . 25 . 01	Pendamping tugas pembantu peningkatan Produktivitas perkebunan
2.01 . 25 . 02	Pendampingan tugas pembantuan peningkatan produksi perkebunan (Ditjen Bun)
2.01 . 25 . 03	Pendampingan tugas pembantuan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan (Ditjen P2HP)
2.01 . 25 . 04	Pendampingan tugas pembantuan APBD
2.01 . 25 . 05	Sekretariat dan pembangunan peternakan
2.01 . 25 . 06	Pendampingan tugas pembantuan pengelolaan lahan dan air (Ditjen PLA)
2.01 . 25 . 07	Pendamping Kegiatan Dana Ad-Hock
<b>2.01 . 26</b>	<b>Program Pengembangan Agribisnis Peternakan</b>
2.01 . 26 . 01	Pelatihan, magang, pameran dan lomba
2.01 . 26 . 02	Kontes ternak
2.01 . 26 . 03	Pembuatan Instalasi Biomassa ( Kotoran Sapi )
2.01 . 26 . 04	Expo/Promosi Potensi dan Hasil Pembangunan Peternakan
2.01 . 26 . 05	Lomba Kelompok Peternakan dan Petugas Peternakan
2.01 . 26 . 06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar Ternak
2.01 . 26 . 07	Pelayanan, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Usaha Peternakan
2.01 . 26 . 08	Pengembangan Kawasan Ternimal Agribisnis
2.01 . 26 . 09	Kontes Burung
2.01 . 26 . 10	Gebyar Peternakan
2.01 . 26 . 11	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Ras
<b>2.01 . 27</b>	<b>Program Perencanaan Kegiatan</b>
2.01 . 27 . 01	Pembuatan laporan, monitoring dan evaluasi data
2.01 . 27 . 02	Dana pendamping kegiatan tugas pembantuan APBN
2.01 . 27 . 03	Pendamping Dana Alokasi Khusus ( DAK )
2.01 . 27 . 04	Inventarisasi Ternak Pemerintah
<b>2.01 . 28</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil pertanian</b>
2.01 . 28 . 01	Peningkatan sarana dan prasarana (DAK dan Pendamping)
2.01 . 28 . 02	Dst...
<b>2.01 . 29</b>	<b>Program Pengamanan Ternak</b>
2.01 . 29 . 01	Pencanangan dan penanggulangan penyakit avian influenza
2.01 . 29 . 02	Pelayanan Kesehatan ternak
2.01 . 29 . 03	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2.01 . 29 . 04	Pengendalian Kesehatan Ternak dan Hasil Ternak
2.01 . 29 . 05	Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Strategis dan Zoonosis
2.01 . 29 . 06	Pengembangan Sarana-Prasarana Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2.01 . 29 . 07	Pengadaan Sarana-Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)
2.01 . 29 . 08	Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
2.01 . 29 . 09	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2.01 . 29 . 10	Revitalisasi Puskesmas
<b>2.01 . 30</b>	<b>Program Pemanfaatan Limbah Pertanian Sebagai Bahan Pembuatan Kompos</b>
2.01 . 30 . 01	Pemanfaatan Biomassa sebagai Bahan Biogas dan Kompos
<b>2.01 . 31</b>	<b>Program Pemanfaatan Lahan Tidur dan Pengembangan Komoditi Lokal</b>
2.01 . 31 . 01	Pemanfaatan Lahan non Produktif untuk Pengembangan Ternak
<b>2.01 . 32</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis untuk Optimalisasi Daya Saing Kawasan dan Produk</b>
2.01 . 32 . 01	Pengembangan Zona Agribisnis dan Peningkatan SDM Petugas
2.01 . 32 . 02	Pemetaan Kawasan Peternakan
<b>2.01 . 34</b>	<b>Program Aplikasi Teknologi Usaha Ternak Rakyat</b>
2.01 . 34 . 01	Perbaikan Mutu Genetis Ternak
<b>2.01 . 35</b>	<b>Program Pengembangan Zona Agribisnis dan Peningkatan SDM Petugas</b>
2.01 . 35 . 01	Pengembangan Kambing PE
<b>2.01 . 36</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Ternak dan Hasil Ternak</b>
2.01 . 36 . 01	Pemeriksaan Kesehatan Daging dan Telur
<b>2.01 . 37</b>	<b>Program Pemetaan Kawasan Peternakan</b>
2.01 . 37 . 01	Pembuatan Data Base Peternakan
2.01 . 37 . 02	Pembuatan Peta Potensial Pengembangan Ternak



<b>2.01 . 38</b>	<b>Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pabrik Pakan Ternak Skala Kecil ( DAK dan Pendamping DAK)</b>
2.01 . 38 . 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pabrik pakan Ternak Skala Kecil ( DAK dan Pendamping DAK )
<b>2.01 . 39</b>	<b>Program Peningkatan Agribisnis Peternakan</b>
2.01 . 39 . 01	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Ras (Unggulan)
2.01 . 39 . 02	Penerapan Teknologi Agribisnis Usaha Peternakan
<b>2.01 . 40</b>	<b>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan</b>
2.01 . 40 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Peternakan
2.01 . 40 . 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos IB Pengolah Pakan dan Pengolah Limbah
<b>2.01 . 41</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelembagaan</b>
2.01 . 41 . 01	Penataan Kelembagaan Kelompok Peternak dan Apresiasi Petugas Lapangan
2.01 . 41 . 02	Pembinaan Kelompok Tani Pengelola Ternak Pemerintah
<b>2.01 . 42</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan</b>
2.01 . 42 . 01	Penyusunan Programs Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2.01 . 42 . 02	Pelatihan Bagi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
2.01 . 42 . 03	Demplot Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2.01 . 42 . 04	Pendampingan Kegiatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2.01 . 42 . 05	Pendampingan Pengembangan Padi Organik
2.01 . 42 . 06	Pendampingan penyusunan RDK dan RDKK
2.01 . 42 . 07	Pendampingan SDM pengembangan Hortikultura (buah dan sayuran) mendukung terminal agribisnis
2.01 . 42 . 08	Megang/Pendidikan Penyuluh, Petugas dan Petani
2.01 . 42 . 09	Lomba Asah Terampil Pertanian, Perikanan, Kehutanan
2.01 . 42 . 10	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh, Petugas dan Petani untuk Mendukung Kawasan Rumah Pangan Lestari
2.01 . 42 . 11	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh dalam Mendukung Ketahanan Pangan
<b>2.01 . 43</b>	<b>Program Peningkatan SDM Petugas dan Kelompok Tani</b>
2.01 . 43 . 01	Pembinaan Kelompok Tani
2.01 . 43 . 02	Peningkatan SDM Kelompok Tani Inseminator
<b>2.01 . 44</b>	<b>Program Pelestarian dan Pengembangan Sapi PO</b>
2.01 . 44 . 01	Pelestarian dan Pengembangan Plasma Nutfah Sapi PO
2.01 . 44 . 02	Penguatan UPT Balai Pembibitan Sapi PO dan Instalasinya
2.01 . 44 . 03	Integrasi Kambing Perah-Pisang
2.01 . 44 . 04	Pengembangan Agribisnis Ternak Itik
2.01 . 44 . 05	Festival Peternakan
2.01 . 44 . 06	Penguatan UPT Balai Pembibitan Sapi Peranakan Ongole (PO)
<b>2.01 . 45</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan</b>
2.01 . 45 . 01	Pembuatan Jalan Produksi Peternakan
2.01 . 45 . 02	Penyediaan Sarana Pendukung RPH-R
2.01 . 45 . 03	Pembangunan Jembatan RPH-R
<b>2.01 . 46</b>	<b>Program Intensifikasi Aplikasi Teknologi Reproduksi</b>
2.01 . 46 . 01	Pengembangan Sarana-Prasarana Inseminasi Buatan dan Kawin Alam
<b>2.01 . 47</b>	<b>Program Ketahanan Pakan</b>
2.01 . 47 . 01	Pelayanan, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pakan
2.01 . 47 . 02	Demplot Manajemen dan Teknologi Pakan
<b>2.01 . 48</b>	<b>Program Pengembangan Kualitas SDM Aparatur Peternakan</b>
2.01 . 48 . 01	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Peternakan
2.01 . 48 . 02	Peningkatan Kualitas SDM Peternak
<b>2.01 . 49</b>	<b>Lomba Kelompok Peternak dan Petugas Peternakan</b>
2.01 . 49 . 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar Hewan
<b>2.01 . 50</b>	<b>Program Pengembangan Agribisnis Itik</b>
2.01 . 50 . 01	Demplot Usaha Budidaya Itik
<b>2.01 . 51</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Pembibitan dan Budidaya Ternak</b>
2.01 . 51 . 01	Pengembangan Kawasan Usaha Tani Terpadu PPK (Pertanian, Perikanan, Kehutanan)
2.01 . 51 . 02	Pengembangan Kawasan Sapi Potong
2.01 . 51 . 03	Pengembangan Kawasan Kambing Pedaging
2.01 . 51 . 04	Pengembangan Budidaya Kambing
2.01 . 51 . 05	Pengembangan Kawasan Unggas Lokal
<b>2.01 . 52</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan Ayam Ras</b>
2.01 . 52 . 01	Fasilitas Akses Permodalan Kelompok Peternak Ayam Ras
2.01 . 52 . 02	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Ras
<b>2.01 . 53</b>	<b>Program Pembangunan Database pegawai dan penyuluh</b>
2.01 . 53 . 01	Perbaiki sistem administrasi pegawai dan penyuluh
2.01 . 53 . 02	Pengelolaan sistem informasi manajemen penyuluh (simih)

2.01 . 54	<b>Program Ketahanan Energi dan Pupuk Organik</b>
2.01 . 54 . 01	Pemanfaatan Kotoran Ternak untuk Pupuk Organik dan Biogas
2.01 . 55	<b>Program Swasembada Daging Sapi</b>
2.01 . 55 . 01	Optimalisasi Kelahiran Melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE)
2.01 . 55 . 02	Penggemukan Sapi Potong
2.01 . 56	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>
2.01 . 56 . 01	Pemanfaatan dan Pengolahan Pakan Ternak
2.01 . 56 . 02	Penggemukan Sapi Potong
2.01 . 56 . 03	Pengembangan Kawasan Unggas Lokal
2.01 . 56 . 04	Penguatan Pembibitan Sapi PO melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR)
2.01 . 57	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan</b>
2.01 . 57 . 01	Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Strategis dan Zoonosis
2.01 . 57 . 02	Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
2.01 . 57 . 03	Revitalitas Puskesmas
2.01 . 57 . 04	Monitoring dan Evaluasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak
2.01 . 58	<b>Program Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani yang ASUH</b>
2.01 . 58 . 01	Peningkatan Pelayanan kesehatan Masyarakat Veteriner
2.01 . 59	<b>Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan</b>
2.01 . 59 . 01	Lomba Kelompok Peternak dan Petugas Peternakan
2.01 . 59 . 02	Peningkatan SDM Aparatur dan Kelompok Tani Ternak
2.02	<b>Kehutanan</b>
2.02 . 15	<b>Program Pemantapan Batas Definitif Kawasan Hutan</b>
2.02 . 15 . 01	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
2.02 . 15 . 02	Pengembangan hutan tanaman
2.02 . 15 . 03	Pengembangan hasil hutan non kayu
2.02 . 15 . 04	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
2.02 . 15 . 05	Optimalisasi PNPB
2.02 . 15 . 06	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
2.02 . 15 . 07	Pengembangan industri dan pemanfaatan hasil hutan
2.02 . 15 . 08	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
2.02 . 15 . 09	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
2.02 . 15 . 10	Pembuatan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Lampung Selatan
2.02 . 15 . 11	Penanganan Konflik Kawasan
2.02 . 15 . 12	Pembinaan Tata Guna Kawasan Hutan
2.02 . 16	<b>Program Rehabilitasi Lahan</b>
2.02 . 16 . 01	Koordinasi penyelenggaraan dan penghijauan hutan
2.02 . 16 . 02	Pembuatan Bibit Benih Tanaman Kehutanan
2.02 . 16 . 03	Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
2.02 . 16 . 04	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
2.02 . 16 . 05	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 16 . 06	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 16 . 09	Optimalisasi pemanfaatan lahan ( Alokasi desa - desa Miskin ) siger mas
2.02 . 16 . 10	Penghijauan Lahan Kritis dan Peningkatan Produktivitas Lahan
2.02 . 16 . 11	Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS
2.02 . 16 . 12	Dst...
2.02 . 16 . 13	Reboisasi dan Penghijauan serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan, Penyuluhan dan KPH
2.02 . 16 . 14	Dst...
2.02 . 16 . 15	Pembinaan Penghijauan
2.02 . 16 . 16	Pengembangan Hutan Kota Kalianda
2.02 . 16 . 17	Bantuan Pembangunan Agroforestry Park Bekerjasama dengan PERHIPTANI
2.02 . 17	<b>Program Perlindungan Hutan</b>
2.02 . 17 . 01	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
2.02 . 17 . 02	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
2.02 . 17 . 03	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2.02 . 17 . 04	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
2.02 . 17 . 05	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
2.02 . 17 . 06	Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan
2.02 . 17 . 07	Pembinaan Kader Konservasi dan Saka Wana Bakti
2.02 . 17 . 08	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan
2.02 . 17 . 09	Penyelesaian Kasus - Kasus di bidang kehutanan
2.02 . 18	<b>Program Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan</b>
2.02 . 18 . 01	Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah
2.02 . 18 . 02	Pengembangan Hutan Kemasyarakatan ( HKM)
2.02 . 18 . 03	Pemberdayaan Masyarakat Desa sekitar kawasan hutan
2.02 . 19	<b>Program pembinaan Penatausahaan hasil hutan</b>
2.02 . 19 . 01	Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2.02 . 19 . 02	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2.02 . 19 . 03	Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2.02 . 19 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.02 . 19 . 06	Pembinaan dan Monitoring Penatausahaan Hasil Hutan
2.02 . 19 . 07	Intensifikasi Penarikan PAD
2.02 . 19 . 08	Pembinaan dan Inventarisasi Hutan Rakyat
2.02 . 19 . 09	Pembinaan hutan tanaman rakyat
<b>2.02 . 20</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</b>
2.02 . 20 . 01	Pengembangan hutan masyarakat
2.02 . 20 . 02	Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat
2.02 . 20 . 03	Dst ...
<b>2.02 . 21</b>	<b>Program Penyelenggaraan Litbang dan Perencanaan Kehutanan</b>
2.02 . 21 . 01	Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi hutan Dan Lahan ( RPRHL )
2.02 . 21 . 02	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( RTnRHL )
2.02 . 21 . 03	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Kehutanan
<b>2.02 . 22</b>	<b>Program Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Hutan</b>
2.02 . 22 . 01	Pembinaan dan Pengembangan Hkn
2.02 . 22 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Hutan Desa
<b>2.02 . 23</b>	<b>Program Pembinaan Aneka Usaha Kehutanan</b>
2.02 . 23 . 01	Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Lebah Madu
<b>2.03</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>
<b>2.03 . 15</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</b>
2.03 . 15 . 01	Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
2.03 . 15 . 02	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C/ Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
2.03 . 15 . 03	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan/Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan pertambangan umum, tambang rakyat dan air bawah tanah
2.03 . 15 . 04	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
2.03 . 15 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.03 . 15 . 06	Intensifikasi Pendapatan Pajak Bahan Galian C dan Pemantauan Dana Bagi Hasil Migas, PBBKAB dan ABT/AP
2.03 . 15 . 07	Studi Perencanaan Penetapan harga Dasar Bahan Galian C
2.03 . 15 . 08	Pembinaan dan Penyuluhan serta Sosialisasi Perda dan SK Bupati Bidang Pertambangan dan Energi
2.03 . 15 . 10	Pemetaan geologi, pengawasan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2.03 . 15 . 11	Monitoring pembinaan dan pengawasan pertambangan umum
2.03 . 15 . 12	Pameran Promosi pembangunan pertambangan
2.03 . 15 . 13	Pembinaan Pengusaha Tambang
<b>2.03 . 16</b>	<b>Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak</b>
2.03 . 16 . 01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat/Workahop dan pelatihan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)
2.03 . 16 . 02	Dst...
<b>2.03 . 17</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrik/Program pengelolaan</b>
2.03 . 17 . 01	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan/Penyusunan Sistem Informasi Pertambangan Lampung Selatan serta Evaluasi dan Rencana Listrik Pedesaan
2.03 . 17 . 02	Sosialisasi UU, PP dan Perda Bidang Pertambangan
2.03 . 17 . 03	Pemetaan Penyebaran Potensi Bahan Galian
<b>2.03 . 18</b>	<b>Program Pengelolaan pengembangan energi alternatif</b>
2.03 . 18 . 01	Persiapan pengembangan desa mandiri energi
2.03 . 18 . 02	Pematokan dan pemetaan ulang batas wilayah pertambangan
2.03 . 18 . 03	Work shop, sosialisasi dan pelatihan energi baru terbarukan
2.03 . 18 . 04	Pembinaan dan pengawasan potensi energi baru terbarukan
<b>2.03 . 19</b>	<b>Program Minyak, Gas Bumi dan Kelistrikan</b>
2.03 . 19 . 01	Pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kabupaten Lampung Selatan ( SIGER MAS )
2.03 . 19 . 02	Pengawasan usaha kelistrikan serta pemanfaatan energi
2.03 . 19 . 03	Pengawasan usaha kelistrikan dan Pemeliharaan Lampu Jalan
2.03 . 19 . 04	Konsultasi dan Pengawasan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi
2.03 . 19 . 05	Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Minyak dan Gas Bumi
2.03 . 19 . 06	Pendataan, Pendistribusian Minyak dan Gas Bumi
2.03 . 19 . 07	Pengawasan dan inventarisasi ketenaga listrik
<b>2.03 . 20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>
2.03 . 20 . 01	Pengembangan Potensi Panas Bumi
<b>2.03 . 21</b>	<b>Program Pengawasan Distribusi Penimbunan BBM dan Gas Bumi</b>
2.03 . 21 . 01	Penggunaan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi
<b>2.03 . 22</b>	<b>Program Pembinaan pengawasan serta pengembangan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah</b>
2.03 . 22 . 01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Pemanfaatan Air Tanah
2.03 . 22 . 02	Penelitian dan Pemetaan Air Tanah di Kabupaten Lampung Selatan
2.03 . 22 . 03	Penelitian Potensi Mineral dan Pemetaan Zonasi Mitigasi Bencana Alam
2.03 . 22 . 04	Survei dan Penyusunan Data Sumber Daya Mineral dan Pengawasan Air Tanah
2.03 . 22 . 05	Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

2.03 . 23	<b>Program Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan</b>
2.03 . 23 . 01	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan
2.03 . 23 . 02	Sosialisasi Pelaksanaan K3 dan Tata Cara penambangan yang Berwawasan Lingkungan
2.03 . 23 . 03	Pengawasan Terhadap Penerapan K3 dan Pelaksanaan Konversi Lingkungan
2.03 . 24	<b>Program Pembinaan Usaha Pertambangan</b>
2.03 . 24 . 01	Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan
2.03 . 24 . 02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Peningkatan PAD
2.03 . 25	<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pertambangan</b>
2.03 . 25 . 01	Pengawasan Usaha Kelistrikan dan Pemeliharaan Lampu Jalan/Lampu Hias dan Taman
2.03 . 25 . 02	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum
2.03 . 25 . 03	Pengawasan Eksplorasi Panas Bumi Gunung Rajabasa
2.03 . 25 . 04	Pengawasan/Pembinaan dan Inventarisasi Ketenaga Listrik
2.03 . 26	<b>Program Desa Mandiri Energi</b>
2.03 . 26 . 01	Penyusunan Rencana Implementasi Desa Mandiri Energi
2.03 . 26 . 02	Pemasangan Lampu Jalan & perencanaan Kelistrikan Desa Talang baru, Sidomulyo
2.03 . 26 . 03	Penelitian dan Pengembangan Energi Terbarukan
2.03 . 27	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang pertambangan, Energi dan Kelistrikan</b>
2.03 . 27 . 01	Penyusunan regulasi mengenai Kegiatan pertambangan, Energi, dan Kelistrikan
2.03 . 28	<b>Program Pengadaan Lampu Penerangan Jalan</b>
2.03 . 28 . 01	Perencanaan Pembangunan Pemasangan Lampu Jalan di Kabupaten Lampung Selatan
2.03 . 28 . 02	Pengawasan Usaha Kelistrikan dan Pemeliharaan Lampu Jalan Umum
2.03 . 28 . 03	Penatausahaan LPJU Milik Daerah se-Kabupaten Lampung Selatan
2.03 . 28 . 04	Pemasangan Lampu Jalan, Instalasi Listrik dan Arus PLN
2.03 . 29	<b>Program Penelitian Potensi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan</b>
2.03 . 29 . 01	Pembinaan dan Pengawasan Potensi Energi Baru Terbarukan
2.03 . 29 . 02	Monitoring Pemanfaatan potensi Energi Terbarukan di Kabupaten Lampung Selatan
2.04	<b>Pariwisata</b>
2.04 . 15	<b>Program Pengembangan Pemasaran pariwisata</b>
2.04 . 15 . 01	Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata Lampung Selatan
2.04 . 15 . 02	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
2.04 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
2.04 . 15 . 06	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
2.04 . 15 . 07	Pemantauan obyek-obyek wisata
2.04 . 15 . 08	Pembuatan media promosi pariwisata
2.04 . 15 . 09	Pengembangan standbooth anjungan Lam-Sel di TMII
2.04 . 15 . 10	Promosi Wisata Bahari Pesisir Lampung Selatan
2.04 . 15 . 11	Pelaksanaan Sepeda Wisata Lampung Selatan
2.04 . 16	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>
2.04 . 16 . 01	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
2.04 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan Prasarana pariwisata
2.04 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
2.04 . 16 . 06	Pengembangan daerah tujuan wisata
2.04 . 16 . 07	Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi
2.04 . 16 . 08	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
2.04 . 16 . 09	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Pesanggrahan Pulau Sebesi
2.04 . 16 . 10	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Pemandian Way Belerang Kalianda
2.04 . 16 . 11	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Pemandian Way Belerang Simpur
2.04 . 16 . 12	Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
2.04 . 16 . 13	Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata
2.04 . 16 . 14	Pelatihan Penjaga Pantai
2.04 . 17	<b>Program Pengembangan kemitraan</b>
2.04 . 17 . 01	Pengembangan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan dan Pariwisata
2.04 . 17 . 02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
2.04 . 17 . 03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.05	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
2.05 . 15	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>
2.05 . 15 . 01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
2.05 . 15 . 02	Pendampingan Program PEMP, PLBPM dan Inventarisasi Kawasan Lingkungan Pemukiman Nelayan Calon Penerima Bantuan Program PLBPM
2.05 . 15 . 03	Peningkatan sarana dan prasarana di Pulau-pulau kecil
2.05 . 15 . 04	Pengelolaan terpadu wilayah kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil
2.05 . 15 . 05	Sosialisasi, Pembinaan Kelompok, Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Kecil
2.05 . 15 . 06	Penyediaan Sumber mata pencaharian alternatif dan penguatan cinta bahari masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
2.05 . 15 . 07	Pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (DAK)

2.05 . 15 . 08	Sosialisasi Perda Nomor 18 tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil
2.05 . 16	<b>Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya</b>
2.05 . 16 . 01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
2.05 . 16 . 02	Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K)
2.05 . 16 . 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan (DAK + APBD)
2.05 . 16 . 04	Pembangunan Garasi Kapal Pengawas Perikanan
2.05 . 16 . 05	Pengadaan kendaraan pengawas kelautan dan perikanan
2.05 . 17	<b>Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut</b>
2.05 . 17 . 01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
2.05 . 17 . 02	Rumponisasi dan Pengawasan Sumber Daya Laut
2.05 . 17 . 03	Pengawasan Sumberdaya laut
2.05 . 17 . 04	Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
2.05 . 17 . 05	Dst ...
2.05 . 18	<b>Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat</b>
2.05 . 18 . 01	Penyuluhan budaya kelautan
2.05 . 18 . 02	Dst ...
2.05 . 19	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>
2.05 . 19 . 01	Pengembangan Budidaya Perikanan di Kawasan Potensial
2.05 . 19 . 02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2.05 . 19 . 03	Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.05 . 19 . 04	Pengembangan Budidaya Air Tawar Kawasan Unggulan Kecamatan Tanjung Bintang
2.05 . 19 . 05	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pengawasan budidaya air payau
2.05 . 19 . 06	Pilot Project Rumput Laut
2.05 . 19 . 07	Budidaya perikanan dalam rangka menunjang Siger Mas
2.05 . 19 . 08	Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK+APBD)
2.05 . 19 . 09	Pengembangan Budidaya Air Tawar Kawasan Unggulan Kecamatan Palas
2.05 . 19 . 10	Pengembangan Budidaya Air Tawar Kawasan Unggulan Kecamatan Tanjung Bintang
2.05 . 19 . 11	Pengembangan Kawasan Unggulan Minapolitan Ketapang
2.05 . 19 . 12	Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan Melalui Restocking di Perairan Umum
2.05 . 19 . 13	Pengembangan Budidaya Perikanan di Kawasan Potensial
2.05 . 19 . 14	Sosialisasi pemanfaatan sarana prasarana demfarm budidaya
2.05 . 20	<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>
2.05 . 20 . 01	Pendampingan pada kelompok nelayan
2.05 . 20 . 02	Pembangunan dan pengembangan pusat pendaratan ( PPI ) Kalianda
2.05 . 20 . 03	Pemeliharaan rutin berkala tempat pelelangan ikan
2.05 . 20 . 04	Rehabilitasi sedang berat tempat pelelangan ikan
2.05 . 20 . 05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
2.05 . 20 . 06	Pembangunan TPI Bakau Heni
2.05 . 20 . 07	Rehabilitasi dan pengembangan TPI Ketapang
2.05 . 20 . 08	Pembangunan dan pengembangan sarana perikanan tangkap
2.05 . 20 . 09	Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK + APBD)
2.05 . 20 . 10	Pengadaan Kapal Patroli Pengawasan Perikanan (DAK + APBD)
2.05 . 20 . 11	Pengembangan armada tangkap dan alat tangkap
2.05 . 20 . 12	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Monitoring Evaluasi KUE dan Kapal Inka Mina
2.05 . 20 . 13	Peningkatan Sumber Daya Nelayan Perikanan Tangkap
2.05 . 20 . 14	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Tangkap
2.05 . 20 . 15	Pengembangan Sarana PPI Kalianda
2.05 . 21	<b>Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan (DAK + APBD)</b>
2.05 . 21 . 01	Kajian sistem penyuluhan perikanan
2.05 . 21 . 02	Penyediaan Sarana Penyuluh Perikanan (DAK + APBD)
2.05 . 22	<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>
2.05 . 22 . 01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2.05 . 22 . 02	Promosi pembangunan perikanan
2.05 . 22 . 03	Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemasaran (DAK+APBD)
2.05 . 23	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>
2.05 . 23 . 01	Kajian kawasan budidaya laut air payau dan air tawar
2.05 . 23 . 02	Operasional kawasan budidaya air payau dan air tawar
2.05 . 23 . 03	Pengembangan Kawasan Budidaya (DAK+APBD)
2.05 . 24	<b>Program Peningkatan Mutu Produksi Pasca Panen Perikanan</b>
2.05 . 24 . 01	Pembinaan produksi pasca panen perikanan dalam rangka mendukung Minapolitan
2.05 . 24 . 02	Pelatihan dan pengolahan pasca panen hasil kelautan dan perikanan
2.05 . 25	<b>Program Pengembangan Statistik Kelautan dan perikanan</b>
2.05 . 25 . 01	Penyediaan Sarana Statistik Perikanan (DAK+APBD)
2.05 . 26	<b>Program Peningkatan Pembangunan Perikanan</b>
2.05 . 26 . 01	Inventarisasi Data Kelautan dan Perikanan
2.05 . 27	<b>Program Peningkatan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perikanan</b>

2.05 . 27 . 01	Penyusunan Profil Perikanan dalam Rangka Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perikanan
<b>2.06</b>	<b>Perdagangan</b>
<b>2.06 . 15</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>
2.06 . 15 . 01	Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
2.06 . 15 . 02	Fasilitas penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
2.06 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.06 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah
2.06 . 15 . 05	Pengadaan tabung pemadam kebakaran
2.06 . 15 . 06	Sosialisasi Undang-undang Metrologi legal dan perlindungan konsumen
2.06 . 15 . 07	Pengawasan BDKT, UTTP dan barang-barang yang beredar dipasaran
2.06 . 15 . 08	Fasilitasi Oprasional Sarana dan Prasarana Kemetrollogian
2.06 . 15 . 09	Pendataan sarana dan Prasarana Kemetrollogian
2.06 . 15 . 10	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen
<b>2.06 . 16</b>	<b>Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional</b>
2.06 . 16 . 01	Penyiapan database kuota setiap jenis barang dan jasa
2.06 . 16 . 02	Penyebarluasan informasi database kuota
2.06 . 16 . 03	Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
2.06 . 16 . 04	Fasilitas penyelesaian sengketa dagang
2.06 . 16 . 05	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
2.06 . 16 . 06	Dst ...
<b>2.06 . 17</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>
2.06 . 17 . 01	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
2.06 . 17 . 02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
2.06 . 17 . 03	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
2.06 . 17 . 04	Pengembangan database informasi potensi unggulan
2.06 . 17 . 05	Kerjasama standarisasi mutu baik nasional, bateral, regional dan internasional
2.06 . 17 . 06	Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk
2.06 . 17 . 07	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
2.06 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir
2.06 . 17 . 09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait
2.06 . 17 . 10	Pengembangan kluster ekspor
2.06 . 17 . 11	Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
2.06 . 17 . 12	Pengembangan promosi perdagangan internasional
2.06 . 17 . 13	Dst.....
<b>2.06 . 18</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>
2.06 . 18 . 01	Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional
2.06 . 18 . 02	Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan usaha
2.06 . 18 . 03	Pembangunan Pasar dan Distribusi Barang Produk
2.06 . 18 . 08	Pengadaan konstruksi/pengembangan pasar
2.06 . 18 . 09	Pengembangan informasi pasar dan distribusi barang
2.06 . 18 . 10	Pasar murah dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri
2.06 . 18 . 11	Pengadaan kontruksi/pengembangan pasar (Lanjutan)
2.06 . 18 . 12	Monitoring dan Evaluasi Harga Sembako dan Barang Penting lainnya
2.06 . 18 . 13	Pengadaan Kontruksi/ Pengembangan Gudang
2.06 . 18 . 14	Bimbingan dan Penyuluhan Sistem Resi Gudang
2.06 . 18 . 15	Sosialisasi dan Perencanaan Pembangunan Pasar
2.06 . 18 . 16	Pameran dan Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten
2.06 . 18 . 17	Pembuatan Profil Perusahaan dan Pemetaan Lokasi Perusahaan
2.06 . 18 . 18	Pengadaan Konstruksi/Pengembangan Pasar/Gudang
2.06 . 18 . 19	Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Resi Gudang
2.06 . 18 . 20	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pada Pasar Pemda
2.06 . 18 . 21	Penunjang Pembangunan Pasar
2.06 . 18 . 22	Penunjang Oprasional gudang
2.06 . 18 . 23	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perdagangan
2.06 . 18 . 24	Partisipasi Pameran Lampung Selatan Fair dan Lampung Fair
2.06 . 18 . 25	Penyusunan Prognose Kebutuhan Pokok Masyarakat
<b>2.06 . 19</b>	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan</b>
2.06 . 19 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
2.06 . 19 . 02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
2.06 . 19 . 03	Kegiatan penataan tempat usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
2.06 . 19 . 04	Kegiatan fasilitas modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
2.06 . 19 . 05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan
2.06 . 19 . 06	Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan
2.06 . 19 . 07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar
2.06 . 19 . 08	Pembinaan dan penyuluhan perdagangan dan perlindungan konsumen
2.06 . 19 . 09	Pembinaan Pasar Desa dalam rangka mendukung Lomba Desa
2.06 . 19 . 10	Lomba UPT Pasar PEMDA Se-Kab. Lampung Selatan
2.06 . 19 . 11	Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar PEMDA Kab.Lampung Selatan
2.06 . 19 . 12	Kegiatan pembinaan Pasar Desa
2.06 . 19 . 13	Sosialisasi Perundangan Pengelolaan Pasar
2.06 . 19 . 14	Pengadaan Cetak Karcis dan Blanko Retribusi Pasar
<b>2.06 . 20</b>	<b>Program Pengawasan Kebersihan Dan Ketertiban Pasar</b>
2.06 . 20 . 01	Pengawasan kebersihan dan ketertiban pasar Pemda Kab. Lampung Selatan

2.06 . 21	<b>Program Pengelolaan Pasar</b>
2.06 . 21 . 01	Penyusunan data/informasi pedagang pasar
2.06 . 22	<b>Bimbingan dan Penyuluhan (Bimbuluh) Perlindungan Konsumen</b>
2.06 . 22 . 01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
2.06 . 22 . 02	Fasilitas penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
2.06 . 22 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.06 . 22 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2.06 . 22 . 05	Pengadaan tabung pemadam kebakaran
2.06 . 22 . 06	Sosialisasi Undang-undang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen
2.06 . 22 . 07	Pengawasan BDKT, UTTP dan Barang-barang yang beredar dipasaran
2.07	<b>Perindustrian</b>
2.07 . 15	<b>Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>
2.07 . 15 . 01	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi
2.07 . 15 . 02	Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator
2.07 . 15 . 03	Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi
2.07 . 15 . 04	Pengembangan kapasitas penata pengukuran standarisasi pengujian dan kualitas
2.07 . 15 . 05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
2.07 . 15 . 06	Pengawasan BDKT, UTTP dan barang-barang yang beredar dipasaran
2.07 . 15 . 07	Bimbingan penyuluhan (BIMBULUH) perlindungan konsumen
2.07 . 16	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>
2.07 . 16 . 01	Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya
2.07 . 16 . 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
2.07 . 16 . 03	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
2.07 . 16 . 04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
2.07 . 16 . 05	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
2.07 . 16 . 06	Fasilitas kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
2.07 . 16 . 07	Pelatihan Keterampilan Industri Bordir
2.07 . 16 . 08	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan
2.07 . 16 . 09	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan
2.07 . 16 . 10	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan
2.07 . 16 . 11	Promosi dan motivasi industri dagang kecil dan menengah
2.07 . 16 . 12	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil Genteng
2.07 . 16 . 13	Promosi dan Motivasi Industri Dagang Kecil dan Menengah
2.07 . 16 . 14	Pelatihan Motivasi Berprestasi (AMT)
2.07 . 16 . 15	Pelatihan ketrampilan industri kecil pengolahan pisang
2.07 . 16 . 16	Pembinaan dan Pendataan Koperasi, Industri dan Perdagangan
2.07 . 16 . 17	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil Kerajinan Kain Perca
2.07 . 16 . 18	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil Batok Kelapa
2.07 . 16 . 19	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Permasalahan LPG 3 KG
2.07 . 16 . 20	Pelatihan Keterampilan Produk Unggulan Industri Kecil Keripik Pisang
2.07 . 16 . 21	Pelatihan dan bantuan peralatan ketrampilan produk unggulan sentra kerajinan industri
2.07 . 16 . 22	Penunjang dan Operasional Dekranasda
2.07 . 16 . 23	Rehabilitasi Gedung Pamer Industri Kecil
2.07 . 16 . 24	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil Perbengkelan Las
2.07 . 16 . 25	Pengembangan Ekonomi Kreatif
2.07 . 16 . 26	Inventarisasi dan Pembinaan Industri Kecil Menengah
2.07 . 16 . 27	Penyusunan Media Informasi
2.07 . 16 . 28	Pelatihan ketrampilan industri kecil kerajinan tuping
2.07 . 16 . 29	Pelatihan dan Bantuan Keterampilan Industri Kecil Maubeler dan Sulam usus
2.07 . 16 . 30	Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri Kecil Pengelolaan Ikan
2.07 . 16 . 31	Fasilitasi kerjasama diantar pelaku usaha
2.07 . 16 . 32	Pameran dan promosi tingkat kabupaten
2.07 . 16 . 33	Pameran Ekonomi Kreatif dan Inovatif
2.07 . 16 . 34	Pendataan dan Inventarisasi Produk Unggulan Kabupaten Lampung Selatan
2.07 . 16 . 35	Pendataan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.07 . 17	<b>Penyusunan Media Informasi</b>
2.07 . 17 . 01	Pembinaan kemampuan teknologi industri
2.07 . 17 . 02	Dst...
2.07 . 18	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>
2.07 . 18 . 01	Kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir
2.07 . 18 . 02	Pengembangan informasi pasar dan distribusi barang
2.07 . 19	<b>Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial</b>
2.07 . 19 . 01	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial
2.07 . 19 . 02	Penyuluhan peningkatan disiplin dan pengetahuan pedagang golongan ekonomi lemah
2.07 . 20	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>
2.07 . 20 . 01	Pembinaan terpadu pengembangan komoditi ekspor
2.07 . 21	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>
2.07 . 21 . 01	Pengembangan Informaasi Pasar dan Distribusi Barang
2.07 . 22	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>
2.07 . 22 . 01	Penyuluhan peningkatan disiplin dan pengetahuan pedagang golongan ekonomi lemah

✓

<b>2.07 . 23</b>	<b>Program Pembinaan Kaki Lima dan Asongan</b>
2.07 . 23 . 01	Pengawasan BDKT, UTTP dan Barang-Barang yang Beredar Dipasaran
2.07 . 23 . 02	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan
2.07 . 23 . 03	Bimbingan dan Penyuluhan (Bimbuluh) Perlindungan Konsumen
<b>2.08</b>	<b>Transmigrasi</b>
<b>2.08 . 15</b>	<b>Program Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi</b>
2.08 . 15 . 01	Penyuluhan Ketransmigrasian dalam rangka penjangkauan animo masyarakat
2.08 . 15 . 02	Penyuluhan Paradigma baru Transmigrasi di Era Otonomi Daerah
2.08 . 15 . 03	Pengembangan Transmigrasi Melalui Pembinaan Peningkatan SDM di bidang Usaha Pertanian dan Keterampilan Kejuruan
2.08 . 15 . 04	Pembinaan Ketransmigrasian di bidang Prasarana Fisik dengan Pola Padat Karya
2.08 . 15 . 05	Pengiriman dan Penempatan Transmigrasi ke Luar Daerah
2.08 . 15 . 06	Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman Transmigrasi
<b>2.08 . 16</b>	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>
2.08 . 16 . 01	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
2.08 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
2.08 . 16 . 03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
2.08 . 16 . 04	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang membantu modal usaha dikawasan transmigrasi
2.08 . 16 . 05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
<b>2.08 . 17</b>	<b>Program Transmigrasi lokal</b>
2.08 . 17 . 01	Penyuluhan transmigrasi lokal
2.08 . 17 . 02	Pelatihan transmigrasi lokal
<b>2.08 . 18</b>	<b>Program transmigrasi regional</b>
2.08 . 18 . 01	Penyuluhan transmigrasi regional
2.08 . 18 . 02	Pelatihan transmigrasi regional

PJ. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KHERLANI



**LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : A2 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 10 November 2015**

**KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING	URAIAN
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>Pajak Hotel</b>
4.1.1.01.01	Hotel Bintang Lima Berlian
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu
4.1.1.01.10	Motel
4.1.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata
4.1.1.01.14	Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4.1.1.01.15	Gubuk Pariwisata
4.1.1.01.16	Pesanggrahan
4.1.1.01.17	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
<b>4.1.1.02</b>	<b>Pajak Restoran</b>
4.1.1.02.01	Restoran
4.1.1.02.02	Rumah Makan
4.1.1.02.03	Café
4.1.1.02.04	Kantin
4.1.1.02.05	Katering
4.1.1.02.06	Warung
4.1.1.02.07	Bar
<b>4.1.1.03</b>	<b>Pajak Hiburan</b>
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan
4.1.1.03.04	Kontes Binaraga
4.1.1.03.05	Pameran
4.1.1.03.06	Diskotik
4.1.1.03.07	Karaoke
4.1.1.03.08	Klub Malam
4.1.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap
4.1.1.03.10	Permainan Biliar
4.1.1.03.11	Permainan Golf
4.1.1.03.12	Permainan Bowling
4.1.1.03.13	Pacuan Kuda
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga
<b>4.1.1.04</b>	<b>Pajak Reklame</b>
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron
4.1.1.04.02	Reklame Kain
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan
4.1.1.04.06	Reklame Udara
4.1.1.04.07	Reklame Apung
4.1.1.04.08	Reklame Suara
4.1.1.04.09	Reklame Film/Slide

4.1.1.04.10	Reklame Peragaan
<b>4.1.1.05</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
<b>4.1.1.06</b>	<b>Dihapus ....</b>
4.1.1.06.01	Asbes
4.1.1.06.02	Batu Tulis
4.1.1.06.03	Batu Setengah Permata
4.1.1.06.04	Batu Kapur
4.1.1.06.05	Batu Apung
4.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali
4.1.1.06.07	Sirtu
4.1.1.06.08	Pasir
4.1.1.06.09	Tanah Timbun
4.1.1.06.10	Batu Pecah/Kerikil
4.1.1.06.11	Batu Permata
4.1.1.06.12	Bentonit
4.1.1.06.13	Dolomit
4.1.1.06.14	Feldspar
4.1.1.06.15	Garam Batu (Halite)
4.1.1.06.16	Grafit
4.1.1.06.17	Granit/Andesit
4.1.1.06.18	Gips
4.1.1.06.19	Kalsit
4.1.1.06.20	Kaolin
4.1.1.06.21	Leusit
4.1.1.06.22	Magnesit
4.1.1.06.23	Mika
4.1.1.06.24	Marmar
4.1.1.06.25	Nitrat
4.1.1.06.26	Opasidien
4.1.1.06.27	Oker
4.1.1.06.28	Pasir Kuarea
4.1.1.06.29	Perlit
4.1.1.06.30	Phospat
4.1.1.06.31	Talk
4.1.1.06.32	Tanah Serap (Fullers earth)
4.1.1.06.33	Tanah Liat
4.1.1.06.34	Tawas (Alum)
4.1.1.06.35	Tras
4.1.1.06.36	Yarosif
4.1.1.06.37	Zeolit
4.1.1.06.38	Basal
4.1.1.06.39	Trakit
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya
<b>4.1.1.07</b>	<b>Pajak Parkir</b>
4.1.1.07.01	Pajak Parkir
<b>4.1.1.08</b>	<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah
<b>4.1.1.09</b>	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet
<b>4.1.1.10</b>	<b>Dihapus ....</b>
4.1.1.10.01	Pajak Lingkungan
<b>4.1.1.11</b>	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>
4.1.1.11.01	Asbes
4.1.1.11.02	Batu Tulis
4.1.1.11.03	Batu Setengah Permata
4.1.1.11.04	Batu Kapur
4.1.1.11.05	Batu Apung
4.1.1.11.06	Des...
<b>4.1.1.12</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan

KODING	URAIAN
4.1.1.12.02	PBB Sektor Perdesaan
<b>4.1.1.13</b>	<b>Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak
4.1.1.13.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru
<b>4.1.2</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas keliling
4.1.2.01.03	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas pembantu
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Kesehatan Balai Pengobatan
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.08	Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah
4.1.2.01.10	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil - KTP
4.1.2.01.11	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keterangan Bertempat Tinggal
4.1.2.01.12	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Kerja
4.1.2.01.13	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Penduduk Sementara
4.1.2.01.14	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Penduduk Musiman
4.1.2.01.15	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keluarga
4.1.2.01.16	Retribusi Penggantian Biaya Akta Catatan Sipil
4.1.2.01.17	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman
4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios
4.1.2.01.23	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan
4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck
4.1.2.01.31	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
4.1.2.01.32	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
4.1.2.01.33	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
4.1.2.01.35	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran
4.1.2.01.36	Retribusi Alat Penyelamatan Jiwa
4.1.2.01.37	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis)
4.1.2.01.38	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Foto
4.1.2.01.39	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Digital
4.1.2.01.40	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Tematik
4.1.2.01.41	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
4.1.2.01.42	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan
4.1.2.01.43	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis
4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA
<b>4.1.2.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor
4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
4.1.2.02.06	Retribusi Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
4.1.2.02.07	Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat pelelangan Ternak
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Bumi
4.1.2.02.11	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan

	URAIAN
4.1.2.02.12	Retribusi Tempat Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
4.1.2.02.14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha
4.1.2.02.15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong
4.1.2.02.19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong
4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi
4.1.2.02.22	Retribusi Tempat Pariwisata
4.1.2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga
4.1.2.02.24	Retribusi Penyebrangan Orang
4.1.2.02.25	Retribusi Pelayanan Penyebrangan Barang
4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.02.27	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga
4.1.2.02.28	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Perkantoran
4.1.2.02.29	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Industri
4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
<b>4.1.2.03</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan
4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi
4.1.2.03.08	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan
4.1.2.03.09	Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
4.1.2.03.10	Retribusi Penggunaan Koridor Tertentu
4.1.2.03.11	Retribusi Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perscorangan dan Barang
4.1.2.03.12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA
<b>4.1.3</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .....
<b>4.1.3.02</b>	<b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN</b>
4.1.3.02.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
<b>4.1.3.03</b>	<b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta</b>
4.1.3.03.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta
<b>4.1.4</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>
<b>4.1.4.01</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas
4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4.1.4.01.09	Penjualan Lampu Hias Bekas
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
4.1.4.01.11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4.1.4.01.12	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian
4.1.4.01.14	Penjualan Hasil Kehutanan
4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan

4.1.4.01.18	Penjualan Hasil Sitaan
4.1.4.01.19	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
<b>4.1.4.02</b>	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas
4.1.4.02.03	Jasa Giro Dana Cadangan
<b>4.1.4.03</b>	<b>Penerimaan Bunga Deposito</b>
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank .....
4.1.4.03.02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir .....
<b>4.1.4.04</b>	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)</b>
4.1.4.04.01	Kerugian Uang
4.1.4.04.02	Kerugian Barang
<b>4.1.4.05</b>	<b>Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah</b>
4.1.4.05.01	Penerimaan Komisi Dari Penempatan Kas Daerah
4.1.4.05.02	Penerimaan Potongan Dari .....
4.1.4.05.03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Dari .....
<b>4.1.4.06</b>	<b>Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum
4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan
4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup
4.1.4.06.09	Bidang Pertanahan
4.1.4.06.10	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
4.1.4.06.11	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.1.4.06.12	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
<b>4.1.4.07</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
<b>4.1.4.08</b>	<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4.1.4.08.04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.1.4.08.05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.1.4.08.06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1.4.08.08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.4.08.09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.4.08.10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4.1.4.08.11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4.1.4.08.12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.4.08.13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.1.4.08.14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.4.08.15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.4.08.16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
4.1.4.08.17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.4.08.18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal
4.1.4.08.19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir

4.1.4.08.20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
4.1.4.08.21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.4.08.22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.4.08.23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
4.1.4.08.24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air
4.1.4.08.25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.4.08.26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.4.08.27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.1.4.08.28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan
4.1.4.08.29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek
4.1.4.08.30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan
4.1.4.08.31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4.1.4.08.32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
<b>4.1.4.09</b>	<b>Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan</b>
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.09.02	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pembongkaran Reklame
4.1.4.09.03	Hasil Eksekusi Jaminan Atas KTP Musiman
<b>4.1.4.10</b>	<b>Pendapatan Dari Pengembalian</b>
4.1.4.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.4.10.02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.4.10.05	Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka
<b>4.1.4.11</b>	<b>Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</b>
4.1.4.11.01	Fasilitas Sosial
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum
<b>4.1.4.12</b>	<b>Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>
4.1.4.12.01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4.1.4.12.02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan
4.1.4.12.03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas
<b>4.1.4.13</b>	<b>Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan</b>
4.1.4.13.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
4.1.4.13.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
<b>4.1.4.14</b>	<b>Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</b>
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
4.1.4.14.02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan
4.1.4.14.03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah
4.1.4.14.04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna
<b>4.1.4.15</b>	<b>Pendapatan Zakat</b>
4.1.4.15.01	Pendapatan Zakat
<b>4.1.4.16</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
4.1.4.16.02	Pendapatan Hibah BLUD
4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD
<b>4.1.4.17</b>	<b>Hasil dari pengelolaan dana bergulir</b>
4.1.4.17.01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir
<b>4.1.4.18</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
<b>4.1.4.19</b>	<b>Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda</b>
4.1.4.19.01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
<b>4.1.4.20</b>	<b>Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah</b>
4.1.4.20.01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah
4.1.4.20.02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah
4.1.4.20.03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah
4.1.4.20.04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna

4.1.4.21	<b>Hasil Penjualan Aset Lainnya</b>
4.1.4.21.01	Hasil Penjualan Aset Lainnya
4.1.4.22	<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN</b>
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN
4.1.4.23	<b>Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat</b>
4.1.4.23.01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah
4.1.4.23.02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>
4.2.1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>
4.2.1.01	<b>Bagi Hasil Pajak</b>
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
4.2.1.01.02	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
4.2.1.02	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>
4.2.1.02.01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum
4.2.3	<b>Dana Alokasi Khusus</b>
4.2.3.01	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan
4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
4.2.3.01.07	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian
4.2.3.01.10	DAK Bidang Lingkungan Hidup
4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana
4.2.3.01.12	DAK Bidang Kehutanan
4.2.3.01.13	DAK Bidang Sarana Prasarana Perdesaan
4.2.3.01.14	DAK Bidang Perdagangan
4.2.3.01.15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4.2.3.01.16	DAK Bidang Listrik Perdesaan
4.2.3.01.17	DAK Bidang Sarana Prasarana Daerah Tertinggal
4.2.3.01.18	DAK Bidang Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan
4.2.3.01.19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>
4.3.1.01	<b>Pendapatan Hibah Dari Pemerintah</b>
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
4.3.1.02	<b>Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya</b>
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah
4.3.1.03	<b>Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri</b>
4.3.1.03.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta .....

<b>4.3.1.04</b>	<b>Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan</b>
4.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat
4.3.1.04.02	Pendapatan Hibah dari perorangan
<b>4.3.1.05</b>	<b>Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri</b>
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral
4.3.1.05.02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya
<b>4.3.2</b>	<b>Dana Darurat</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam</b>
4.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam .....
<b>4.3.3</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>
<b>4.3.3.01</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi</b>
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.04	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
<b>4.3.3.02</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi</b>
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
<b>4.3.3.03</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten</b>
4.3.3.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten
<b>4.3.3.04</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota</b>
4.3.3.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota
<b>4.3.3.05</b>	<b>Dana Bagi hasil Lainnya</b>
4.3.3.05.01	Dana Bagi hasil Lainnya
<b>4.3.4</b>	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>
<b>4.3.4.01</b>	<b>Dana Penyesuaian</b>
4.3.4.01.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah
4.3.4.01.04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi
4.3.4.01.05	Bantuan Operasional Sekolah
<b>4.3.4.02</b>	<b>Dana Otonomi Khusus</b>
4.3.4.02.01	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.02.02	Dana Tambahan Infrastruktur
<b>4.3.4.03</b>	<b>Dana Keistimewaan</b>
4.3.4.03.01	Dana Keistimewaan
<b>4.3.5</b>	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>
<b>4.3.5.01</b>	<b>Bantuan Keuangan Dari Provinsi</b>
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi .....
<b>4.3.5.02</b>	<b>Bantuan Keuangan Dari Kabupaten</b>
4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten....
<b>4.3.5.03</b>	<b>Bantuan Keuangan Dari Kota</b>
4.3.5.03.01	Bantuan Keuangan Dari Kota.....
<b>4.3.6</b>	<b>Pendapatan Lainnya</b>
<b>4.3.6.01</b>	<b>Pendapatan Lainnya</b>
3.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya
4.3.6.01.02	Dst.....

PJ. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KHERLANI



**LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 42 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 10 NOVEMBER 2015**

**KODE REKENING BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING DAERAH	URAIAN
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan
5.1.1.01.10	Uang Paket
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.01.20	Tunjangan Kesehatan DPRD
5.1.1.01.21	Tunjangan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
<b>5.1.1.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
5.1.1.02.07	Tunjangan Profesi Guru PNSD
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Guru PNSD
<b>5.1.1.03</b>	<b>Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH</b>
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati
<b>5.1.1.04</b>	<b>Biaya Pemungutan Pajak Daerah</b>
5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5.1.1.04.02	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.04.03	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5.1.1.04.04	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5.1.1.04.05	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
5.1.1.04.06	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
<b>5.1.1.05</b>	<b>Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor
5.1.1.05.02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.1.1.05.03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.1.1.05.04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan
5.1.1.05.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok
5.1.1.05.06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
5.1.1.05.17	Dst ...
<b>5.1.1.06</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
5.1.1.06.04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor
5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5.1.1.06.10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta
5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5.1.1.06.12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair
5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang
5.1.1.06.14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah
5.1.1.06.17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan
5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir
5.1.1.06.21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan
5.1.1.06.23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga
5.1.1.06.25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air
5.1.1.06.26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan
5.1.1.06.28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek
5.1.1.06.31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan
5.1.1.06.32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas
5.1.1.06.33	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
5.1.2	<b>Belanja Bunga</b>
5.1.2.01	<b>Bunga Utang Pinjaman</b>
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah
5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.1.2.01.05	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD
5.1.2.01.06	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN
5.1.2.01.07	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
5.1.2.01.08	Dst.....
5.1.2.02	<b>Bunga Utang Obligasi</b>
5.1.2.02.01	Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.02	Dst.....
5.1.3	<b>Belanja Subsidi</b>
5.1.3.01	<b>Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga</b>
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.3.01.02	Belanja Subsidi kepada BUMD
5.1.3.01.03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.4.02	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya</b>
5.1.4.02.01	Hibah kepada Pemerintah Provinsi
5.1.4.02.02	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5.1.4.02.03	Hibah kepada Pemerintah Kota
5.1.4.03	<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa</b>
5.1.4.03.01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD ...

KODE BUKU BUDGET	URAIAN
5.1.4.04	<b>Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD</b>
5.1.4.04.01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5.1.4.04.02	Belanja Hibah kepada Anggota Masyarakat
5.1.4.05	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
5.1.4.05.02	Dst ...
5.1.4.06	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat</b>
5.1.4.06.01	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota ...
5.1.4.07	<b>Belanja Hibah Dana BOS</b>
5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta
5.1.4.07.02	Dst.....
5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>
5.1.5.01	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
5.1.5.01.02	Dst.....
5.1.5.02	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat .....</b>
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada .....
5.1.5.02.02	Dst.....
5.1.5.03	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat .....</b>
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada .....
5.1.5.03.02	Dst.....
5.1.5.04	<b>Belanja Bantuan Kepada Partai Politik</b>
5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.....
5.1.5.04.02	Dst.....
5.1.6	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>
5.1.6.01	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi</b>
5.1.6.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi .....
5.1.6.02	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota</b>
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota .....
5.1.6.03	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b>
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa .....
5.1.6.04	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota</b>
5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota .....
5.1.6.05	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa</b>
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa .....
5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>
5.1.7.01	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi</b>
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi .....
5.1.7.02	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota</b>
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota....
5.1.7.03	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa</b>
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa .....
5.1.7.04	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya</b>
5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
5.1.7.05	<b>Belanja Bantuan Kepada Partai Politik</b>
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ....
5.1.7.05.02	Dst.....
5.1.7.06	<b>Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota</b>
5.1.7.06.01	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota
5.1.7.06.02	Dst.....
5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>

KODE REKENING	URAIAN
5.1.8.01	<b>Belanja Tak Terduga</b>
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01.02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam
5.1.8.01.03	Bencana Tak Terduga Luar Biasa Lainnya
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>
5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5.2.1.01.03	Honorarium Tim/Panitia
5.2.1.01.04	Diubah menjadi belanja barang dan jasa (5.2.2.28.02)
5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5.2.1.02.02	Honorarium Tim/Panitia
5.2.1.02.03	Diubah menjadi belanja barang dan jasa (5.2.2.28.02)
5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS
5.2.1.04	<b>Honorarium Pengelola Dana BOS</b>
5.2.1.04.01	Honorarium Pengelola Dana BOS
5.2.1.05	<b>Belanja Pegawai PPK-BLUD</b>
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai PPK-BLUD.
5.2.1.05.02	(5.2.1.5.2. dihapus)
5.2.1.06	<b>Belanja Pegawai Pengelolaan JKN</b>
5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Pengelolaan JKN pada FKTP
5.2.1.06.02	(5.2.1.6.2. dihapus)
5.2.1.06.03	(5.2.1.6.3. dihapus)
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas
5.2.2.01.09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer
5.2.2.01.10	Belanja Spanduk
5.2.2.01.11	Belanja Banner
5.2.2.01.12	Belanja Baliho
5.2.2.01.13	Belanja papan nama/plang
5.2.2.01.14	Belanja obat-obatan
5.2.2.01.15	Belanja bahan keperluan laboratorium
5.2.2.01.16	Belanja bahan alat olahraga
5.2.2.01.17	Belanja bahan dan alat kesehatan
5.2.2.01.18	Dst...
5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok
5.2.2.02.07	Belanja bahan untuk Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
5.2.2.02.08	Belanja alat listrik dan elektronik
5.2.2.02.09	Belanja bahan percontohan dan alat peraga
5.2.2.02.10	Belanja bahan untuk perikanan
5.2.2.02.11	Belanja bahan untuk peternakan
5.2.2.02.12	Belanja peralatan peternakan
5.2.2.02.13	Belanja perlengkapan peternakan
5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>
5.2.2.03.01	Belanja Telepon

5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja TV Kabel, Internet dan Multimedia
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengurusan Kendaraan Bermotor (SIM, STNK, PKB, BBNKB, KIR)
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Lampu Jalan
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Laundry
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Peliputan/Penayangan Kegiatan
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Sertifikasi Aset
<b>5 . 2 . 2 . 04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jasa Izin Siaran
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Dst...
<b>5 . 2 . 2 . 05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
<b>5 . 2 . 2 . 06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping
<b>5 . 2 . 2 . 07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5 . 2 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 07 . 05	Dst.....
<b>5 . 2 . 2 . 08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 2 . 2 . 08 . 03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5 . 2 . 2 . 08 . 04	Dst ...
<b>5 . 2 . 2 . 09</b>	<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator
5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Buldoser
5 . 2 . 2 . 09 . 03	Dst ...
<b>5 . 2 . 2 . 10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer
5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaiian Adat/Tradisional
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa alat studio dan alat komunikasi
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Alat Kesenian
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat olahraga
<b>5 . 2 . 2 . 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

KOD BERSIBING	URAIAN
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan
5.2.2.11.05	Dst.....
<b>5.2.2.12</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.06	Belanja pakaian Linmas
5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Polisi Pamong Praja
5.2.2.12.08	Belanja pakaian Olah Raga
5.2.2.12.09	Pakaian Dinas Lapangan
5.2.2.12.10	Pakaian Sipil Resmi
<b>5.2.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>
5.2.2.13.01	
5.2.2.13.02	Pakaian kerja cleaning service
5.2.2.13.03	Belanja pakaian kerja sopir
5.2.2.13.04	Belanja pakaian kerja montir
5.2.2.13.05	Belanja pakaian kerja Satpam
5.2.2.13.06	Belanja pakaian kerja petugas pemadam kebakaran
5.2.2.13.07	Belanja pakaian kerja Tenaga Medis dan Kesehatan
5.2.2.13.08	Belanja pakaian kerja Tukang Kebun
5.2.2.13.09	Belanja pakaian kerja Petugas Salar dan Kebersihan
5.2.2.13.10	Belanja pakaian kerja Petugas Parkir dan TPR
<b>5.2.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga
5.2.2.14.05	Belanja pakaian khas daerah
5.2.2.14.06	Belanja pakaian pramuka
5.2.2.14.07	Belanja Pakaian jas hujan
5.2.2.14.08	dst...
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri
<b>5.2.2.16</b>	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>
5.2.2.16.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
5.2.2.16.04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
5.2.2.16.05	Dst .....
<b>5.2.2.17</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.04	Dst.....
<b>5.2.2.18</b>	<b>Belanja Perjalanan Pindah Tugas</b>
5.2.2.18.01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
5.2.2.18.02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
<b>5.2.2.19</b>	<b>Belanja Pemulangan Pegawai</b>
5.2.2.19.01	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah
5.2.2.19.02	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Luar Daerah
5.2.2.19.03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
<b>5.2.2.20</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan alat-alat berat
5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor
5.2.2.20.05	Belanja pemeliharaan lat angkutan darat tidak bermotor

KODE BUDGET	URAIAN
5.2.2.20.06	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air bermotor
5.2.2.20.07	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor
5.2.2.20.08	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan udara
5.2.2.20.09	Belanja pemeliharaan alat-alat bengkel
5.2.2.20.10	Belanja pemeliharaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan
5.2.2.20.11	Belanja pemeliharaan peralatan kantor
5.2.2.20.12	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan peralatan rumah tangga
5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan alat-alat studio
5.2.2.20.15	Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi
5.2.2.20.16	Belanja pemeliharaan alat-alat ukur
5.2.2.20.17	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran
5.2.2.20.18	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium
5.2.2.20.19	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
5.2.2.20.20	Belanja pemeliharaan penerangan jalan, taman dan hutan kota
5.2.2.20.21	Belanja pemeliharaan instalasi listrik, air dan telepon
5.2.2.20.22	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan gedung
5.2.2.20.23	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan
5.2.2.20.24	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan taman
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan
5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan barang-barang perpustakaan
5.2.2.20.28	Belanja pemeliharaan alat penerangan dan rambu lalu lintas
5.2.2.20.29	Belanja pemeliharaan jaringan komputer
5.2.2.20.30	Belanja pemeliharaan perlengkapan rumah tangga
5.2.2.20.31	Pemeliharaan meubelair
<b>5.2.2.21</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.2.21.04	Belanja Jasa konsultansi bantuan hukum
5.2.2.21.05	Belanja Jasa penyusunan sistem informasi
5.2.2.21.06	Belanja Jasa konsultansi penelitian dan pengembangan (research and development)
5.2.2.21.07	Belanja Jasa Konsultansi audit
5.2.2.21.08	Belanja Jasa Konsultansi Managemen
<b>5.2.2.22</b>	<b>Belanja Barang Dana BOS</b>
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS
<b>5.2.2.23</b>	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.23.03	Dst.....
<b>5.2.2.24</b>	<b>Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>
5.2.2.24.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5.2.2.24.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.24.03	Dst.....
<b>5.2.2.25</b>	<b>Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga</b>
5.2.2.25.01	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat
5.2.2.25.02	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
<b>5.2.2.26</b>	<b>Belanja bantuan sosial barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga</b>
5.2.2.26.01	Belanja bantuan sosial barang/jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat
5.2.2.26.02	Belanja bantuan sosial barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
<b>5.2.2.27</b>	<b>Belanja barang/jasa PPK-BLUD</b>
5.2.2.27.01	Belanja barang/jasa PPK-BLUD.
<b>5.2.2.28</b>	<b>Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta</b>
5.2.2.28.01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan
5.2.2.28.02	Uang transport peserta
<b>5.2.2.29</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan JKN</b>
5.2.2.29.01	Belanja Barang dan Jasa JKN pada FKTP
5.2.2.29.02	Belanja jasa perawatan dan pengobatan
<b>5.2.2.30</b>	<b>Belanja Jasa Pihak Ketiga</b>
5.2.2.30.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelaksana Kegiatan
5.2.2.30.02	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan

5 . 2 . 2 . 31	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan Pelajar</b>
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Beasiswa S1
5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Beasiswa SMA /SMK
5 . 2 . 2 . 32	<b>Belanja sewa peralatan pertanian,kehutanan,kelautan dan perikanan</b>
5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja sewa peralatan kelautan dan perikanan
5 . 2 . 2 . 33	<b>Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>
5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 33 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>
5 . 2 . 3 . 01	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan</b>
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung
5 . 2 . 3 . 01 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen
5 . 2 . 3 . 01 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan
5 . 2 . 3 . 02	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian</b>
5 . 2 . 3 . 02 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5 . 2 . 3 . 02 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegalan
5 . 2 . 3 . 02 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang
5 . 2 . 3 . 03	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan</b>
5 . 2 . 3 . 03 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan
5 . 2 . 3 . 04	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran</b>
5 . 2 . 3 . 04 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
5 . 2 . 3 . 04 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
5 . 2 . 3 . 05	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan</b>
5 . 2 . 3 . 05 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat
5 . 2 . 3 . 05 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar
5 . 2 . 3 . 05 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5 . 2 . 3 . 05 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
5 . 2 . 3 . 05 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
5 . 2 . 3 . 06	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan</b>
5 . 2 . 3 . 06 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak
5 . 2 . 3 . 06 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar
5 . 2 . 3 . 07	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa</b>
5 . 2 . 3 . 07 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa
5 . 2 . 3 . 07 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau
5 . 2 . 3 . 08	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak</b>
5 . 2 . 3 . 08 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus
5 . 2 . 3 . 08 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak
5 . 2 . 3 . 09	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput</b>
5 . 2 . 3 . 09 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang
5 . 2 . 3 . 09 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput
5 . 2 . 3 . 10	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain</b>
5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian
5 . 2 . 3 . 11	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung</b>
5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5 . 2 . 3 . 11 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong
5 . 2 . 3 . 11 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
5 . 2 . 3 . 12	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan</b>
5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan
5 . 2 . 3 . 13	<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung</b>
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5 . 2 . 3 . 13 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang



5.2.3.13.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5.2.3.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5.2.3.13.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5.2.3.13.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5.2.3.13.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5.2.3.13.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
5.2.3.13.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
5.2.3.13.12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
5.2.3.13.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
<b>5.2.3.14</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat</b>
5.2.3.14.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor
5.2.3.14.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader
5.2.3.14.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator
5.2.3.14.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pile Driver
5.2.3.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler
5.2.3.14.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphalt Equipment
5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment
5.2.3.14.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment
5.2.3.14.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat
5.2.3.14.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses
<b>5.2.3.15</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung</b>
5.2.3.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger
5.2.3.15.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator
5.2.3.15.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amphibi Dredger
5.2.3.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik
5.2.3.15.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Agung
<b>5.2.3.16</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu</b>
5.2.3.16.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik
5.2.3.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder
5.2.3.16.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
5.2.3.16.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor
5.2.3.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5.2.3.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5.2.3.16.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
<b>5.2.3.17</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
<b>5.2.3.18</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</b>
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5.2.3.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
<b>5.2.3.19</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor</b>
5.2.3.19.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5.2.3.19.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5.2.3.19.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
<b>5.2.3.20</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor</b>
5.2.3.20.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5.2.3.20.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5.2.3.20.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
<b>5.2.3.21</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara</b>
5.2.3.21.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang
<b>5.2.3.22</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin</b>

5 . 2 . 3 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5 . 2 . 3 . 22 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5 . 2 . 3 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5 . 2 . 3 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service
5 . 2 . 3 . 22 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5 . 2 . 3 . 22 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5 . 2 . 3 . 22 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5 . 2 . 3 . 22 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las
5 . 2 . 3 . 22 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es
<b>5 . 2 . 3 . 23</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin</b>
5 . 2 . 3 . 23 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5 . 2 . 3 . 23 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5 . 2 . 3 . 23 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5 . 2 . 3 . 23 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat
5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5 . 2 . 3 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5 . 2 . 3 . 23 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5 . 2 . 3 . 23 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5 . 2 . 3 . 23 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5 . 2 . 3 . 23 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Peting
<b>5 . 2 . 3 . 24</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur</b>
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
5 . 2 . 3 . 24 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5 . 2 . 3 . 24 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5 . 2 . 3 . 24 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5 . 2 . 3 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi
5 . 2 . 3 . 24 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Oscilloscope
5 . 2 . 3 . 24 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester
5 . 2 . 3 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan /Biora
5 . 2 . 3 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
5 . 2 . 3 . 24 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Kering
5 . 2 . 3 . 24 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
5 . 2 . 3 . 24 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5 . 2 . 3 . 24 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
<b>5 . 2 . 3 . 25</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan</b>
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5 . 2 . 3 . 25 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Pternakan
5 . 2 . 3 . 25 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5 . 2 . 3 . 25 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing
5 . 2 . 3 . 25 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen
5 . 2 . 3 . 25 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan
<b>5 . 2 . 3 . 26</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan</b>
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5 . 2 . 3 . 26 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen
5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
5 . 2 . 3 . 26 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan
<b>5 . 2 . 3 . 27</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor</b>
5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
6 . 2 . 3 . 27 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Visual Elektronik
<b>5 . 2 . 3 . 28</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

5 . 2 . 3 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
<b>5 . 2 . 3 . 29</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer</b>
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
<b>5 . 2 . 3 . 30</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
<b>5 . 2 . 3 . 31</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio</b>
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5 . 2 . 3 . 31 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
5 . 2 . 3 . 31 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing
5 . 2 . 3 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
<b>5 . 2 . 3 . 32</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi</b>
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5 . 2 . 3 . 32 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5 . 2 . 3 . 32 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5 . 2 . 3 . 32 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi
<b>5 . 2 . 3 . 33</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar</b>
5 . 2 . 3 . 33 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5 . 2 . 3 . 33 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5 . 2 . 3 . 33 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5 . 2 . 3 . 33 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5 . 2 . 3 . 33 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5 . 2 . 3 . 33 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5 . 2 . 3 . 33 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5 . 2 . 3 . 33 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5 . 2 . 3 . 33 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF
5 . 2 . 3 . 33 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5 . 2 . 3 . 33 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF
5 . 2 . 3 . 33 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
5 . 2 . 3 . 33 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
5 . 2 . 3 . 33 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
5 . 2 . 3 . 33 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe FPU
5 . 2 . 3 . 33 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe Terestrial
5 . 2 . 3 . 33 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO
5 . 2 . 3 . 33 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load
5 . 2 . 3 . 33 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena
5 . 2 . 3 . 33 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena
5 . 2 . 3 . 33 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder
5 . 2 . 3 . 33 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Humidity Control
5 . 2 . 3 . 33 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input Equipment
5 . 2 . 3 . 33 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
<b>5 . 2 . 3 . 34</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran</b>
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5 . 2 . 3 . 34 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana

5.2.3.34.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5.2.3.34.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen
5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
5.2.3.34.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary
5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5.2.3.34.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliiklinik Set
5.2.3.34.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5.2.3.34.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
5.2.3.34.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5.2.3.34.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5.2.3.34.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5.2.3.34.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
5.2.3.34.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
<b>5.2.3.35</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan</b>
5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5.2.3.35.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5.2.3.35.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5.2.3.35.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5.2.3.35.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5.2.3.35.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
<b>5.2.3.36</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium</b>
5.2.3.36.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5.2.3.36.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5.2.3.36.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
5.2.3.36.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5.2.3.36.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
5.2.3.36.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5.2.3.36.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
5.2.3.36.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5.2.3.36.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Cokok Tanam
5.2.3.36.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5.2.3.36.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5.2.3.36.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5.2.3.36.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5.2.3.36.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5.2.3.36.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
5.2.3.36.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5.2.3.36.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5.2.3.36.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5.2.3.36.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film
5.2.3.36.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5.2.3.36.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
5.2.3.36.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5.2.3.36.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5.2.3.36.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5.2.3.36.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5.2.3.36.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
5.2.3.36.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5.2.3.36.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5.2.3.36.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
5.2.3.36.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
5.2.3.36.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5.2.3.36.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan

5 . 2 . 3 . 36 . 35	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam</b>
5 . 2 . 3 . 36 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
5 . 2 . 3 . 36 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5 . 2 . 3 . 36 . 38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5 . 2 . 3 . 36 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
5 . 2 . 3 . 36 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstil
5 . 2 . 3 . 36 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5 . 2 . 3 . 36 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
5 . 2 . 3 . 36 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5 . 2 . 3 . 36 . 44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5 . 2 . 3 . 36 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5 . 2 . 3 . 36 . 46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5 . 2 . 3 . 36 . 47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
5 . 2 . 3 . 36 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5 . 2 . 3 . 36 . 49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5 . 2 . 3 . 36 . 50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya
5 . 2 . 3 . 36 . 51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5 . 2 . 3 . 36 . 52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
5 . 2 . 3 . 36 . 53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5 . 2 . 3 . 36 . 54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
5 . 2 . 3 . 36 . 55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5 . 2 . 3 . 36 . 56	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
5 . 2 . 3 . 36 . 57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
5 . 2 . 3 . 36 . 58	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5 . 2 . 3 . 36 . 59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
5 . 2 . 3 . 36 . 60	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5 . 2 . 3 . 36 . 61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan
5 . 2 . 3 . 36 . 62	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
5 . 2 . 3 . 36 . 64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
<b>5 . 2 . 3 . 37</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah</b>
5 . 2 . 3 . 37 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5 . 2 . 3 . 37 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
5 . 2 . 3 . 37 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
5 . 2 . 3 . 37 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
5 . 2 . 3 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS
5 . 2 . 3 . 37 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
5 . 2 . 3 . 37 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
5 . 2 . 3 . 37 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
<b>5 . 2 . 3 . 38</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir</b>
5 . 2 . 3 . 38 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Analytical instrument
5 . 2 . 3 . 38 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5 . 2 . 3 . 38 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan General Laboratory Tool
5 . 2 . 3 . 38 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor A
5 . 2 . 3 . 38 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
5 . 2 . 3 . 38 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment
<b>5 . 2 . 3 . 39</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika</b>
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Detector
5 . 2 . 3 . 39 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Modular Counting and Scientific
5 . 2 . 3 . 39 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Assembly/Accounting System
5 . 2 . 3 . 39 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display

5 . 2 . 3 . 39 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply
5 . 2 . 3 . 39 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring / Testing Device
5 . 2 . 3 . 39 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Opto Electronics
5 . 2 . 3 . 39 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Accelator
5 . 2 . 3 . 39 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Reactor Experimental System
<b>5 . 2 . 3 . 40</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radial / Proteksi Lingkungan</b>
5 . 2 . 3 . 40 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5 . 2 . 3 . 40 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5 . 2 . 3 . 40 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan
5 . 2 . 3 . 40 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meteorological Equipment
5 . 2 . 3 . 40 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi
<b>5 . 2 . 3 . 41</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Lab</b>
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application Equipment
5 . 2 . 3 . 41 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
5 . 2 . 3 . 41 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
5 . 2 . 3 . 41 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Hidrologi
<b>5 . 2 . 3 . 42</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup</b>
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
5 . 2 . 3 . 42 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5 . 2 . 3 . 42 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5 . 2 . 3 . 42 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5 . 2 . 3 . 42 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
<b>5 . 2 . 3 . 43</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika</b>
5 . 2 . 3 . 43 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage
5 . 2 . 3 . 43 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber
5 . 2 . 3 . 43 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data
5 . 2 . 3 . 43 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Cavitation Tunnel
5 . 2 . 3 . 43 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Overhead Cranes
5 . 2 . 3 . 43 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum
5 . 2 . 3 . 43 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
5 . 2 . 3 . 43 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop
5 . 2 . 3 . 43 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop
5 . 2 . 3 . 43 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
5 . 2 . 3 . 43 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan Painting Shop
5 . 2 . 3 . 43 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
5 . 2 . 3 . 43 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop
5 . 2 . 3 . 43 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MOB
5 . 2 . 3 . 43 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film Equipment
<b>5 . 2 . 3 . 44</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api</b>
5 . 2 . 3 . 44 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Genggam
5 . 2 . 3 . 44 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Pinggang
5 . 2 . 3 . 44 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
5 . 2 . 3 . 44 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senapan Mesin
5 . 2 . 3 . 44 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mortir
5 . 2 . 3 . 44 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anti Lapis Baja
5 . 2 . 3 . 44 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Medan (Armed)
5 . 2 . 3 . 44 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
5 . 2 . 3 . 44 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Peluru Kendali/Rudal
5 . 2 . 3 . 44 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Kavaleri
5 . 2 . 3 . 44 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Senjata Lain-lain
<b>5 . 2 . 3 . 45</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api</b>
5 . 2 . 3 . 45 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan
5 . 2 . 3 . 45 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api
<b>5 . 2 . 3 . 46</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi</b>
5 . 2 . 3 . 46 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Umum

5 . 2 . 3 . 46 . 02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Darat</b>
5 . 2 . 3 . 47	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar</b>
5 . 2 . 3 . 47 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser
5 . 2 . 3 . 48	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan</b>
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Keamanan
5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan
5 . 2 . 3 . 49	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang
5 . 2 . 3 . 49 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
5 . 2 . 3 . 49 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium
5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5 . 2 . 3 . 49 . 15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pematangan Hewan
5 . 2 . 3 . 49 . 16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
5 . 2 . 3 . 49 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5 . 2 . 3 . 49 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5 . 2 . 3 . 49 . 20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5 . 2 . 3 . 49 . 22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5 . 2 . 3 . 49 . 23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan
5 . 2 . 3 . 49 . 24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5 . 2 . 3 . 49 . 25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
5 . 2 . 3 . 49 . 26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5 . 2 . 3 . 49 . 28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pagar
5 . 2 . 3 . 50	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>
5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5 . 2 . 3 . 50 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III
5 . 2 . 3 . 50 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
5 . 2 . 3 . 50 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama
5 . 2 . 3 . 50 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel
5 . 2 . 3 . 50 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel
5 . 2 . 3 . 50 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
5 . 2 . 3 . 51	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara</b>
5 . 2 . 3 . 51 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5 . 2 . 3 . 51 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5 . 2 . 3 . 51 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5 . 2 . 3 . 52	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah</b>
5 . 2 . 3 . 52 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Iatana Peringatan
5 . 2 . 3 . 52 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat

5 . 2 . 3 . 52 . 03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Peningggalan Sejarah</b>
5 . 2 . 3 . 52 . 04	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah</b>
5 . 2 . 3 . 52 . 05	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah</b>
<b>5 . 2 . 3 . 53</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan</b>
5 . 2 . 3 . 53 . 01	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan</b>
5 . 2 . 3 . 53 . 02	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan</b>
5 . 2 . 3 . 53 . 03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya</b>
<b>5 . 2 . 3 . 54</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi</b>
5 . 2 . 3 . 54 . 01	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Hindu</b>
5 . 2 . 3 . 54 . 02	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Budha</b>
5 . 2 . 3 . 54 . 03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Lainnya</b>
<b>5 . 2 . 3 . 55</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya</b>
5 . 2 . 3 . 55 . 01	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah</b>
<b>5 . 2 . 3 . 56</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>
5 . 2 . 3 . 56 . 01	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas</b>
5 . 2 . 3 . 56 . 02	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas</b>
<b>5 . 2 . 3 . 57</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu</b>
5 . 2 . 3 . 57 . 01	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat</b>
5 . 2 . 3 . 57 . 02	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar</b>
<b>5 . 2 . 3 . 58</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara</b>
5 . 2 . 3 . 58 . 01	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway/Threshold Light</b>
5 . 2 . 3 . 58 . 02	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)</b>
5 . 2 . 3 . 58 . 03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Approach Light</b>
5 . 2 . 3 . 58 . 04	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway Identification Light(Reils)</b>
5 . 2 . 3 . 58 . 05	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal</b>
5 . 2 . 3 . 58 . 06	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light</b>
<b>5 . 2 . 3 . 59</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan</b>
5 . 2 . 3 . 59 . 01	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional</b>
5 . 2 . 3 . 59 . 02	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Provinsi</b>
5 . 2 . 3 . 59 . 03	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota</b>
5 . 2 . 3 . 59 . 04	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa</b>
5 . 2 . 3 . 59 . 05	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus</b>
5 . 2 . 3 . 59 . 06	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tol</b>
5 . 2 . 3 . 59 . 07	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta</b>
5 . 2 . 3 . 59 . 08	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang</b>
<b>5 . 2 . 3 . 60</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan</b>
5 . 2 . 3 . 60 . 01	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Negara/Nasional</b>
5 . 2 . 3 . 60 . 02	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Provinsi</b>
5 . 2 . 3 . 60 . 03	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota</b>
5 . 2 . 3 . 60 . 04	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa</b>
5 . 2 . 3 . 60 . 05	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus</b>
5 . 2 . 3 . 60 . 06	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol</b>
5 . 2 . 3 . 60 . 07	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api</b>
5 . 2 . 3 . 60 . 08	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang</b>
5 . 2 . 3 . 60 . 09	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan</b>
<b>5 . 2 . 3 . 61</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi</b>
5 . 2 . 3 . 61 . 01	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi</b>
5 . 2 . 3 . 61 . 02	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi</b>
5 . 2 . 3 . 61 . 03	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi</b>
5 . 2 . 3 . 61 . 04	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi</b>
5 . 2 . 3 . 61 . 05	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi</b>
5 . 2 . 3 . 61 . 06	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi</b>
<b>5 . 2 . 3 . 62</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut</b>
5 . 2 . 3 . 62 . 01	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pasang Surut</b>
5 . 2 . 3 . 62 . 02	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut</b>



URUSAN	
5.2.3.62.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5.2.3.62.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
5.2.3.62.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5.2.3.62.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5.2.3.62.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
5.2.3.63	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa</b>
5.2.3.63.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
5.2.3.63.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5.2.3.63.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5.2.3.63.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5.2.3.63.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
5.2.3.63.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5.2.3.63.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5.2.3.64	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana</b>
5.2.3.64.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5.2.3.64.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5.2.3.64.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5.2.3.64.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
5.2.3.65	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah</b>
5.2.3.65.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5.2.3.65.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5.2.3.65.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5.2.3.65.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5.2.3.65.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
5.2.3.65.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan
5.2.3.66	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku</b>
5.2.3.66.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5.2.3.66.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5.2.3.66.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5.2.3.67	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor</b>
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
5.2.3.67.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
5.2.3.67.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
5.2.3.67.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5.2.3.68	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air</b>
5.2.3.68.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut
5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar

KODE REKONSILIASI	URAIAN
5 . 2 . 3 . 69	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih</b>
5 . 2 . 3 . 69 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah
5 . 2 . 3 . 69 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5 . 2 . 3 . 69 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam
5 . 2 . 3 . 69 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal
5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5 . 2 . 3 . 70	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor</b>
5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
5 . 2 . 3 . 70 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5 . 2 . 3 . 70 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
5 . 2 . 3 . 71	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah</b>
5 . 2 . 3 . 71 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5 . 2 . 3 . 72	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan</b>
5 . 2 . 3 . 72 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5 . 2 . 3 . 73	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik</b>
5 . 2 . 3 . 73 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air
5 . 2 . 3 . 73 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5 . 2 . 3 . 73 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
5 . 2 . 3 . 73 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5 . 2 . 3 . 73 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5 . 2 . 3 . 73 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5 . 2 . 3 . 73 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5 . 2 . 3 . 73 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5 . 2 . 3 . 73 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5 . 2 . 3 . 73 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5 . 2 . 3 . 73 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSM)
5 . 2 . 3 . 74	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik</b>
5 . 2 . 3 . 74 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5 . 2 . 3 . 74 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5 . 2 . 3 . 75	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan</b>
5 . 2 . 3 . 75 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat
5 . 2 . 3 . 76	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas</b>
5 . 2 . 3 . 76 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5 . 2 . 3 . 76 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5 . 2 . 3 . 77	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman</b>
5 . 2 . 3 . 77 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5 . 2 . 3 . 78	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum</b>
5 . 2 . 3 . 78 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa
5 . 2 . 3 . 78 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5 . 2 . 3 . 78 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
5 . 2 . 3 . 78 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah
5 . 2 . 3 . 79	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik</b>
5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi

KOD	URAIAN
5.2.3.80	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon</b>
5.2.3.80.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5.2.3.80.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5.2.3.80.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air
5.2.3.81	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas</b>
5.2.3.81.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5.2.3.81.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5.2.3.81.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas
5.2.3.81.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM
5.2.3.82	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku</b>
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa
5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5.2.3.83	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan</b>
5.2.3.83.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala
5.2.3.83.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan
5.2.3.84	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan</b>
5.2.3.84.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta
5.2.3.84.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah ( <i>Manuskrip</i> )
5.2.3.84.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik
5.2.3.84.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
5.2.3.84.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan <i>Three Dimensional Artetacs and Realita</i>
5.2.3.84.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro ( <i>Microform</i> )
5.2.3.84.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara
5.2.3.84.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer ( <i>Computer Files</i> )
5.2.3.84.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5.2.3.84.10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan <i>Tarscalt</i>
5.2.3.85	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan</b>
5.2.3.85.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan
5.2.3.85.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
5.2.3.85.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga
5.2.3.85.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan
5.2.3.85.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen
5.2.3.85.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah
5.2.3.85.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan
5.2.3.86	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya</b>
5.2.3.86.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam
5.2.3.86.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air
5.2.3.86.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5.2.3.87	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan</b>
5.2.3.87.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak
5.2.3.87.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas

KODING BUDGET	
5.2.3.87.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata
5.2.3.87.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan
5.2.3.87.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5.2.3.87.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan
<b>5.2.3.88</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman</b>
5.2.3.88.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan
5.2.3.88.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura
5.2.3.88.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias
5.2.3.88.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
<b>5.2.3.89</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi</b>
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KHERLANI

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 42 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 10 NOVEMBER 2015**

**KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>
<b>6.1.1.01</b>	<b>Pelampauan Penerimaan PAD</b>
6.1.1.01.01	Pajak Daerah
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah
<b>6.1.1.02</b>	<b>Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan</b>
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
<b>6.1.1.03</b>	<b>Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
<b>6.1.1.04</b>	<b>Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya</b>
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langaung
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa
6.1.1.04.04	Belanja Modal
6.1.1.04.05	Belanja Bunga
6.1.1.04.06	Belanja Subsidi
6.1.1.04.07	Belanja Hibah
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial
6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga
<b>6.1.1.05</b>	<b>Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terelesaikan</b>
6.1.1.05.01	Uang Jaminan .....
6.1.1.05.02	Potongan Taspen
6.1.1.05.03	Potongan Beras
6.1.1.05.04	ASKES
<b>6.1.1.06</b>	<b>Kegiatan Lanjutan</b>
6.1.1.06.01	Kegiatan Lanjutan
6.1.1.06.02	Kegiatan Lanjutan Pembayaran Utang T.A 2011
<b>6.1.1.07</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
<b>6.1.1.08</b>	<b>Koreksi SILPA</b>
6.1.1.08.01	Koreksi SILPA
6.1.1.08.02	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
6.1.1.08.03	Lain-Lain
<b>6.1.1.09</b>	<b>Sisa Belanja DAK</b>
6.1.1.09.01	DAK Bidang Pendidikan
6.1.1.09.02	DAK Bidang Kesehatan
6.1.1.09.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan
6.1.1.09.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
6.1.1.09.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
6.1.1.09.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
6.1.1.09.07	DAK Bidang Keluarga Berencana
6.1.1.09.08	DAK Bidang Kehutanan
6.1.1.09.09	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6.1.1.09.10	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
6.1.1.09.11	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan
6.1.1.09.12	DAK Bidang Transportasi Perdesaan
6.1.1.09.13	DAK Bidang Perdagangan

6.1.1.09.14	DAK Bidang Lingkungan Hidup
6.1.1.09.15	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT)
6.1.1.09.16	DAK Bidang Pertanian
6.1.1.09.17	DAK Bidang Pertanian
6.1.1.09.18	DAK Bidang Energi Pedesaan
6.1.1.09.19	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
6.1.1.09.20	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
6.1.1.09.21	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
<b>6.1.1.10</b>	<b>Sisa Belanja Dana Bagi Hasil</b>
6.1.1.10.01	Dana Bagi Hasil PBB
6.1.1.10.02	Dana Bagi Hasil PPh
6.1.1.10.03	Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan
6.1.1.10.04	Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutan
6.1.1.10.05	Dana Bagi Hasil DR
6.1.1.10.06	Dst.....
<b>6.1.1.11</b>	<b>Sisa Belanja Dana Penyesuaian</b>
6.1.1.11.01	Dana Penyesuaian BOS
6.1.1.11.02	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD
6.1.1.11.03	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD
6.1.1.11.04	Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD
6.1.1.11.05	Dana Penyesuaian DID
6.1.1.11.06	Dst.....
<b>6.1.1.12</b>	<b>Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus</b>
6.1.1.12.01	Dana Otonomi Khusus Aceh
6.1.1.12.02	Dana Otonomi Khusus Papua
6.1.1.12.03	Dana Otonomi Khusus Papua Barat
6.1.1.12.04	Dst.....
<b>6.1.1.13</b>	<b>Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur</b>
6.1.1.13.01	Dana Tambahan Infrastruktur Papua
6.1.1.13.02	Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
6.1.1.13.03	Dst.....
<b>6.1.2</b>	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>
<b>6.1.2.01</b>	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan Nomor .....
<b>6.1.3</b>	<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>
<b>6.1.3.01</b>	<b>Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>
6.1.3.01.01	BUMD .....
<b>6.1.3.02</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga</b>
6.1.3.02.01	.....
<b>6.1.4</b>	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>
<b>6.1.4.01</b>	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah</b>
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman .....
<b>6.1.4.02</b>	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Daerah Lain</b>
6.1.4.02.01	Pemerintah Daerah .....
<b>6.1.4.03</b>	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank</b>
6.1.4.03.01	Bank .....
<b>6.1.4.04</b>	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>
6.1.4.04.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank .....
<b>6.1.4.05</b>	<b>Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah</b>
6.1.4.05.01	Obligasi Atas Nama .....
<b>6.1.5</b>	<b>Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman</b>
<b>6.1.5.01</b>	<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
<b>6.1.6</b>	<b>Penerimaan Piutang Daerah</b>
6.1.6.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah

KODS PERUBAHAN	DESKRIPSI
6.1.6.01.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Pajak Daerah
6.1.6.01.02	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Retribusi Daerah
6.1.6.01.03	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lain-lain Pendapatan yang Sah
<b>6.1.6.02</b>	<b>Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah</b>
6.1.6.02.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah
<b>6.1.6.03</b>	<b>Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah Daerah Lain</b>
6.1.6.03.01	Pemerintah Daerah .....
<b>6.1.6.04</b>	<b>Penerimaan Piutang Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank</b>
6.1.6.04.01	Bank .....
<b>6.1.6.05</b>	<b>Penerimaan Piutang Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>
6.1.6.05.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank .....
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>
<b>6.2.1</b>	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>
<b>6.2.1.01</b>	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan Nomor .....
<b>6.2.2</b>	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>
<b>6.2.2.01</b>	<b>Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)</b>
6.2.2.01.01	BUMN .....
<b>6.2.2.02</b>	<b>Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b>
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank
<b>6.2.2.03</b>	<b>Badan Usaha Milik Swasta</b>
6.2.2.03.01	Badan .....
<b>6.2.3</b>	<b>Pembayaran Pokok Utang</b>
<b>6.2.3.01</b>	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah</b>
6.2.3.01.01	Penerusan Pinjaman .....
<b>6.2.3.02</b>	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain</b>
6.2.3.02.01	Pemerintah Daerah
<b>6.2.3.03</b>	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank</b>
6.2.3.03.01	Bank BPD Simulasi
<b>6.2.3.04</b>	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>
6.2.3.04.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank .....
<b>6.2.3.05</b>	<b>Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah</b>
6.2.3.05.01	Penerusan Pinjaman .....
<b>6.2.3.06</b>	<b>Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain</b>
6.2.3.06.01	Pemerintah Daerah .....
<b>6.2.3.07</b>	<b>Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank</b>
6.2.3.07.01	Bank .....
<b>6.2.3.08</b>	<b>Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>
6.2.3.08.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank .....
<b>6.2.3.09</b>	<b>Pelunasan Obligasi Daerah Pada Saat Jatuh Tempo</b>
6.2.3.09.01	Obligasi Atas Nama .....
<b>6.2.3.10</b>	<b>Pembelian Kembali Obligasi Daerah Sebelum Jatuh Tempo</b>
6.2.3.10.01	Obligasi Atas Nama .....
<b>6.2.4</b>	<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>
6.2.4.01	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah

KODE REKENING	URAIAN
6.2.4.01.01	Pemerintah
6.2.4.02	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain
6.2.4.02.01	Pemerintah Daerah .....
6.3	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>
6.3.1	<b>Pembiayaan Netto</b>
6.3.1.01	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>
6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
6.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>
6.4.1	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>
6.4.1.01	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>
6.4.1.01.01	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

PJ. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KHERLANI



STANDAR BIAYA UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

1	2	3	4	5	6
1	<b>Tambahan Penghasilan</b>				
	a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja :				
	1) Beban Kerja Pejabat	1 Sekretaris Daerah 2 Staf Ahli Bupati 3 Asisten 4 Kepala SKPD Eselon II kecuali Kepala BPKAD 5 Kepala SKPD Eselon III 6 Kepala Bagian pada Setdakab. dan Camat	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	20.000.000 10.000.000 12.000.000 10.000.000 6.000.000 5.000.000	
	2) Beban Kerja BAPPEDA	1 Kepala BAPPEDA 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Sub Bidang/Sub Bagian 5 Staf Gol. III 6 Staf Gol. II	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	11.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 1.750.000 1.500.000	
	3) Beban Kerja Inspektorat	1 Inspektur 2 Sekretaris 3 Inspektur Wilayah 4 Pengawas Madya 5 Kepala Sub Bagian 6 Pengawas Pemerintahan Muda 7 Auditor Ahli Muda 8 Pengawas Pemerintahan Pertama 9 Auditor Terampil 10 Pelaksana Gol. III 11 Pelaksana Gol. II	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	11.000.000 3.500.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.250.000 2.000.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000	
	4) Beban Kerja Sekretariat Daerah	1 Kepala Sub Bagian 2 Staf Gol. III 3 Staf Gol. II	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	2.500.000 1.750.000 1.500.000	

		SATUAN		
5)Beban Kerja TAPD dan Sekretariat TAPD a) T A P D	1	Ketua	Orang/Bulan	3.000.000
	2	Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.800.000
	3	Sekretaris	Orang/Bulan	2.700.000
	4	Anggota	Orang/Bulan	2.600.000
b) Sekretariat TAPD	1	Koordinator	Orang/Bulan	2.500.000
	2	Anggota	Orang/Bulan	2.400.000
	3	Operator	Orang/Bulan	2.300.000
2)Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	27.500.000
	2	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD	Orang/Bulan	25.000.000
	3	Kuasa BUD Eselon IIIa	Orang/Bulan	20.000.000
	4	Kuasa BUD Eselon IIIb	Orang/Bulan	15.000.000
	5	Kuasa BUD Eselon IV	Orang/Bulan	12.500.000
	6	Pelaksana BUD Eselon IV	Orang/Bulan	10.000.000
	7	Pelaksana BUD Gol. III	Orang/Bulan	6.000.000
	8	Pelaksana BUD Gol. II/I	Orang/Bulan	5.000.000
	9	Pelaksana BUD Non PNS	Orang/Bulan	2.500.000
b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas : 1)Dinas Pendidikan	1	SDN Pulau Sebuku Kecamatan Rajabasa	Orang/Bulan	500.000
	2	SDN Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa	Orang/Bulan	500.000
	3	SDN Pulau Harimau Kecamatan Ketapang	Orang/Bulan	500.000
	4	SMP Swadipa Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa	Orang/Bulan	500.000
	5	SMA Swadipa Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa	Orang/Bulan	500.000
	6	Pengawas Sekolah	Orang/Bulan	500.000
	2)Dinas Kesehatan		Tenaga Medis di Pulau Sebesi, Pulau Sebuku dan Pulau Rimau	Orang/Bulan
c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	1	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	12.500.000
	2	Dokter Gigi	Orang/Bulan	1.000.000
	3	Dokter Umum	Orang/Bulan	1.000.000
d. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 1)Uang makan harian a) Satuan Polisi Pamong Praja	1	PNS	Orang/Hari	20.000
	2	Non PNS	Orang/Hari	15.000

No		JENIS PELAYANAN	SATUAN	HESARAN	REKAPITULASI
	b) Dinas Perhubungan	1 PNS	Orang/Hari	20.000	
		2 No PNS	Orang/Hari	15.000	
	c) Satuan Pemadam Kebakaran	1 PNS	Orang/Hari	20.000	
		2 Non PNS	Orang/Hari	15.000	
	d) Protokol	1 PNS	Orang/Hari	20.000	
		2 Non PNS	Orang/Hari	15.000	
	2) Tunjangan Perbaikan Penghasilan	1 Eselon III a	Orang/Bulan	1.500.000	
		2 Eselon III b	Orang/Bulan	1.250.000	
		3 Eselon IV	Orang/Bulan	750.000	
		4 Staf Gol. IV	Orang/Bulan	500.000	
		5 Staf Gol. III	Orang/Bulan	450.000	
		6 Staf Gol. II	Orang/Bulan	400.000	
		7 Staf Gol. I	Orang/Bulan	350.000	
<b>2</b>	<b>Honorarium</b>				
	- Pengguna Anggaran	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	360.000	
		2 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.250 jt	Orang/Bulan	430.000	
		3 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000	
		4 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Orang/Bulan	575.000	
		5 Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Orang/Bulan	720.000	
		6 Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Orang/Bulan	900.000	
		7 Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Orang/Bulan	1.100.000	
		8 Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M	Orang/Bulan	1.300.000	
	- Kuasa Pengguna Anggaran	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000	
		2 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.250 juta	Orang/Bulan	410.000	
		3 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	480.000	
		4 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Orang/Bulan	550.000	
		5 Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Orang/Bulan	700.000	
		6 Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Orang/Bulan	800.000	
		7 Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Orang/Bulan	950.000	
		8 Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M	Orang/Bulan	1.100.000	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	1 Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum	Orang/Bulan	1.000.000	
		2 Sekretariat DPRD, BPKAD dan Rumah Sakit dr. Hi. Bob Bazar S.Km	Orang/Bulan	750.000	

		NO. DAN NAMA BELAKANG	SARAFAN	BIAYA BULAN	
	3	Badan/Dinas/Kantor	Orang/Bulan	600.000	
	4	Kecamatan	Orang/Bulan	350.000	
- Pejabat Pembuat Komitmen	1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	285.000	
	2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.250 jt	Orang/Bulan	360.000	
	3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	420.000	
	4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Orang/Bulan	480.000	
	5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Orang/Bulan	605.000	
	6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Orang/Bulan	665.000	
	7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Orang/Bulan	725.000	
	8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	Orang/Bulan	905.000	
	9	Nilai Pagu dana di atas Rp. 20 M s.d Rp. 50 M	Orang/Bulan	965.000	
	10	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 M	Orang/Bulan	1.030.000	
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	150.000	
	2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.250 jt	Orang/Bulan	175.000	
	3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	200.000	
	4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Orang/Bulan	225.000	
	5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Orang/Bulan	250.000	
	6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Orang/Bulan	275.000	
	7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Orang/Bulan	300.000	
	8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M	Orang/Bulan	325.000	
- Tenaga Ahli	1	Sekretariat Daerah	Orang/Bulan	6.000.000	
	2	Sekretariat DPRD	Orang/Bulan	3.000.000	
- Bendahara Pengeluaran	1	Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum	Orang/Bulan	800.000	
	2	Sekretariat DPRD, BPKAD dan Rumah Sakit dr. Hi. Bob Bazar S.Km	Orang/Bulan	500.000	
	3	Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Orang/Bulan	400.000	
	4	Kecamatan	Orang/Bulan	300.000	
- Bendahara Penerimaan	1	Dinas Pendapatan Daerah	Orang/Bulan	800.000	
	2	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika/Dinas Kesehatan/Rumah Sakit dr.Hi. Bob Bazar, S.Km/Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.	Orang/Bulan	350.000	
	3	SKPD Lainnya	Orang/Bulan	300.000	

URAIAN		Jumlah		Keterangan	
- Bendahara Pengeluaran Pembantu di SMP, SMK, dan SMA Negeri dan Puskesmas			Orang/Bulan	150.000	
- Pengawas Lapangan			Orang/Bulan	300.000	
- Bendahara Pengeluaran PPKD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	1	Bendahara Pengeluaran PPKD	Orang/Bulan	2.000.000	
	2	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	Orang/Bulan	1.000.000	
- Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	110.000	
	2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.250 jt	Orang/Bulan	120.000	
	3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	130.000	
	4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Orang/Bulan	140.000	
	5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Orang/Bulan	150.000	
	6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Orang/Bulan	160.000	
	7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Orang/Bulan	170.000	
	8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M	Orang/Bulan	180.000	
- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	1	Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat maksimal 2 orang	Orang/Bulan	250.000	
	2	Kecamatan 1 orang	Orang/Bulan	150.000	
- Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan	1	Sekretariat Daerah/DPRD	Orang/Bulan	300.000	
	2	Dinas/Badan	Orang/Bulan	250.000	
	3	Kantor	Orang/Bulan	200.000	
	4	Setingkat UPTD/Cabang Dinas	Orang/Bulan	200.000	
	5	Kecamatan	Orang/Bulan	150.000	
	6	Puskesmas	Orang/Bulan	150.000	
- Pengurus Barang	1	Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan/Dinas Pekerjaan Umum/Rumah Sakit Umum Daerah Dr. BOB BAZAR, SKM	Orang/Bulan	1.500.000	
	2	SKPD lainnya yang memiliki UPT di Kecamatan	Orang/Bulan	1.000.000	
	3	Dinas/Badan/Kantor	Orang/Bulan	750.000	
	4	Kecamatan	Orang/Bulan	500.000	

			BESARAN		
			5		
- Penyimpanan Barang	1 Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan/Dinas Pekerjaan Umum/Rumah Sakit Umum Daerah Dr. BOB BAZAR, SKM	Orang/Bulan	1.500.000		
	2 SKPD lainnya yang memiliki UPT di Kecamatan	Orang/Bulan	1.000.000		
	3 Dinas/Badan/Kantor	Orang/Bulan	750.000		
	4 Kecamatan	Orang/Bulan	500.000		
- Pembantu Pengurus Barang/Pembantu Penyimpanan Barang	1 Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan/Dinas Pekerjaan Umum/Rumah Sakit Umum Daerah Dr. BOB BAZAR, SKM	Orang/Bulan	500.000		
- Petugas Kebersihan	1 Dinas/Badan/Kantor	Orang/Bulan	500.000		
	2 Kecamatan	Orang/Bulan	300.000		
- Petugas Penjaga Keamanan	1 Dinas/Badan/Kantor	Orang/Bulan	500.000		
	2 Kecamatan	Orang/Bulan	300.000		
- Koordinasi Pelayanan Perizinan BPMPT a. Tim Koordinasi	1 Pembina	Orang/Bulan	1.000.000		
	2 Penanggungjawab	Orang/Bulan	850.000		
	3 Ketua	Orang/Bulan	800.000		
	4 Wakil Ketua	Orang/Bulan	750.000		
	5 Sekretaris	Orang/Bulan	700.000		
	6 Anggota	Orang/Bulan	600.000		
	b. Sekretariat	1 Koordinator	Orang/Bulan	600.000	
		2 Anggota Eselon IV	Orang/Bulan	550.000	
		3 Anggota Staf	Orang/Bulan	300.000	
- Kegiatan Keprotokoleran	1 Penanggungjawab	Orang/Bulan	1.300.000		
	2 Pelaksana	Orang/Bulan	1.200.000		
	3 Wakil Pelaksana	Orang/Bulan	1.000.000		
	4 Anggota Gol. III	Orang/Bulan	900.000		
	5 Anggota Gol. IV	Orang/Bulan	850.000		
	6 Petugas pengawal Bupati Lampung Selatan	Orang/Bulan	1.000.000		
	7 Petugas pengawal Wakil Bupati Lampung Selatan	Orang/Bulan	1.000.000		
	8 Petugas penjaga rumah dinas Bupati	Orang/Bulan	1.000.000		
	9 Ajudan Bupati	Orang/Bulan	750.000		

- Reviu RKA dan Laporan Keuangan oleh Inspektorat	10	Pengemudi Randis Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Bulan	500.000	
	11	Ajudan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	750.000	
	12	Pengemudi randis khusus tamu	Orang/Bulan	500.000	
	1	Pembina	Orang/Bulan	2.000.000	
	2	Ketua	Orang/Bulan	1.700.000	
	3	Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000	
	4	Koordinator	Orang/Bulan	1.300.000	
	5	Wakil Koordinator	Orang/Bulan	1.100.000	
6	Anggota	Orang/Bulan	900.000		
<b>3</b>	<b>Honorarium dan Upah untuk Non Pegawai Daerah/PNS</b>				
- Tenaga Harian Lepas Sukarela	1	S2	Orang/bulan	1.400.000	
	2	S1	Orang/bulan	1.300.000	
	3	D3	Orang/bulan	1.200.000	
	4	SMU	Orang/bulan	1.100.000	
	5	SMP, SD dan Non Pendidikan Formal	Orang/bulan	1.000.000	
	6	THLS Tenaga Kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Orang/bulan	1.200.000	
- Koordinasi Pelayanan Perizinan BPMPPT	1	THLS	Orang/bulan	250.000	
- Kegiatan Keprotokoleran	1	THLS	Orang/bulan	700.000	
<b>4</b>	<b>Uang Lembur Pegawai Daerah/PNS</b>				
- Uang Lembur	1	Golongan IV	1 Jam	25.000	Pemberian Uang Lembur pada Hari Libur dikalikan 200% dari besaran uang lembur
	2	Golongan III	1 Jam	20.000	
	3	Golongan II	1 Jam	17.000	
	4	Golongan I	1 Jam	13.000	
<b>5</b>	<b>Uang Lembur untuk THLS/PTT</b>				
- Uang Lembur	1	THLS/PTT	1 jam	10.000	
<b>6</b>	<b>Uang Makan Lembur</b>				
- Uang Makan Lembur	1	Semua Golongan dan Non PNS	kali	20.000	
<b>7</b>	<b>Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>				
- Biaya Beasiswa/Bantuan Tugas Belajar					

KETERANGAN	JENJANG	PERIODE	BESARAN	BESARAN
Pegawai Tugas Belajar Program D-3 di luar Provinsi Lampung - Pegawai Tugas Belajar S-1 diluar Provinsi Lampung - Pegawai Tugas Belajar S-2 di luar Provinsi Lampung	1 Tunjangan Belajar / Uang Buku, Uang Saku, Uang makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi dan Wisuda 1 Tunjangan Belajar / Uang Buku, Uang Saku, Uang makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi dan Wisuda 1 Tunjangan Belajar / Uang Buku, Uang Saku, Uang makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi dan Wisuda	setahun setahun setahun	15.000.000 20.000.000 25.000.000	
- Pegawai Tugas belajar Program Doktor (S-3) - Biaya Bantuan Pendidikan Penjurangan Struktural - Diklat Penjurangan PIM IV - Dalam Provinsi Lampung - Luar Provinsi Lampung - Diklat Penjurangan PIM III - Dalam Provinsi Lampung - Luar Provinsi Lampung - Diklat Penjurangan PIM II - Dalam Provinsi Lampung - Luar Provinsi Lampung	1 Tunjangan Belajar / Uang Buku, Uang Saku, Uang makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi dan Wisuda 1 Uang Saku dan Biaya Lainnya 2 Uang Saku dan Biaya Lainnya 1 Uang Saku dan Biaya Lainnya 2 Uang Saku dan Biaya Lainnya 1 Uang Saku dan Biaya Lainnya 2 Uang Saku dan Biaya Lainnya	setahun Ls Ls Ls Ls Ls	47.750.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 26.000.000	
- Pegawai Tugas Belajar D3, S1, dan S2 Seluruh Biayanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pelaksana	1 Uang Saku	Orang/Bulan	300.000	
- Biaya Bantuan Uang Saku Pendidikan Formal dan Informal - Dalam Provinsi Lampung	1 Golongan IV 2 Golongan III 3 Golongan II 4 Golongan I	Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari	200.000 175.000 150.000 125.000	
- Luar Provinsi Lampung	1 Bupati, Wakil Bupati serta Unsur Pimpinan DPRD 2 Golongan IV 3 Golongan III 4 Golongan II 5 Golongan I	Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari	450.000 300.000 275.000 250.000 225.000	



NO	URAIAN	DEKALISASI BERANGKAP	SATUAN	DASAR HARGA	BERANGKAP	
					6	
8	<b>Biaya Makanan dan Minuman</b>				Harga merupakan batas maksimum dan sudah termasuk pajak	
	- Biaya Makanan dan Minuman Harian	1	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Snack	Orang		10.000
	- Biaya Makanan dan Minuman Rapat	2	Jamuan Makan (Prasmanan) Tamu VIP	Orang		30.000
	- Biaya Makanan dan Minuman Tamu	3	Jamuan Makan (Prasmanan) untuk Pelatihan, Penataran,	Orang		25.000
	- Biaya Makanan Pelaksanaan Kegiatan	4	Jamuan Makan (Nasi Kotak)	Orang		22.500
9	<b>Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan</b>					
	- BUPATI	1	Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang	Unit/Tahun	35.000.000	
		2	Biaya service	Unit/Tahun	20.000.000	
		3	Biaya pembelian BBM	Unit/Tahun	15.000.000	
		4	Biaya pembelian pelumas	Unit/Tahun	750.000	
		5	Pembelian Accu	Unit/Tahun	1.200.000	
		6	Pembelian Ban	Unit/Tahun	7.500.000	
	- WAKIL BUPATI	1	Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang	Unit/Tahun	25.000.000	
		2	Biaya service	Unit/Tahun	20.000.000	
		3	Biaya pembelian BBM	Unit/Tahun	15.000.000	
		4	Biaya pembelian pelumas	Unit/Tahun	750.000	
		5	Pembelian Accu	Unit/Tahun	1.200.000	
		6	Pembelian Ban	Unit/Tahun	7.500.000	
	- SEKRETARIS DAERAH	1	Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang	Unit/Tahun	17.500.000	
		2	Biaya service	Unit/Tahun	7.500.000	
		3	Biaya pembelian BBM	Unit/Tahun	8.500.000	
		4	Biaya pembelian pelumas	Unit/Tahun	750.000	
		5	Pembelian Accu	Unit/Tahun	1.200.000	
		6	Pembelian Ban	Unit/Tahun	7.500.000	
	- KETUA DPRD	1	Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang	Unit/Tahun	27.500.000	
		2	Biaya service	Unit/Tahun	21.000.000	
		3	Biaya pembelian BBM	Unit/Tahun	8.000.000	
		4	Biaya pembelian pelumas	Unit/Tahun	750.000	
		5	Pembelian Accu	Unit/Tahun	1.200.000	
		6	Pembelian Ban	Unit/Tahun	7.500.000	
	- WAKIL KETUA DPRD	1	Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang	Unit/Tahun	25.000.000	
		2	Biaya service	Unit/Tahun	20.000.000	
		3	Biaya pembelian BBM	Unit/Tahun	7.800.000	
		4	Biaya pembelian pelumas	Unit/Tahun	750.000	
		5	Pembelian Accu	Unit/Tahun	1.200.000	
		6	Pembelian Ban	Unit/Tahun	7.500.000	

NO	URAIAN	BENTUK/SAJIAN/BIAYA	SATUAN	BESARAN	KEPERLUAN
1	2			5	6
	- SKPD				
	- Biaya Penggantian Suku Cadang	1 Mobil Minibus, Jeep	1 Tahun	5.000.000	
		2 Mobil Bus 3/4, Bus Besar, Truck	1 Tahun	10.000.000	
	- Biaya Service	1 Mobil Minibus, Jeep	1 Tahun	1.500.000	
		2 Mobil Bus 3/4, Bus Besar, Truck	1 Tahun	1.750.000	
	- Biaya Pembelian BBM				
	1. Mobil Kepala SKPD, Sekretaris SKPD dan Kendaraan Dinas Operasional lainnya dan Anggota DPRD	1 Mobil Dinas	Unit/Bulan	3.500.000	
	2. Sepeda Motor (BBM dan Pemeliharaan)	1 Sepeda Motor	Unit/Bulan	300.000	
	- Biaya Pembelian Pelumas	1 Mobil Minibus	Unit/Bulan	400.000	
		2 Mobil Jeep	Unit/Bulan	500.000	
		3 Mobil Bus ¾	Unit/Bulan	500.000	
		4 Mobil Bus Besar	Unit/Bulan	600.000	
		5 Mobil Truck	Unit/Bulan	700.000	
	- Pembelian Accu	1 Mobil Minibus, Jeep	Unit/Tahun	750.000	
		2 Mobil Bus 3/4, Bus Besar	Unit/Tahun	1.500.000	
		3 Mobil Truck / Tibum, Bus 3/4	Unit/Tahun	1.500.000	
10	Belanja Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung				
	- Bangunan Gedung Perkantoran	1 Sekretariat Daerah	Unit/Tahun	100.000.000	
		2 Sekretariat DPRD	Unit/Tahun	75.000.000	
		3 Dinas/Badan/Kantor	Unit/Tahun	25.000.000	
11	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Perlengkapannya				
	- SKPD	1 Komputer Meja (Desktop)	Unit/Tahun	1.500.000	
		2 Komputer Laptop, Notebook, Desknote atau yang sejenis	Unit/Tahun	750.000	
		3 Printer	Unit/Tahun	500.000	
12	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
	- SKPD	1 Mesin Ketik	Unit/Tahun	250.000	
		2 Alat - alat Elektronik, dll	Unit/Tahun	500.000	
13	Honorarium/Upah				
	- TIM/PANITIA KEGIATAN				
	- Sampai Dengan Rp100 juta	1 Pembina/Penasehat/Pengarah	Org/Keg/Bln	300.000	- honorarium tim/panitia kegiatan dengan pagu anggaran sampai dengan Rp.100.000.000,00 maksimal anggota 5 org
		2 Penanggungjawab	Org/Keg/Bln	260.000	
		3 Ketua	Org/Keg/Bln	250.000	
		4 Wakil Ketua	Org/Keg/Bln	240.000	
		5 Sekretaris/koordinator	Org/Keg/Bln	230.000	

	PENTILANGAN	SARJAN	BOSJAN	KEMERANGAN
<p>- Rp100 juta - sampai dengan 300 juta</p> <p>- Rp300 juta - sampai dengan Rp500 juta</p> <p>- 500.000.000,- keatas</p>	<p>6 Staf/Anggota</p> <p>1 Pembina/Penasehat/Pengarah</p> <p>2 Penanggungjawab</p> <p>3 Ketua</p> <p>4 Wakil Ketua</p> <p>5 Sekretaris/koordinator</p> <p>6 Staf/Anggota</p> <p>1 Pembina/Penasehat/Pengarah</p> <p>2 Penanggungjawab</p> <p>3 Ketua</p> <p>4 Wakil Ketua</p> <p>5 Sekretaris/koordinator</p> <p>6 Staf/Anggota</p> <p>1 Pembina/Penasehat/Pengarah</p> <p>2 Penanggungjawab</p> <p>3 Ketua</p> <p>4 Wakil Ketua</p> <p>5 Sekretaris/koordinator</p> <p>6 Staf/Anggota</p>	<p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p> <p>Org/Keg/Bln</p>	<p>200.000</p> <p>400.000</p> <p>350.000</p> <p>320.000</p> <p>280.000</p> <p>260.000</p> <p>220.000</p> <p>500.000</p> <p>450.000</p> <p>400.000</p> <p>350.000</p> <p>300.000</p> <p>250.000</p> <p>550.000</p> <p>500.000</p> <p>450.000</p> <p>400.000</p> <p>350.000</p> <p>300.000</p>	<p>6</p> <p>- honorarium tim/panitia kegiatan dengan pagu anggaran diatas Rp.100.000.000,00 maksimal anggota 10 org</p> <p>- honorarium tim/panitia kegiatan maksimal diberikan selama 6 bulan kecuali untuk petugas lapangan</p> <p>- Untuk kegiatan yang melibatkan lintas sektor jumlah anggota dapat melebihi ketentuan</p>
<p>- PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA</p>	<p>1 Nilai pagu dana s.d Rp. 50 juta</p> <p>2 Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d Rp.100 jt</p> <p>3 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta</p>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>300.000</p> <p>350.000</p> <p>400.000</p>	<p>Jumlah bulan disesuaikan dengan volume pekerjaan</p>
<p>- PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN</p>	<p>1 Nilai pagu dana s.d Rp. 50 juta</p> <p>2 Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d Rp.100 jt</p> <p>3 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta</p>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>200.000</p> <p>250.000</p> <p>300.000</p>	
<p>- PANITIA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI /UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI)</p>	<p>1 Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta</p> <p>2 Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M</p> <p>3 Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M</p> <p>4 Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M</p> <p>5 Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M</p> <p>6 Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M</p> <p>7 Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 M</p>	<p>O/P</p> <p>O/P</p> <p>O/P</p> <p>O/P</p> <p>O/P</p> <p>O/P</p> <p>O/P</p>	<p>475.000</p> <p>570.000</p> <p>730.000</p> <p>835.000</p> <p>935.000</p> <p>1.145.000</p> <p>1.250.000</p>	<p>Per Paket</p>

Kategori		Kategori		Kategori	
- PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONTRUKSI)	1	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta	O/P	400.000	Per Paket
	2	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M	O/P	600.000	
	3	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	O/P	750.000	
	4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	O/P	900.000	
	5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	O/P	1.000.000	
	6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	O/P	1.100.000	
	7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 M	O/P	1.250.000	
- PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI /UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI)	1	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d Rp.100 jt	O/P	300.000	Per Paket
	2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	O/P	400.000	
	3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 M	O/P	500.000	
	4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 M s.d Rp. 1 M	O/P	600.000	
	5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	O/P	700.000	
	6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	O/P	800.000	
	7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	O/P	900.000	
	8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	O/P	1.000.000	
	9	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 M	O/P	1.100.000	
- PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI/BARANG DAN JASA LAINNYA	1	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta	O/P	250.000	Per Paket
	2	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M	O/P	350.000	
	3	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	O/P	450.000	
	4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	O/P	550.000	
	5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	O/P	650.000	
	6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	O/P	750.000	
	7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 M	O/P	850.000	
<b>14</b>	<b>Honorarium/Upah</b>				
- Narasumber	1	Menteri/Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	
	2	Pejabat Eselon I	OJ	1.400.000	
	3	Pejabat Eselon II Pusat	OJ	1.000.000	
	4	Pejabat Eselon III dibawah dari Pusat	OJ	900.000	
	5	Pejabat Eselon II Provinsi	OJ	800.000	
	6	Pejabat Eselon II Kabupaten	OJ	700.000	
	7	Pejabat Eselon III Provinsi	OJ	400.000	
	8	Pejabat Eselon III Kabupaten	OJ	300.000	
	9	Pejabat Eselon IV dibawah Daerah	OJ	250.000	
	10	Widyaiswara	OJ	200.000	
- Moderator, Pembaca Doa dan Pembawa Acara	1	Moderator	OJ	100.000	
	2	Pembaca Do'a	OK	150.000	
	3	Pemandu Acara	OA	150.000	

NO	URAIAN	PEMBELAN/DESKRIPSI	SATUAN	BIAYA	REMARKS
	- Transportasi Narasumber dan Peserta	1 Menteri/Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	PP	1.000.000	
		2 Pejabat Eselon I	PP	1.000.000	
		3 Pejabat Eselon II Pusat	PP	1.000.000	
		4 Pejabat Eselon III dibawah dari Pusat	PP	800.000	
		5 Pejabat Eselon II Daerah	PP	100.000	
		6 Pejabat Eselon III Daerah	PP	100.000	
		7 Pejabat Eselon IV dibawah Daerah	PP	100.000	
		8 Staf Ahli	PP	100.000	
		9 Peserta	PP	50.000	
<b>15</b>	<b>Biaya Jasa Pihak Ketiga - Pelaksanaan Kegiatan</b>				
	- Untuk Kegiatan yang dilaksanakan diatas 3 hari dibuatkan SPK/Kontrak atau MoU atau Perjanjian Sejenis Lainnya dengan Pihak Ketiga Tarif disesuaikan dengan Harga Negosiasi				
<b>15</b>	<b>Honorarium</b>				
	- Untuk Kegiatan yang melibatkan FORKOMPIMDA atau Instansi Luar diatur dengan Keputusan Bupati				

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KHERLANI